



DAFTAR ISI

Analisis Teknikal Return Saham dengan Indikator-Indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator

Ikhza Syafa Muis, Maretha Ika Prajawati & Basir S 143-153

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia

Rifqi Muhammad, Imtinani Arifah & Peni Nugraheni 154-167

Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Kurs terhadap Harga Beras di Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Intervening

Muhammad Syariful Anam, Dian Luthvita Nadila & Iskandar Iskandar 168-183

Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa

Iskandar Budiman 184-199

Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa)

Safrizal Safrizal, Safuridar Safuridar & Muhammad Fuad 200-213

Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Moh. Faizin 214-227

Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah terhadap Eksternalitas Sampah Plastik di Kota Jayapura

Christina Irwati Tanan, Jimmi Ari Duri & Dwi Utari Tamanbali 228-241

Pengaruh Green Marketing dan Service Quality terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Customer Satisfaction sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Starbucks Coffee Kota Surabaya)

Dwitriana Ulfi Rizqiningsih & Arry Widodo 242-256

Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Rini Raharti, Titi Laras & Oktavianti Oktavianti 257-270

Pengaruh Karakteristik Individu dan Faktor Ekstrinsik terhadap Kinerja Bidan

Herna Linda, Zulfendri Zulfendri & Juanita Juanita 271-285



Analisis Teknikal *Return* Saham dengan Indikator-Indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator

Technical Analysis of Stock Returns with Bollinger Band, Parabolic SAR, and Stochastic Oscillator Indicators

Ikhza Syafa Muis¹⁾, Maretha Ika Prajawati²⁾, Basir S³⁾

^{1,2)}Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang

³⁾Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat

e-mail korespondensi: Ikhza25@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 08 Juli 2020 Disetujui: 09 September 2020 Dipublikasikan: Juli 2021	Dalam mengambil keputusan dalam membeli saham di pasar modal, seorang investor harus mengetahui metode analisis yang ada di dalam investasi saham. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis teknikal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan <i>return</i> saham yang dihasilkan menggunakan indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>, sehingga diperoleh 14 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator dapat dijadikan pedoman dalam menentukan jual-beli saham untuk mendapatkan <i>return</i> yang optimal. Kata Kunci: Analisis Teknikal, Bollinger Band, Parabolic SAR, Stochastic Oscillator, <i>Return</i> Saham.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.2467 <i>Cara Mensitasi :</i> Muis, I. S., Prajawati, M. I., & Basir S. (2021). Analisis teknikal <i>return</i> saham dengan indikator-indikator Bollinger band, parabolic SAR, dan stochastic oscillator. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 143-153. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2467.	

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 08 July 2020 Accepted: 09 September 2020 Published: July 2021	<i>In making a decision to buy shares in the stock market, an investor must know the analytical methods involved in stock investing. One of the methods used is technical analysis. This study aims to determine the comparison of stock returns generated using the Bollinger Band, Parabolic SAR, and Stochastic Oscillator indicators. This type of research is a quantitative approach with a comparative method. The sampling technique used purposive sampling, in order to obtain 14 companies. The results show that the indicators of Bollinger Band, Parabolic SAR, and Stochastic Oscillator can be used as guidelines in determining the buying and selling of stocks to get optimal returns.</i> Keywords: Technical Analysis, Bollinger Band, Parabolic SAR, Stochastic Oscillator, Stock Return.
<i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.2467 <i>How to cite :</i> Muis, I. S., Prajawati, M. I., & Basir S. (2021). Analisis teknikal <i>return</i> saham dengan indikator-indikator Bollinger band, parabolic SAR, dan stochastic oscillator. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 143-153. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2467.	

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek atau penawaran umum dari perusahaan yang akan *go-public* serta dapat juga dikatakan sebagai wadah bagi investor dan pihak ketiga yang membutuhkan dana besar untuk melakukan jual-beli atau perdagangan instrumen pasar modal (Rahardjo, 2006). Pasar modal dari tahun ke tahun terobservasi terus mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Hal ini terlihat dari total investor di Pasar Modal Indonesia yang tercatat di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai *Single Investor Identification* (SID) mencapai 2,47 juta SID per Desember 2019. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 53 persen dibandingkan periode Desember 2018 yang tercatat sebanyak 1,62 juta SID. Dari keseluruhan total investor 44,62 persen adalah investor milenial atau lebih muda dari 30 tahun. Dalam pengelompokan ini, aset terdaftar dari investor milenial mencapai Rp. 12,42 triliun (Artanti, 2019).

Dengan adanya media pasar modal, masyarakat berpenghasilan kecil mempunyai kesempatan untuk mengembangkan uang mereka dengan berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau membeli sebagian kecil saham perusahaan publik. Apabila sebagian kecil saham tersebut terus berkembang dan meningkat jumlahnya, maka terdapat kemungkinan bisa menjadi pemilik saham mayoritas.

Sebelum mengambil keputusan dalam membeli saham di pasar modal, seorang investor harus mengetahui metode analisis yang ada di dalam investasi saham. Terdapat dua metode analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu analisis saham untuk mengetahui nilai sebenarnya dari suatu aset finansial yang berasal dari laporan keuangan perusahaan; sedangkan analisis

teknikal adalah teknik menganalisis naik turunnya harga dalam jangka waktu tertentu atau berhubungan dengan faktor lain seperti volume transaksi. Oleh karena itu, analisis teknikal banyak menggunakan grafik. Dari pergerakan tersebut akan terlihat pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham. Biasanya analisis fundamental banyak digunakan oleh investor jangka panjang, sedangkan analisis teknikal banyak digunakan investor jangka pendek maupun menengah.

Dalam penelitian ini digunakan analisis teknikal untuk membantu proses analisis saham. Analisis teknikal yang dipakai dalam penelitian ini adalah indikator-indikator Bollinger Bands yang ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an, Parabolic SAR oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978-an, dan Stochastic Oscillators oleh George C. Lane pada tahun 1950-an.

Dalam pemilihan ketiga indikator itu dikarenakan terdapat penelitian terdahulu yang meneliti penggunaan indikator tersebut, sehingga peneliti ingin membuktikan kebenaran hasil penelitian tersebut. Indikator-indikator tersebut juga memiliki kelebihan diantaranya Bollinger Bands yang memiliki kelebihan berupa kemampuan mendeteksi berakhirnya suatu trend, dapat digunakan untuk melihat pergantian momentum. Parabolic SAR memiliki kelebihan yaitu cukup ampuh ketika *market* mengalami trend kuat, menginformasikan bahwa pasar sedang *trending* dan memberitahu adanya indikasi-indikasi pembalikan arah harga. Stochastic Oscillator memiliki kelebihan yaitu mampu memberikan sinyal lebih dini.

Penelitian terdahulu yang mendukung mengenai penggunaan indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, Stochastic Oscillator yaitu: Frankandinata & Cahyadi (2014) yang meneliti indikator Bollinger Bands terhadap pergerakan harga saham

saham AALI; Marli & Deccasari (2014) yang meneliti Bollinger Band dalam transaksi *short time* perdagangan saham; Srichawla & Romprasert (2017) yang meneliti efektifitas indikator konfirmasi pada saham di Bursa Thailand dengan enam indikator; Sulthon *et al.* (2018) yang meneliti mengenai Parabolic SAR sebagai indikator tambahan; Prabatha (2012) yang meneliti Stochastic Oscillator dan MACD pada saham-saham JII; M'ng & Mehralizadeh (2016) yang meneliti mengenai Bollinger Band dan Stochastic Oscillator di pasar berjangka; serta, Prasetyo *et al.* (2019) yang meneliti penggunaan metode-metode Stochastic Oscillator, MA, dan MACD.

Penelitian-penelitian yang berargumen bahwa indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, Stochastic Oscillator tidak menguntungkan diantaranya oleh Suryawan & Bagiarta (2017) yang meneliti strategi Bolinger Band, MA, dan RSI pair AUD/USD dan EUR/USD; How *et al.* (2015) yang meneliti Candlestick dan Parabolic SAR pada komoditas emas; serta, Suryawan (2016) yang meneliti kombinasi Stochastic dan Linier Weighted Moving Average di pasar forex. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dinilai sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan analisis teknikal dalam menilai *return* saham.

Investasi

Investasi merupakan penanaman modal yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa investasi merupakan komitmen atas penanaman modal atau sejumlah dana dengan harapan mendapatkan keuntungan masa yang akan datang (Sunariyah, 2006). Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Tandelilin (2001), terdapat berbagai macam alasan mengapa seseorang

melakukan kegiatan investasi, antara lain adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan, mengurangi imbas dari inflasi, sebagai usaha menghemat pajak.

Analisis Teknikal

Menurut Hendarto (2005), analisis teknikal adalah analisis yang memakai pengujian pergerakan harga di masa lampau untuk bertujuan memprediksikan (*forecast*) pergerakan harga di masa mendatang. Analisis teknikal dapat dipakai untuk melakukan *forecast* antara lain pada valuta asing (*forex*), saham (*stock*), opsi (*option*), ataupun instrumen-instrumen yang dapat diperjual-belikan di pasar keuangan.

Bollinger Band

Indikator yang ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an merupakan pengembangan MA atau *Moving Average* menjadi dua garis, yaitu garis atas atau *upper bands*, dan garis bawah atau *lower bands*. Apabila pergerakan harga berada di luar *upper bands* maka mengkonfirmasi bahwa kondisi harga sedang jenuh beli atau *overbought*. Sebaliknya, apabila harga berada di luar *lower band* akan mengkonfirmasi bahwa kondisi sedang mengalami jenuh jual atau *oversold*.

Untuk rekomendasi setting standar oleh John Bollinger yaitu 20 – 2. Angka ini berarti menggunakan MA-20 dengan 2 Standar Deviasi. Garis *upper band* adalah hasil dari MA-20 ditambahkan 2 Standar Deviasi; sedangkan garis *lower band* adalah hasil dari MA-20 dikurangi 2 Standar Deviasi. Deviasi adalah istilah yang digunakan untuk menampilkan volatilitas atas suatu saham (Ong, 2016).

Parabolic SAR

Parabolic SAR merupakan indikator ini ditemukan oleh J. Welles Wilder tahun 1978.

Indikator ini dinilai cukup baik ketika pergerakan harga mengalami trend kuat, sebaliknya indikator ini dianggap kurang sesuai bagi *market* dalam kondisi *sideways*; sehingga indikator ini bisa dikatakan sebagai bagian dari trend *following indicators*. Kata “SAR” pada indikator ini merupakan komparasi antara waktu dan harga yang berasal dari kata “*Stop and Reverse*”. Di sisi lain, kata “*Parabolic*” digunakan untuk mengilustrasikan garis Parabolic SAR yang berpola seperti bentuk parabola (Ong, 2016).

Stochastic Oscillator

Indikator Stochastic ditemukan oleh George C. Lane. Indikator ini menampilkan dua garis dalam *oscillator* yang disebut dengan garis %D dan %K. Kedua garis ini berkisar antara skala 0-100. Di level 80 ke atas disebut dengan zona *overbought* (jenuh beli), dan di level 20 ke bawah disebut dengan zona *oversold* (jenuh jual). Garis %K adalah garis utama dan disebut dengan *signal line*. Sedangkan garis %D adalah *moving average* dari garis %K dan disebut dengan *trigger line*. Sinyal beli apabila garis %K memotong ke atas garis %D dan berada di zona *oversold*; sementara sinyal jual apabila garis %K memotong ke bawah garis %D dan berada di zona *overbought* (Ong, 2016).

Return Saham

Return saham merupakan perolehan yang dijelaskan dari presentase modal awal investasi. Perolehan investasi dalam saham meliputi profit dari jual beli saham, yang mana apabila profit disebut dengan *capital gain* dan apabila rugi disebut *capital loss*. Di sisi lain, investor juga bisa mendapatkan dividen setiap tahunnya dari perusahaan. Pada penelitian ini, *return* saham yang digunakan yaitu menghitung *capital gain* (atau *loss*) dengan grafik harga saham harian. Untuk

menghitung *return* saham dapat dilakukan menggunakan rumus (Samsul, 2006):

$$R = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

dimana R adalah *return* saham i untuk waktu t ; P_t adalah harga untuk waktu t ; dan, P_{t-1} adalah harga untuk waktu sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan metode komparatif. Menurut Suryani & Hendryadi (2016), penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan satu atau lebih data sampel. Penggunaan metode komparatif digunakan untuk membandingkan antara indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic Sar dan Stochastic Oscillator dalam menganalisis *return* saham.

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang tergolong dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel diseleksi menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu dalam memilih sampelnya, sehingga didapatkan 14 perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari total keseluruhan. Prosedur pemilihan sampel dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Metode Analisis Data

Data penelitian diinput melalui grafik pergerakan harga saham harian dengan menggunakan *software* Chartnexus version 5 pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2017-2019.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar kedalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama periode 2017-2019	53
2	Perusahaan yang pergerakan grafik sahamnya tidak mengalami <i>bullish</i> maupun <i>bearish</i> (saham yang tidak ada pergerakan dalam waktu yang lama, sedikit peminat, dan sudah mencapai harga batas bawah)	(11)
3	Perusahaan yang pasif sahamnya dalam transaksi secara berkelanjutan serta mendapatkan <i>suspend</i> dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019	(28)
Jumlah Sampel		14

Sumber: Diolah penulis, 2020.

Pergerakan grafik harga saham tersebut dianalisis menggunakan indikator-indikator teknikal berupa Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator sebagai penentu kapan waktunya beli dan jual untuk melihat return yang didapat selama kurun waktu 2017-2019. Proses input data dibantu program SPSS 21 yang dilakukan via *offline*.

Uji normalitas digunakan untuk tujuan mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan memakai *Shapiro-Wilk*. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan bahwa apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 berarti data penelitian ini berdistribusi normal; sebaliknya apabila nilai *Sig.* lebih kecil dari 0,05 berarti data penelitian ini berdistribusi tidak normal (Santoso, 2015).

Selanjutnya, dilakukan uji ANOVA (*Analysis of Variance*) yang ditujukan untuk menguji rata-rata perbedaan atas *return* saham berdasarkan ketiga indikator yang dianalisis secara bersama-sama. Kriteria keputusan yang digunakan adalah apabila nilai *Sig. F* lebih besar dari 0,05 diartikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga indikator yang dianalisis dalam mengevaluasi *return* saham; sebaliknya, apabila nilai *Sig. F* lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga

indikator yang dianalisis dalam mengevaluasi *return* saham (Suharyadi & Purwanto, 2009).

Terakhir, dilakukan uji *independent sample t-test*. Pengujian ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup data. Secara khusus, uji beda ini digunakan untuk mengetahui perbedaan *return* saham dari penggunaan indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, serta Stochastic Oscillator. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai *Sig. t* lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat perbedaan *return* saham menggunakan ketiga indikator tersebut; sebaliknya, apabila nilai *Sig. t* lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan *return* saham menggunakan ketiga indikator tersebut (Suharyadi & Purwanto, 2009).

HASIL ANALISIS

Perbandingan Hasil *Return* Saham

Pada tahap pertama, dilakukan analisis perbandingan atas nilai-nilai *return* saham yang diperoleh melalui ketiga indikator terkait pergerakan harga saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2017-2019. Data *return* saham yang diperoleh ditunjukkan dalam Tabel 2; dimana BB adalah indikator Bollinger Band, PSAR adalah indikator Parabolic SAR, dan SO adalah indikator Stochastic Oscillator.

Tabel 2. Perbandingan *Return Saham* dari Tiga Indikator Periode 2017-2019

No.	Kode Saham	<i>Return Saham (%)</i>		
		BB	PSAR	SO
1	ASSA	39,81	156,81	137,20
2	BIRD	18,42	82,92	-7,77
3	BULL	33,07	-38,93	44,40
4	EXCL	37,98	12,22	53,28
5	GIAA	10,15	27,71	27,03
6	JSMR	4,96	9,86	15,03
7	MBSS	99,97	44,18	87,31
8	PGAS	49,14	7,04	-28,99
9	POWR	-10,78	-8,30	14,23
10	RAJA	-5,26	35,36	108,90
11	SMDR	1,53	66,29	76,99
12	SOCI	-20,86	18,86	10,38
13	TBIG	0,21	42,76	9,53
14	TLKM	41,21	-25,19	27,89
<i>Return Rata-Rata</i>		21,36	30,83	41,10

Sumber: Data sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh *return* saham yang dihasilkan melalui indikator Bollinger Band dalam pergerakan harga saham di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Data menunjukkan terdapat 11 perusahaan memperoleh *return* saham bernilai positif selama periode 2017 sampai 2019, yaitu ASSA (39,81%), BIRD (18,42%), BULL (33,07%), EXCL (37,98%), GIAA (10,15%), JSMR (4,96%), MBSS (99,97%), PGAS (49,14%), SMDR (1,53%), TBIG (0,21%), dan TLKM (41,21%). Sementara itu, diperoleh tiga perusahaan mengalami *return* saham bernilai negatif selama periode penelitian, yaitu POWR (-10,78%), RAJA (-5,26%), dan SOCI (-20,86%).

Dengan demikian, hasil analisis menggunakan indikator Bollinger Band menunjukkan nilai *return* saham terbesar dicapai oleh MBSS sebesar 99,97%, sementara nilai *return* saham terendah diperoleh SOCI sebesar -20,86 persen. Rata-

rata *return* yang dihasilkan menggunakan indikator ini sebesar 21,36 persen.

Berikutnya, nilai *return* saham yang dihasilkan melalui indikator Parabolic SAR berdasarkan Tabel 2 dalam pergerakan harga saham di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi juga menunjukkan 11 perusahaan mengalami *return* saham bernilai positif namun dengan kode saham yang berbeda. Perusahaan-perusahaan itu adalah ASSA (156,81%), BIRD (82,92%), EXCL (12,22%), GIAA (27,71%), JSMR (9,86%), MBSS (44,18%), PGAS (7,04%), RAJA (35,36%), SMDR (66,29%), SOCI (18,86%), dan TBIG (42,76%). Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang mengalami *return* saham bernilai negatif adalah BULL (-38,93%), POWR (-8,30%), dan TLKM (-25,19%).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan indikator Parabolic SAR terlihat bahwa nilai *return* saham terbesar dicapai oleh ASSA sebesar 156,81%, sementara nilai *return* saham terendah diperoleh BULL sebesar

-38,93 persen. Nilai rata-rata *return* yang dihasilkan menggunakan indikator ini sebesar 30,83 persen.

Indikator ketiga yang diperbandingkan yaitu Stochastic Oscillator memberikan data *return* saham berlandaskan pergerakan harga saham di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama periode 2017-2019. Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan indikator ini terdapat 12 perusahaan yang memperoleh *return* saham yang bernilai positif, yaitu ASSA (137,20%), BULL (44,40%), EXCL (53,28%), GIAA (27,03%), JSMR (15,03%), MBSS (87,31%), POWR (14,23%), RAJA (108,9%), SMDR (76,99%), SOCI (10,38%), TBIG (9,53%), dan TLKM (27,89%). Selain itu, indikator ini menyatakan adanya dua perusahaan yang mengalami *return* saham yang bernilai negatif, yaitu BIRD (-7,77%) serta PGAS (-28,99%).

Dengan demikian, hasil analisis menggunakan indikator Stochastic Oscillator menunjukkan nilai *return* saham terbesar dicapai ASSA sebesar 137,20%, sementara nilai *return* saham terendah diperoleh PGAS sebesar -28,99 persen. Rata-rata *return* yang dihasilkan menggunakan indikator ini sebesar 41,10 persen.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

No	Variabel	Shapiro-Wilk	
		Statistic	Sig.
1	Bollinger Band	0,917	0,201
2	Parabolic SAR	0,922	0,234
3	Stochastic Oscillator	0,947	0,520

Sumber: Data sekunder (diolah), 2020.

Tabel 4. Hasil ANOVA

No	Variabel	F-hitung	Sig. (2-tailed)
1	<i>Return</i> Saham BB, PSAR, SO	0,734	0,486

Sumber: Data sekunder (diolah), 2020.

Hasil Uji Normalitas dan ANOVA

Hasil uji normalitas menggunakan metode *Shapiro-Wilk* ditunjukkan dalam Tabel 3. Hasil pengujian menyatakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* baik untuk indikator Bollinger Band (0,201), indikator Parabolic SAR (0,234) maupun indikator Stochastic Oscillator (0,520) adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua variabel merupakan data berdistribusi normal atau signifikan.

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis ANOVA bahwa *p-value* dari uji F diperoleh sebesar 0,486. Dengan demikian, karena nilai *Sig. F* lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga indikator yang dianalisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi *return* saham perusahaan di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Uji Independent Sample T-test

Pada bagian ditunjukkan hasil analisis perbandingan *return* saham di antara ketiga indikator yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu Bollinger Band, Parabolic SAR, serta Stochastic Oscillator.

Tabel 5. Hasil Uji *Independent Sample t-test*

No	Variabel	t-hitung	Sig.(2-tailed)
1	<i>Return Saham Bollinger – Parabolic</i>	-0,608	0,548
2	<i>Return Saham Bollinger – Stochastic</i>	-1,311	0,201
3	<i>Return Saham Parabolic – Stochastic</i>	-0,567	0,575

Sumber: Data sekunder (diolah), 2020.

Tabel 5 menunjukkan nilai *t-hitung* untuk perbandingan *return* saham antara indikator-indikator Bollinger dan Parabolic sebesar -0,608; antara Bollinger dan Parabolic sebesar -1,311; dan, antara Parabolic dan Stochastic sebesar -0,567. Karena nilai *Sig.t (2-tailed)* untuk ketiga model komparasi itu lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan secara statistik bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga indikator tersebut dalam menghasilkan *return* saham.

Pembahasan

Penelitian ini melakukan perbandingan antara indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator untuk menghasilkan *return* saham. Studi pada 14 sampel perusahaan dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi untuk periode 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga indikator tersebut dalam menghasilkan *return* saham. Karenanya, indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator dinyatakan sama-sama mampu memberi jawaban berkaitan dengan waktu yang terbaik dalam membeli ataupun menjual saham untuk mendapatkan *return* saham yang optimal.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung mengenai penggunaan indikator Bollinger Band, Parabolic SAR serta Stochastic Oscillator. Frankandinata & Cahyadi (2014) menyatakan bahwa indikator Bollinger Bands dapat dipertimbangkan untuk analisis pergerakan harga saham AALI; Marli

& Deccasari (2014) menyatakan bahwa indikator Bollinger Band merupakan indikator volatilitas yang bisa dipakai sebagai indikator *action* untuk mengambil keputusan investasi di dalam transaksi *short time* perdagangan saham; serta, Srichawla & Romprasert (2017) yang menyatakan bahwa indikator Parabolic SAR merupakan indikator konfirmasi yang paling menguntungkan pada saham di Bursa Thailand.

Selain itu, Sulthon *et al.* (2018) menemukan hasil bahwa Parabolic SAR merupakan indikator tambahan untuk mengidentifikasi tren ketika *buy* atau *sell*. Prabatha (2012) menyatakan indikator Stochastic Oscillator secara signifikan bisa memperoleh profit bagi investor pada saham-saham JII; M'ng & Mehralizadeh (2016) yang meneliti mengenai Bollinger Band dan Stochastic Oscillator di pasar berjangka; serta, Prasetyo *et al.* (2019) memperoleh temuan bahwa Stochastic Oscillator bisa digunakan sebagai sinyal untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan syar'i pada saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

Di sisi lain, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang menemukan hasil yang bertolak belakang dengan temuan penelitian ini. Suryawan & Bagiarta (2017) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa indikator Bollinger Band masih belum optimal pada *pair* AUD/USD dan EUR/USD; How *et al.* (2015) memperoleh temuan bahwa indikator Parabolic SAR tidak mampu memprediksi dengan tepat harga. Demikian juga, Suryawan (2016) memperoleh hasil riset

yang menyatakan bahwa indikator Stochastic belum mampu memberikan sinyal tentang keuntungan secara konsisten di *forex*.

Walaupun antara ketiga indikator yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan tidak memiliki perbedaan secara statistik, namun dinilai memiliki perbedaan dalam segi persentase *return* yang dihasilkan. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2, nilai *return* rata-rata untuk indikator Bollinger Band sebesar 21,36%; indikator Parabolic SAR sebesar 30,83%; dan, indikator Stochastic Oscillator sebesar 41,10%. Perbedaan besar kecilnya rata-rata *return* itu didasari dari masing-masing indikator yang dianalisis. Bollinger Band dapat bekerja dengan nilai volatilitasnya (Hafizah et al., 2019). Untuk volatilitas tinggi, maka jarak antara kedua *band* akan melebar. Hal ini terjadi ketika berubah dari kondisi pasar *sideways* menjadi kondisi pasar *trending*. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah terlihat pada jarak kedua *band* yang menyempit, hal ini biasa terjadi ketika ada perubahan dari kondisi pasar *trending* ke kondisi pasar yang *sideways* (Pramudya & Ichsani, 2020).

Parabolic SAR memiliki sifat *Trend Following*, yaitu menginformasikan mengenai *trending*-nya suatu pasar dan mengindikasikan pembalikan suatu harga. Apabila terdapat *candlestick* melampaui titik Parabolic SAR secara berlawanan dengan *trend*, maka posisi yang terbuka untuk segera ditutup (Basrowi et al., 2020). Sementara itu, indikator Stochastic Oscillator berpusat pada oscillator dengan kisaran 0%-100% dan menampilkan dua garis yaitu %K dan %D. Apabila garis %K memotong garis %D keatas dengan rentang 0%-20% mengindikasikan sinyal beli; namun apabila garis %D memotong garis %K ke bawah dengan rentang 80%-100% maka mengindikasikan sinyal untuk keputusan jual (Tobing et al., 2019).

Implikasi dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan bagi investor maupun manajer investasi dalam pengambilan keputusan investasi untuk menganalisa maupun menentukan indikator yang tepat dalam membeli dan menjual suatu saham sehingga meminimalkan resiko serta memaksimalkan return yang ingin diraih.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menggunakan uji *independent sampel t-test* yaitu membandingkan rata-rata dua grup data, didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama periode 2017-2019. Dengan demikian, ketiga indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator dapat dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan jual atau beli atas saham untuk mendapatkan *return* saham yang optimal pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, khususnya di dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.

Penelitian ini terbatas hanya meneliti perbandingan dari masing-masing indikator dari analisis teknikal. Karenanya penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan kombinasi atas metode indikator yang ada ataupun menambah metode indikator lain seperti MACD dan RSI, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dalam menghasilkan *return* saham yang optimal. Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambah *time frame* yang lebih panjang dibandingkan yang dilakukan pada penelitian ini, sehingga penelitian selanjutnya tersebut diekspektasikan memiliki keakurasian yang lebih baik lagi. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat menggunakan jenis-jenis indeks lain yang ada di Bursa Efek Indonesia.

REFERENSI

- Artanti, A. A. (2019). *BEI catat jumlah investor pasar modal meningkat 53%*. Retrieved from <https://www.medcom.id/ekonomi/bursa/ybJVw5ab-2019-bei-catat-jumlah-investor-pasar-modal-meningkat-53>.
- Basrowi, Fauzi, & Utami, P. (2020). Apakah memilih saham daftar efek syariah indonesia dengan analisis teknikal akan menguntungkan? *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 39–59. doi: 10.32507/ajei.v11i1.555.
- Frankandinata, & Cahyadi, Y. (2014). Analisis keakuratan indikator Bollinger Bands terhadap pergerakan harga saham: Studi kasus pada saham PT. Astra Agro Lestari Tbk. *Binus Business Review*, 5(1), 112–122. doi: 10.21512/bbr.v5i1.1201.
- Hafizah, N., Noviani, E., & Perdana, H. (2019). Analisis teknikal saham LQ-45 menggunakan indikator Bollinger Bands. *Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)*, 08(4), 943–950. Retrieved from: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jbmstr/article/view/36653>.
- Hendarto, K. (2005). *Belajar trading: Pahami Trading sebelum anda mulai*. Penerbit Andi.
- How, S., Wendy, & Mardiansyah, R. (2015). Penggunaan alat analisis teknikal Candlestick dan Parabolic Sar dalam perdagangan berjangka komoditas emas: Studi eksperimental. *EJME: Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmd/article/view/8652>.
- M'Ng, J. C. P., & Mehralizadeh, M. (2016). Forecasting east asian indices futures via a novel hybrid of wavelet-PCA denoising and artificial neural network models. *PLoS ONE*, 11(6), 1–29. doi: 10.1371/journal.pone.0156338.
- Marli, & Deccasari, D. D. (2014). Penerapan analisis teknikal dengan metode Bollinger sebagai salah satu indikator dalam transaksi short time perdagangan saham. *Jurnal Dinamika DotCom*, 5(1), 64–79. Retrieved from <http://www.semenindonesiarun.com/index.php?journal=DINAMIKA&page=article&op=view&path%5B%5D=75>.
- Ong, E. (2016). *Technical analysis for mega profit*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prabhata, A. (2012). Efektifitas penggunaan analisis teknikal Stochastic Oscillator dan Moving Average Convergence-Divergence (MACD) pada perdagangan saham-saham Jakarta Islamic Index (JII) di bursa efek Indonesia. *Sinergi*, 13(1), 1–14. doi: 10.20885/sinergi.vol13.iss1.art1.
- Pramudya, R., & Ichsani, S. (2020). Efficiency of technical analysis for the stock trading. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 9(1), 58–67. doi: 10.20525/ijfbs.v9i1.666.
- Prasetyo, P., Nurlaely, & Subagyo, H. (2019). Analisis komparatif penggunaan metode Stochastic, Moving Average dan MACD dalam mendapatkan keuntungan optimal dan syar'i (Study pada Jakarta Islamic Index 2016 – 2018). *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 2(1), 52–68. doi: 10.30737/jimek.v2i1.414.
- Rahardjo, S. (2006). *Kiat membangun aset kekayaan*. PT. Elex Media Komputindo
- Samsul, M. (2006). *Pasar modal & manajemen portofolio*. Erlangga.
- Santoso, S. (2015). *SPSS 20: Pengolahan data statistik di era informasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Srichawla, S., & Romprasert, S. (2017). The effectiveness of confirming indicators: A case study of stocks in Thailand Shivatep. *The Journal of Risk Management and Insurance*, 21(1), 41–60. Retrieved from <https://jrmi.au.edu/index.php/jrmi/article/view/156>.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

- Suharyadi, & Purwanto. (2009). *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern*. Salemba Empat.
- Sulthon, M. L., Prasetyo, A. B., & Somantri, M. (2018). Pendeteksi sinyal jual / beli saham dengan Fuzzy Rule-based Evidential Reasoning dan C-means Clustering. *JNTETI*, 7(3), 287–296. doi: 10.22146/jnteti.v7i3.437.
- Sunariyah. (2006). *Pengantar pengetahuan pasar modal*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Suryani, & Hendryadi. (2016). *Metode riset kuantitatif: Teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi islam*. Pranadamedia Group.
- Suryawan, I K. D. (2016). Analisa pergerakan market dengan kombinasi indikator Stochastic dan Linier Weighted Moving Average. *Journal JOINS Udinus*, 1(2), 92–100. doi: 10.33633/joins.v1i2.1301.
- Suryawan, I K. D., & Bagiarta, I. G. N. N. (2017). Expert advisor dengan strategi Moving Average, RSI dan Bollinger Band. *Jurnal Sistem dan Informatika*, 11(2), 1–9. Retrieved from <https://jsi.stikom-bali.ac.id/index.php/jsi/article/view/106>.
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis investasi dan manajemen portofolio*. BPFE-Yogyakarta.
- Tobing, Y. L. L., Syafrida, I., & Agha, R. Z. (2019). Anomali sinyal Stochastic dan Fibonacci terhadap pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan metode arus dana investor asing. *Account*, 6(1), 992–1001. doi: 10.32722/acc.v6i1.1382.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia

Factors Influencing the Performance of Islamic Mutual Funds in Indonesia and Malaysia

Rifqi Muhammad¹⁾, Imtinani Arifah²⁾, Peni Nugraheni³⁾

^{1,2)}Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

³⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

e-mail korespondensi: rifqimuhammad@uii.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 30 Agustus 2020 Disetujui: 22 Januari 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kinerja operasional, umur reksadana, dan ukuran reksadana, terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. Data yang digunakan berasal dari laporan bulanan reksadana syariah periode 2016-2018, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode regresi data panel. Total jumlah data sebanyak 44 buah dari Indonesia dan 46 buah dari Malaysia. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kinerja operasional dan ukuran reksadana syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana syariah baik di Indonesia maupun di Malaysia. Sementara itu, umur reksadana terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia, namun sebaliknya teridentifikasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja reksadana syariah di Malaysia. Lebih jauh, penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.2556	
<i>Cara Mensitasi :</i> Muhammad, R., Arifah, I., & Nugraheni, P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 154-167. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2556.	
Kata Kunci: Reksadana Syariah, Kinerja Operasional, Umur, Ukuran.	

Article Info	Abstract
Article History : Received: 30 August 2020 Accepted: 22 January 2021 Published: July 2021	<i>The study aims to examine the effect of operational performance, age, and size of mutual fund, on the performance of Islamic mutual funds in Indonesia and Malaysia. The data used collected from the monthly reports of Islamic mutual funds for the period 2016-2018, and then analyzed using panel data regression method. The total number of data was 44 from Indonesia and 46 from Malaysia. The results of statistical tests show that the operational performance and size of Islamic mutual funds have no effect on the performance of Islamic mutual funds both in Indonesia and in Malaysia. Meanwhile, the age of mutual funds is proven to have a significant negative effect on the performance of Islamic mutual funds in Indonesia, but on the contrary it is identified as having a significant positive effect on the performance of Islamic mutual funds in Malaysia. Furthermore, this study did not find any significant differences between the performance of Islamic mutual funds in Indonesia and Malaysia.</i>
DOI Number : 10.33059/jseb.v12i2.2556	
How to cite : Muhammad, R., Arifah, I., & Nugraheni, P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 154-167. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2556.	
Keywords: <i>Islamic Mutual Fund, Operational Performance, Age, Size.</i>	

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia merupakan suatu wadah bagi kegiatan investasi masyarakat yang menginginkan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tersedianya produk investasi yang sesuai syariah di Indonesia tentu menjadi keharusan. Saat ini telah tersedia beberapa produk pada pasar modal syariah Indonesia, diantaranya adalah saham syariah, sukuk dan reksadana syariah.

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 ayat 27 menjelaskan definisi reksadana sebagai wadah yang digunakan dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat pemilik modal yang kemudian dana itu diinvestasikan ke dalam Portofolio Efek oleh pihak Manajer Investasi. Sementara itu, definisi reksadana syariah yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa

keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah bahwa reksadana yang dimaksud di dalam undang-undang tentang pasar modal tersebut adalah yang memiliki proses pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kinerja reksadana syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan menggembirakan, seperti terlihat dari peningkatan Nilai Aset Bersih (NAB) selama 5 tahun terakhir (tahun 2013-2018). Sejak tahun 2013, NAB reksadana syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga tahun 2018 yang mencapai Rp. 34.491,17 miliar. Demikian juga dengan jumlah reksadana syariah pada setiap tahunnya semakin bertambah, dengan jumlah mencapai 224 reksadana syariah pada tahun 2018. Grafik peningkatan jumlah dan NAB reksadana syariah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Sumber: www.ojk.go.id, 2018.

Untuk dapat menarik minat investor dalam berinvestasi di reksadana syariah, tentu produk investasi itu harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kinerja reksadana maupun kinerja reksadana syariah telah disebutkan pada penelitian sebelumnya seperti kinerja operasional, umur reksadana dan ukuran

reksadana (See & Jusoh, 2012; Putri & Haryanto, 2014; Bitomo & Muharam, 2016). See & Jusoh (2012) menemukan bahwa kinerja reksadana dipengaruhi oleh biaya manajemen dan umur, sementara Putri & Haryanto (2014) menyatakan bahwa kinerja operasional berpengaruh negatif terhadap reksadana. Bitomo & Muharam (2016) menyatakan bahwa umur dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana, sementara umur reksadana diidentifikasi tidak berpengaruh.

Beberapa penelitian yang menguji pengaruh antara variabel tertentu dengan kinerja reksadana masih berfokus pada reksadana konvensional. Berdasarkan temuan studi Rahmah (2016), kinerja reksadana konvensional lebih baik daripada kinerja reksadana syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kinerja operasional, umur dan ukuran reksadana terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. Malaysia dipilih karena selain sama-sama negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan produk investasi syariah di negara tersebut juga berkembang dengan pesat. Malaysia merupakan negara pertama yang mendirikan *Islamic Capital Market* di ASEAN sejak tahun 1993. Hasil studi Dewi & Ferdian (2012) menemukan bahwa kinerja reksadana syariah di Malaysia secara umum lebih baik dalam tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan negara lain.

Teori Investasi

Beberapa akademisi telah menjelaskan definisi tentang investasi. Sukirno (1997) menyatakan investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan dari penanam modal ataupun perusahaan untuk membeli barang modal serta perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan melaksanakan proses produksi barang dan jasa yang tersedia dalam

aktivitas perekonomian. Sakinah (2014) menyatakan investasi sebagai bentuk penanaman modal atau uang pada suatu perusahaan ataupun proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat dinyatakan investor melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik yang ditujukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah terus berusaha meningkatkan level partisipasi masyarakat melakukan kegiatan investasi, terutama melalui pasar modal Indonesia.

Meski demikian, pertumbuhan investasi di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 4,1% justru jauh lebih kecil daripada tahun 2017 yang mencapai 10% lebih (Kompas, 2019). Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah karena investasi dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Sementara itu, negara Malaysia juga terus memacu pertumbuhan investasi dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% hingga 4,8% di tahun 2019 (Anadolu Agency, 2019).

Pandangan Islam mengenai Aktivitas Investasi

Islam sangat menganjurkan investasi sebagai sarana bagi manusia untuk memproduksi harta yang dimiliki, dan tidak hanya sekedar disimpan atau ditimbun. Investasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk tidak meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan yang lemah (QS. An-Nisa: 9) sekaligus sebagai bentuk aktivitas muamalah dalam rangka membantu sesama manusia melakukan usaha produktif, terutama bagi mereka yang kurang mampu dari sisi modal (Pardiansyah, 2017). Tetapi kegiatan investasi yang dilakukan tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam mendorong manusia memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat untuk mencapai falah, dan investasi dapat dijadikan salah satu jalan dalam meraih kesejahteraan di dunia. Kegiatan investasi sesuai ajaran Islam tentunya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah dapat dijadikan sarana dalam berinvestasi bagi investor, terutama investor Muslim yang menginginkan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip Islam (Wiyanti, 2013; Sakinah, 2014).

Instrumen keuangan di pasar modal syariah memberi banyak alternatif investasi bagi pihak investor Muslim seperti saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Dengan demikian, investor Muslim memiliki banyak alternatif dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan maupun kemampuannya.

Kinerja Reksadana Syariah

Reksadana syariah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Definisi reksadana syariah menurut fatwa ini adalah “reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*sahid al-mal / Rabb al Mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi”. Maka segala bentuk investasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk investasi dalam bentuk reksadana syariah, sangat dianjurkan bagi investor Muslim untuk tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Ada beberapa jenis reksadana syariah sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, diantaranya adalah reksadana syariah dan reksadana syariah

campuran. Reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) ke dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas. Sementara reksadana syariah campuran adalah jenis reksadana yang berinvestasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap dan atau instrument pasar uang dalam negeri. Manajer Investasi reksadana bisa menyalurkan paling banyak 79% dari NAB untuk salah satu dari instrumen investasi tersebut, dimana ketiga instrument tersebut harus ada dalam portofolio reksadana syariah campuran.

Kinerja reksadana diukur dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari dana tersebut. Menurut Sudarsono (2003), NAB dapat diperoleh dari jumlah aktiva yang dimiliki seperti kas, deposito, saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan efek lainnya, dikurangi dengan kewajiban seperti insentif untuk manajer investasi, bank kustodian, broker ataupun pajak dan efek yang belum dilunasi.

Goel *et al.* (2013) menyatakan bahwa kinerja dari setiap reksadana diukur dengan *Net Asset Value* (NAV). *Net Asset Value* dipengaruhi oleh faktor-faktor dari skema reksadana yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam hal ini, kinerja masa lalu reksadana menjelaskan bagaimana dana itu telah dilakukan di masa lalu dan dapat menjadi rujukan apakah produk itu akan berkinerja positif atau negatif di masa depan.

Pengembangan Hipotesis

Kinerja operasional dapat dilihat dari besarnya biaya operasional reksadana yang dikeluarkan dibandingkan dana kelolaan. Biaya operasional reksadana meliputi biaya manajemen dan biaya administratif. Biaya manajemen merupakan komposisi terbesar dalam pengeluaran biaya operasional, yang

merupakan pengeluaran untuk pengelolaan portofolio seperti jasa konsultasi dan insentif *fund manager*, termasuk biaya penelitian dan analisis yang dilakukan. Tujuannya adalah mendapatkan *return* maksimal dari komposisi portofolio terbaik sehingga dapat menunjang kinerja reksadana. Penelitian yang dilakukan Bitomo & Muharam (2016) menemukan hubungan positif antara kinerja operasional dan kinerja reksadana. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H1a: Kinerja Operasional berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia.

H1b: Kinerja Operasional berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Malaysia.

Umur reksadana menunjukkan lamanya waktu suatu reksadana beroperasi, yang dihitung dari tanggal efektif perdagangan reksadana sampai sekarang. Umur reksadana akan mempengaruhi cara pihak manajemen mengelola portofolio dan penempatan arus kas karena telah memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola reksadana. Moore (2016) menyatakan bahwa rekam jejak atau *track record* kinerja reksadana dapat dilihat dari lamanya reksadana tersebut beroperasi. Penelitian yang dilakukan oleh Bitomo & Muharam (2016) menunjukkan bahwa umur reksadana berpengaruh positif pada kinerja reksadana. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini mengembangkan hipotesis:

H2a: Umur berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia.

H2b: Umur berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Malaysia.

Ukuran reksadana dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Besar kecilnya aset

akan mempengaruhi kinerja reksadana karena perusahaan bisa menjadi lebih fleksibel dalam penyusunan ataupun pengelolaan portofolio investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferreira *et al.* (2013) tentang kinerja reksadana di 19 negara menunjukkan bahwa ukuran reksadana yang besar akan mendorong kinerja reksadana yang lebih baik. Bitomo & Muharam (2016) juga menyatakan bahwa ukuran reksadana memiliki pengaruh positif terhadap kinerja reksadana di Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H3a: Ukuran berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia.

H3b: Ukuran berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana Syariah di Malaysia.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang sama-sama mengembangkan pasar modal syariah. Menurut Bloomberg Asia Pacific (Market Bisnis, 2018), industri reksadana di Indonesia diyakini akan terus berkembang. Investasi di dalam bentuk reksadana menjadi alternatif bagi investor terutama yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang pasar modal. Selain itu, kelebihan reksadana yang lain adalah mudah karena dikelola oleh manajer investasi, harganya yang terjangkau dimana minimum investasi sebesar Rp. 10.000, dan risiko yang lebih kecil karena investasi tersebar pada beberapa efek (OJK, 2019).

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 1997, jumlah reksadana syariah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 terdapat 17 reksadana syariah dengan NAB Rp. 474 miliar, meningkat menjadi 265 produk reksadana syariah per Agustus 2019 dengan NAB mencapai Rp. 50.290,5 milyar atau sebesar 10% dari industri (Warninda, 2019).

Sementara itu, reksadana di Malaysia pada 2018 memiliki kinerja yang buruk karena ekuitas lokal turun akibat ketegangan perdagangan dan kekhawatiran geopolitik global dan lokal. Kepala penelitian Rakuten Trade Sdn Bhd., Kenny Yee (dalam *The Malaysian Reserve*, 2019), mengatakan kinerja yang lemah di seluruh reksadana pada tahun 2018 sejalan dengan penurunan di pasar keuangan. Dikarenakan sebagian besar dana mengikuti indeks lokal dan/atau global, sehingga dana juga mengikuti ketika pasar bergolak, hanya sedikit yang mengelola untuk memulihkan beberapa kerugian, atau bahkan yang mencatat nilai positif sangat kecil untuk tahun ini.

Beberapa penelitian terdahulu mendapat hasil yang berbeda terkait dengan komparasi kinerja reksadana di Indonesia dan Malaysia. Dewi & Ferdian (2012) menyatakan bahwa berdasarkan indeks Sharpe, Treynor, Jensen, *snail trail methodology* dan *market timing*, studi ini menemukan bahwa reksadana syariah Malaysia tampaknya mengungguli reksadana syariah Indonesia, bahkan dalam periode krisis ekonomi global. Sementara penelitian Basuki & Khoiruddin (2018) menunjukkan kinerja reksadana syariah di Indonesia lebih unggul dari Malaysia pada tahun 2014 dan 2016, sementara Malaysia mengungguli Indonesia pada tahun 2015. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, penelitian ini mengembangkan hipotesis:

H4: Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia berbeda dengan Kinerja Reksadana Syariah di Malaysia.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan yang sudah diterbitkan manajer investasi yang memiliki produk reksadana syariah dan reksadana campuran syariah pada tahun 2018, NAB bulanan, tanggal efektif,

dan biaya-biaya. Data tersebut diperoleh dengan cara mengunduh di *website* sumber data dan masing-masing *website* dari reksadana saham.

Penentuan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh reksadana syariah dan reksadana syariah campuran di Indonesia dan Malaysia yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Securities Commission* Malaysia dari tahun 2016-2018. Kedua jenis reksadana ini dipilih karena memiliki karakter risiko yang relatif hampir sama.

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan dua kriteria utama. Kriteria pertama adalah bahwa sampel terpilih merupakan reksadana syariah dan reksadana campuran syariah yang aktif dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan *Securities Commission* selama periode 2016-2018 serta telah menerbitkan laporan keuangannya di periode tersebut. Kriteria kedua adalah bahwa sampel terpilih memiliki beberapa kelengkapan data yang dibutuhkan seperti data NAB bulanan periode Desember 2015-Desember 2018, biaya-biaya yang digunakan, total aktiva bersih, dan tanggal efektif reksadana syariah diperdagangkan.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja Operasional

Kinerja operasional suatu organisasi dapat dilihat dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional dari reksadana (Putri & Haryanto, 2014). Kinerja operasional dihitung dari biaya operasional reksadana dibagi dengan total aset yang dimiliki, dimana nilainya terdapat di laporan keuangan reksadana. Data kinerja operasional diperoleh dari laporan keuangan masing-masing reksadana. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Operasional} = \frac{TB_t}{AB_t}$$

dimana TB_t adalah total biaya reksadana i pada tahun t ; dan AB_t adalah aktiva bersih reksadana i pada tahun t .

Umur

Umur Reksadana menunjukkan berapa lama reksadana tersebut telah diperdagangkan yang dihitung semenjak tanggal efektif diperdagangkan (Akbarini, 2004). Semakin lama umur reksadana menunjukkan bahwa manajer investasi sudah memiliki pengalaman lebih banyak dalam mengelola portofolio, sehingga kinerjanya juga lebih baik. Manajer yang berpengalaman akan lebih efisien dalam mengelola dan menganalisis informasi (Ferreira *et al.*, 2013). Umur reksadana didapatkan dari pengurangan periode penelitian terhadap tanggal efektif reksadana diperdagangkan, lalu diubah dalam bentuk Ln . Umur reksadana dapat diformulasikan:

$$\text{Umur} = Ln (\text{periode penelitian} - \text{tanggal efektif reksadana})$$

Ukuran

Ukuran reksadana direpresentasikan dari jumlah aset yang dikelola. Penelitian ini menggunakan *Total Net Asset* (TNA) untuk mengukur ukuran reksadana (Gruber, 1996). *Total Net Asset* (TNA) reksadana dihitung dari total aset dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki reksadana dan dikonversi ke dalam bentuk Ln . Formula perhitungan yaitu:

$$\text{Ukuran} = Ln (\text{Total Net Asset})$$

Kinerja Reksadana Syariah

Kinerja reksadana syariah diukur dari jumlah *return* yang diberikan kepada investor yang diperoleh atas investasi, yaitu berupa nilai aktiva bersih (NAB). Penelitian ini

menggunakan metode Sharpe (1996) untuk mengukur kinerja, dengan rumus:

$$SRD = \frac{Rp - Rf}{\sigma p}$$

dimana SRD adalah nilai *Sharpe Ratio*; Rp adalah rata-rata *return* reksadana; Rf adalah rata-rata *return* investasi bebas risiko; dan, σp adalah standar deviasi.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data *time series* dan *cross section* sehingga analisis menggunakan regresi data panel dengan *software* Eviews 10. Menurut Widarjono (2009 dalam Basuki dan Yuliadi, 2015:165), regresi data panel memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu memiliki *degree of freedom* yang lebih besar, serta mengurangi masalah ketika terjadi penghilangan variabel (*omitted-variable*) karena data yang tersedia lebih banyak.

Pemilihan kesesuaian model dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan dengan tiga cara, yaitu: (1) menggunakan Uji Chow dengan cara memilih antara *common effect models* atau *fixed effect models*; (2) Uji *Lagrange-Multiplier* (LM) untuk memilih antara *common effect models* dengan *random effect models*; dan, (3) Uji Hausman untuk memilih antara *fixed effect models* dengan *random effect models*. Dalam persamaan model regresi data panel bisa dirumuskan dalam model berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Penelitian ini melakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji *R-squared* memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1, karena semakin tinggi nilai yang dimiliki maka hubungan antara variabel independent (bebas) dengan

variabel dependent (terikat) semakin erat. Kondisi ini menunjukkan variabel independen memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005).

Uji *F* memiliki fungsi mengidentifikasi bagaimana pengaruh dari seluruh variabel independent yang ada dalam model ini secara simultan, sementara uji *t* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dari masing-masing variabel independen atas variabel dependen. Jika tingkat signifikan dari nilai *F* ataupun *t* lebih kecil dari nilai *alpha* sebesar 5%; maka dinyatakan hipotesis diterima. Penelitian ini juga menggunakan uji Mann-Whitney untuk menilai apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah antara di Indonesia dan Malaysia berdasarkan indeks Sharpe.

HASIL ANALISIS

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis data kinerja operasional, umur, dan ukuran atas kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode 2016-2018. Berdasarkan kriteria kelengkapan, diperoleh data sebanyak 44 buah untuk reksadana syariah di Indonesia dan 46 buah untuk reksadana syariah di Malaysia.

Hasil analisis awal mengidentifikasi bahwa model dari hasil regresi terbaik untuk Indonesia adalah *Random Effect Models* (Tabel 1), sementara model dari hasil regresi terbaik untuk Malaysia adalah *Fixed Effect Models* (Tabel 2).

Tabel 1. Hasil Estimasi *Random Effect* Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.053959	3.697403	0.555514	0.5816
KINERJA_OPERASI	2.583244	14.17891	0.182189	0.8564
UMUR	-1.486043	0.459857	-3.231536	0.0025
UKURAN	0.396633	0.210858	1.881039	0.0673*
R-squared	0.241996			
Adjusted R-squared	0.185146			
F-statistic	4.25673			
Prob (F-statistic)	0.010611			

Keterangan: *Signifikan pada derajat $\alpha = 10\%$.

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.

Tabel 2. Hasil Estimasi *Fixed Effect* Malaysia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-66.55489	15.65445	-4.251499	0.0004
KINERJA_OPERASI	-0.000887	0.017409	-0.050927	0.9599
UMUR	7.697197	1.520443	5.062469	0.0001
UKURAN	-0.058079	0.533163	-0.108932	0.9143
R-squared	0.77479			
Adjusted R-squared	0.493278			
F-statistic	2.752244			
Prob (F-statistic)	0.011995			

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.

Tabel 3. Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis

Variabel	Indonesia		Malaysia	
	Hasil	Pembuktian	Hasil	Pembuktian
Kinerja Operasional (X_1)	Tidak berpengaruh	H1a ditolak	Tidak berpengaruh	H1b ditolak
Umur (X_2)	Berpengaruh negatif	H2a ditolak	Berpengaruh positif	H2b diterima
Ukuran (X_3)	Berpengaruh Positif*	H3a diterima	Tidak berpengaruh	H3b ditolak

Keterangan: *Signifikan pada derajat $\alpha = 10\%$.

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil nilai koefisien determinasi atau R^2 atas regresi data di Indonesia yaitu 0,241996; yang menunjukkan kinerja reksadana syariah di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini sebesar 24,20%, dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan pada Tabel 2 menyatakan hasil nilai koefisien determinasi atau R^2 atas regresi data di Malaysia sebesar 0,774790; yang menunjukkan kinerja reksadana syariah di Malaysia bisa dijelaskan variabel-variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini sebesar 24,20%, sementara selebihnya dijelaskan oleh variabel lain.

Nilai *F-statistic* yang terdapat pada Tabel 1 diperoleh sebesar 4.256730 dengan nilai probabilitas sebesar $0,010611 < 0,05$ (α); sementara pada Tabel 2 diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,011995 < 0,05$. Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja Reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia.

Uji *t-statistic* menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu melalui perbandingan nilai probabilitas *t* dengan nilai α (5% dan 10%) seperti ditunjukkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Hasil pengujian

hipotesis berdasarkan uji *t* di Indonesia dan Malaysia dirangkum dalam Tabel 3.

Mula-mula dibahas tentang pembuktian hipotesis untuk reksadana syariah di Indonesia, seperti ditunjukkan dalam Tabel 3. Hasil uji *t* pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja operasional (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,182189 dengan nilai probabilitas $0,8564 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Artinya secara statistik, kinerja operasional terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia; sehingga H1a ditolak. Umur (X_2) menunjukkan nilai koefisien sebesar -3,231536 dengan nilai probabilitas $0,0025 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$); yang berarti umur reksadana terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia, sehingga H2a ditolak. Ukuran (X_3) menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,881039 dengan nilai probabilitas $0,0673 < 0,10$ ($\alpha = 10\%$); yang membuktikan bahwa ukuran reksadana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia, sehingga H3a diterima.

Selanjutnya dibahas tentang pembuktian hipotesis atas reksadana syariah di Malaysia, seperti ditunjukkan dalam Tabel 3. Hasil uji *t* pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja operasional (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar -0,050927 dengan nilai probabilitas $0,9599 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$); yang berarti kinerja operasional terbukti tidak mempengaruhi

kinerja reksadana syariah di Malaysia, sehingga H1b ditolak. Nilai koefisien untuk umur menunjukkan nilai sebesar 5,062469 dengan nilai probabilitas $0,0001 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$); yang membuktikan umur reksadana secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana syariah di Malaysia, sehingga H2b diterima. Ukuran reksadana memiliki nilai koefisien -0,108932 dengan nilai probabilitas $0,9143 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$); yang menyatakan ukuran reksadana terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana syariah di Malaysia, sehingga H3b ditolak.

Tabel 4. Hasil Uji Mann-Whitney

	Negara	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kinerja_Reksadana	Indonesia	44	46.91	2064
	Malaysia	46	44.15	2031
	Total	90		

Kinerja_Reksadana	
Mann-Whitney	950
Wilcoxon W	2031
Z	-0.5
Asymp.Sig.(2-tailed)	0.617

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.

Pembahasan

Pengaruh Kinerja Operasional terhadap Kinerja Reksadana Syariah

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kinerja operasional terbukti tidak mempengaruhi kinerja reksadana syariah, baik di Indonesia maupun Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah biaya yang digunakan pada manajer investasi yang mengeluarkan produk reksadana syariah, tidak dapat mempengaruhi kinerja reksadana syariah. Hasil ini mendukung penelitian Harjono *et al.* (2017) yang menemukan bahwa kinerja operasional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana.

Hasil Uji Mann-Whitney

Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan indeks Sharpe. Hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 5.

Berdasarkan output analisis data dalam Tabel 5 diketahui bahwa nilai *asympt.Sig* (2-tailed) sebesar $0,617 > 0,05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia.

Menurut Harjono *et al.* (2017), strategi pengelolaan dana merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer investasi. Beberapa macam pengeluaran seperti biaya pemasaran, biaya manajemen, biaya operasi atau biaya administrasi, harus diperhitungkan dengan seksama mengikuti strategi apa yang diterapkan oleh manajer investasi. Oleh sebab itu, kinerja operasional tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana syariah, karena jumlah pengeluaran biaya hanya mengikuti strategi yang diterapkan manajer investasi. Dengan demikian, kinerja reksadana syariah tidak dipengaruhi oleh jumlah biaya yang dikeluarkan, namun dipengaruhi strategi apa yang digunakan oleh manajer investasi.

Pengaruh Umur Reksadana terhadap Kinerja Reksadana Syariah

Pengujian statistik menunjukkan bahwa umur reksadana syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja reksadana syariah. Hal ini berarti semakin lama umur reksadana syariah, maka semakin menurun kinerjanya. Hal ini bisa terjadi ketika manajer investasi gagal menemukan portofolio yang memberikan imbal hasil yang optimal, sementara reksadana yang memiliki umur yang muda memberikan kinerja yang lebih baik agar terus mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja reksadana. Penelitian ini tidak sejalan dengan studi Moore (2016) yang menemukan bahwa umur tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja reksadana syariah, dimana hal ini berarti walaupun semakin tua umur dari reksadana syariah maka tidak mempengaruhi kinerja reksadana tersebut.

Sebaliknya hasil pengujian hipotesis pada Malaysia menunjukkan bahwa umur reksadana syariah terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana syariah. Hal ini berarti reksadana syariah yang memiliki umur yang lama memiliki kinerja reksadana syariah yang lebih baik. Hasil penelitian ini memperluas temuan penelitian Bitomo & Muharam (2016) yang menemukan bahwa umur reksadana memiliki pengaruh atas kinerja reksadana.

Pengaruh Ukuran Reksadana terhadap Kinerja Reksadana Syariah

Pengujian atas hipotesis membuktikan bahwa ukuran reksadana syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia, sementara di Malaysia terbukti tidak berpengaruh. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat kondisi dimana besar kecilnya aset akan mempengaruhi diversifikasi aset sehingga bisa mempengaruhi kinerja reksadana syariah.

Sebaliknya di Malaysia, besar kecilnya aset yang dimiliki reksadana syariah tidak mempengaruhi perubahan kinerja reksadana syariah. Hasil penelitian ini mendukung riset Droms & Walker (1996) yang menemukan bahwa ukuran reksadana tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana. Hal ini berarti walaupun semakin besar aset yang dimiliki manajer investasi yang mengeluarkan produk reksadana syariah maka dipandang tidak mempengaruhi kinerja reksadana syariah tersebut. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Otten & Bams (2002) yang menemukan bahwa ukuran mempunyai pengaruh terhadap kinerja reksadana.

Perbedaan Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia

Pengujian yang dilakukan atas hipotesis keempat tidak memperoleh bukti adanya perbedaan kinerja reksadana syariah antara di Indonesia dan Malaysia. Hasil ini berbeda dengan temuan studi Basuki & Khoiruddin (2018), yang menunjukkan adanya kinerja yang berbeda antara reksadana syariah di Indonesia dengan Malaysia.

Tidak ditemukannya perbedaan kinerja reksadana syariah antara Indonesia dan Malaysia dimungkinkan karena manajer investasi Indonesia dan Malaysia mempunyai preferensi yang sama dalam pemilihan saham untuk menyusun portofolio reksadananya. Penelitian yang pernah dilakukan Covrig (2016) menyatakan bahwa para manajer investasi secara umum memiliki preferensi yang serupa untuk memilih saham yang memberikan kinerja yang bagus.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kinerja operasional, umur dan ukuran reksadana terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil

analisis menunjukkan kinerja operasional dan ukuran reksadana syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil analisis berikutnya menemukan umur reksadana memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia, sebaliknya umur reksadana disimpulkan berpengaruh positif signifikan atas kinerja reksadana syariah di Malaysia. Penelitian ini juga menemukan tidak ada perbedaan antara kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu periode penelitian yang singkat dan variabel yang terbatas. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi kinerja reksadana syariah, seperti *market timing ability* dan *fund cash flow*. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan periode penelitian yang lebih lama ataupun menggunakan pengukuran kinerja reksadana dengan metode yang lain, seperti metode Treynor dan metode Jensen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini telah dipresentasikan pada *Conference on Islamic Management, Accounting and Economics (CIMAIE) Volume 2 Tahun 2019* yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer CIMAIE atas usulan perbaikan pada artikel ini.

REFERENSI

- Akbarini, M. D. (2004). Spesialisasi manajer investasi terhadap kinerja reksadana: Penelitian empiris periode tahun 1999-2003. *Thesis (unpublished)*. Magister Manajemen Universitas Indonesia, Depok. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-108318.pdf>.
- Anadolu Agency. (2019). *Ekonomi Malaysia diprediksi tumbuh antara 4,7% hingga 4,8%*. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/id/regional/ekonomi-malaysia-diprediksi-tumbuh-antara-4-7-hingga-4-8-/1432448>.
- Basuki, A. T. & Yuliadi, I. (2015). *Electronic data processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Retrieved from [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2054/Buku EDP new.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2054/Buku%20EDP%20new.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Basuki, N., & Khoiruddin, M. (2018). Comparative performance Islamic shares mutual funds between Indonesia and Malaysia. *EKUILIBRIUM: Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*, 13(1), 26–44. doi : 10.24269/ekuilibrium.v13i1.918.
- Bitomo, H., & Muharam, H. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksa dana di Indonesia (Studi empiris pada reksa dana konvensional di Indonesia periode 2012-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(2), 1–14. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/13849>.
- Covrig, V. (2016). Do domestic and foreign fund managers have similar preferences for stock characteristics? A cross-country analysis. *Journal of International Business Studies*, 37(3), 407–429. doi: 10.2139/ssrn.275913.
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2012). Evaluating performance of Islamic mutual funds in Indonesia and Malaysia. *Journal of Applied Economics and Business Research*, 2(1), 11–33. Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/EVALUATING-PERFORMANCE-OF-ISLAMIC-MUTUAL-FUNDS-IN-Dewi-Ferdian/003747641e7ad30e511a114b495244223a95f8b3>.
- Droms, W. G., & Walker, D. A. (1996). Mutual fund investment performance. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 36(3), 347–363. doi: 10.1016/S1062-9769(96)90020-4.

- DSN MUI. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN- MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah*. Retrieved from <https://dsnemui.or.id>.
- Ferreira, M. A., Keswani, A., Miguel, A. F., & Ramos, S. B. (2013). The determinants of mutual fund performance: A cross-country study. *Review of Finance*, 17(2), 483-525. doi: 10.1093/rof/rfs013.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Goel, S., Mani, M., & Sharma, R. (2012). A review of performance indicators of mutual funds. *Researchers World: Journal of Arts, Science & Commerce*, 3(4), 100–107. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325115723_A_Review_of_Performance_Indicators_of_Mutual_Funds.
- Gruber, M. J. (1996). Another puzzle: The growth in actively managed mutual funds. *Journal of Finance*, 51(3), 783–810. doi: 10.1111/j.1540-6261.1996.tb02707.x.
- Harjono, T. H., Cicilia, E. S., & Prabowo, F. X. A. J. W. (2017). Biaya operasional reksadana sebagai intervening pengaruh karakteristik reksadana terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 6(2), 72-84. Retrieved from <http://journal.wima.ac.id/index.php/KAMMA/article/view/1776>.
- Kompas. (2019). *BKPM: Realisasi investasi tahun 2018 cukup mengecewakan*. Retrieved March 5, 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/06/124526126/bkpm-realisasi-investasi-tahun-2018-cukup-mengecewakan>.
- Market Bisnis. (2018). *Bloomberg Asia Pacific: Potensi pertumbuhan reksa dana di Indonesia masih besar*. Retrieved from <https://market.bisnis.com/read/20180809/92/826263/bloomberg-asia-pacific-potensi-pertumbuhan-reksa-dana-di-indonesia-masih-besar>.
- Moore, O. (2016). *Mutual fund age, performance, and the optimal track record March 7, 2016*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/780b/c268d44dcb2f9cc1d868aebbe5aebae40a0.pdf>.
- OJK. (1995). *Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>.
- OJK. (2019). *Buku 8 - Industri jasa keuangan syariah, seri literasi keuangan untuk perguruan tinggi*. Retrieved from www.ojk.go.id.
- Otten, R., & Bams, D. (2002). European mutual fund performance. *European Financial Management*, 8(1), 75–101. doi: 10.1111/1468-036X.00177.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: Pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. doi : 10.21580/economica.2017.8.2.1920.
- Putri, C. H. M., & Haryanto, A. M. (2014). Analisis pengaruh market timing ability, stock selection skill, expense ratio dan tingkat risiko terhadap kinerja reksa dana saham (Studi pada reksa dana saham jenis KIK periode 2009-2013). *Diponegoro Journal of Management*, 3(4), 1-10. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/12917>.
- Rahmah, A. (2016). Analisis perbandingan kinerja reksa dana syariah dan kinerja reksa dana konvensional dengan metode Sharpe, Treynor dan Jensen. *Analytica Islamica*, 5(1), 20–40. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/478>.
- Sakinah, S. (2014). Investasi dalam Islam. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 248–262. doi: 10.19105/iqtishadia.v1i2.483.
- See, Y. P., & Jusoh, R. (2012). Fund characteristics and fund performance: Evidence of Malaysian mutual funds. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(9), 31–43.

- <https://www.hilarispublisher.com/abstract/fund-characteristics-and-fund-performance-evidence-of-malaysian-mutual-funds-19454.html>.
- Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138. doi: 10.1086/294846.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Sukirno, S. (1997). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (2nd ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- The Malaysian Reserve. (2019). *Better outcome expected for unit trust funds this year*. Retrieved from <https://themalaysianreserve.com/2019/01/18/better-outcome-expected-for-unit-trust-funds-this-year/>.
- Warninda. (2019). *Perkembangan reksadana syariah di Indonesia tahun 2019*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com>.
- Wiyanti, D. (2013). Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 234-254. doi: 10.20885/iustum.vol20.iss2.art4.



Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Kurs terhadap Harga Beras di Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Intervening

The Effects of Money Supply and Exchange Rate on Rice Prices in Indonesia with Inflation as Intervening Variable

Muhammad Syariful Anam¹⁾, Dian Luthvita Nadila²⁾, Iskandar Iskandar³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Kota Salatiga

e-mail korespondensi: syarifulanam2700@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 19 Juni 2020 Disetujui: 06 Februari 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar dan kurs terhadap harga beras dengan inflasi sebagai variabel intervening. Data data sekunder bersifat <i>time series</i> periode 2015-2019 dari BPS dan BI, dan dianalisis menggunakan model analisis jalur yang merupakan perluasan dari regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, sementara kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Temuan yang lain adalah jumlah uang beredar diidentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga beras, kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras, dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga beras. Temuan ketiga bahwa inflasi sebagai variabel intervening hanya memediasi jumlah uang beredar terhadap harga beras.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.2429	
<i>Cara Mensitasi :</i> Anam, M. S., Nadila, D. L., & Iskandar, I. (2021). Pengaruh jumlah uang beredar dan kurs terhadap harga beras di Indonesia dengan inflasi sebagai variabel intervening. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 168-183. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2429.	
	Kata Kunci: Jumlah Uang Beredar, Kurs, Harga Beras, Inflasi.

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 19 June 2020 Accepted: 06 February 2021 Published: July 2021	<i>The study aims to determine the effect of the money supply and exchange rates on rice prices with inflation as an intervening variable. Secondary data is time series 2015-2019 from BPS and BI, and is analyzed using a path analysis model which is an extension of multiple linear regression. The results showed that the money supply had a negative and significant effect on inflation, while the exchange rate had a positive and insignificant effect on inflation. Another finding is that the money supply has a positive and significant effect on rice prices, the exchange rate has a negative and insignificant effect on rice prices, and inflation has a negative and significant effect on rice prices. The third finding is that inflation as an intervening variable only mediates the money supply to the price of rice.</i>
<i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.2429	
<i>How to cite :</i> Anam, M. S., Nadila, D. L., & Iskandar, I. (2021). Pengaruh jumlah uang beredar dan kurs terhadap harga beras di Indonesia dengan inflasi sebagai variabel intervening. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 168-183. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2429.	
	Keywords: Money Supply, Exchange Rate, Rice Prices, Inflation.

PENDAHULUAN

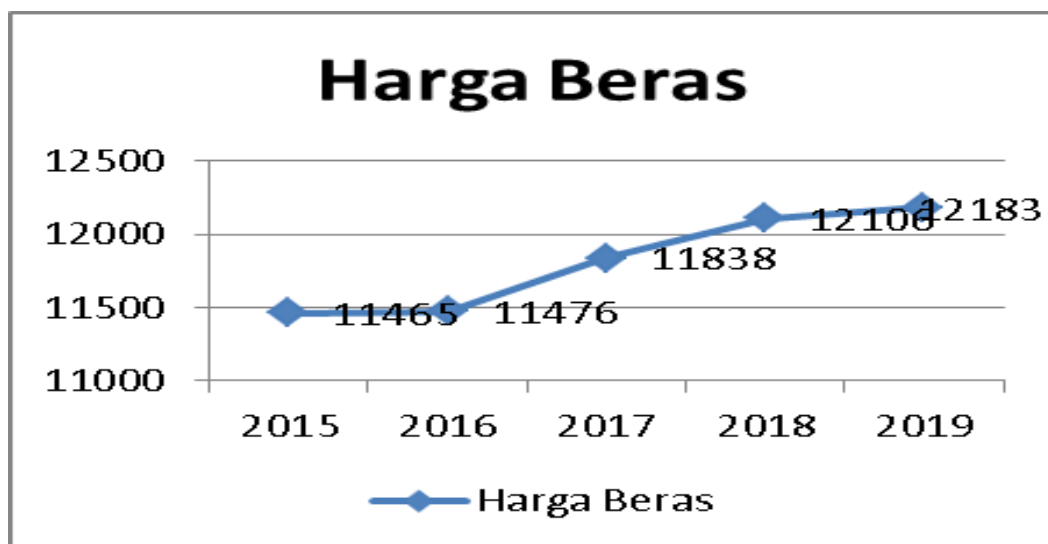
Negara dengan tingkat konsumsi beras dalam jumlah besar adalah Indonesia, dimana sebagian besar masyarakatnya mengonsumsi beras pada setiap harinya sebagai sumber karbohidrat utama. Indonesia dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia merupakan salah satu aspek tingginya tingkat permintaan terhadap bahan pangan terutama beras (Rahmanta & Maryunianta, 2020). Tingkat konsumsi rata-rata masyarakat atas beras berdasarkan pengamatan Kementerian Perdagangan yaitu antara 130-140kg/orang setiap tahun. Konsumsi beras di Indonesia bukan hanya terfokus pada kebutuhan rumah tangga, namun juga digunakan sebagai bahan baku industri seperti tepung beras atau bahan makanan lainnya (Namira *et al.*, 2017). Tingginya tingkat permintaan terhadap komoditi beras mengharuskan pemerintah untuk bisa menyeimbangkan penawaran beras yang tersedia di pasar.

Produksi beras di Indonesia mengalami peningkatan yang tidak signifikan setiap tahunnya, sehingga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat skala nasional yang mencapai 237 juta jiwa dengan persentase tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Produksi beras Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 31,31 juta ton di tahun tersebut dimana pada tahun sebelumnya berhasil memproduksi sebanyak 33,94 juta ton, padahal tingkat cadangan beras yang harus dimiliki negara di Perum BULOG tercatat rata-rata antara 750-1.25 juta ton. Ketersediaan beras yang tidak memadai itulah mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan impor beras untuk menutup kekurangan cadangan beras di Indonesia.

Kegiatan pemenuhan penawaran atas permintaan beras di pasar menimbulkan berbagai persoalan dimana salah satunya

adalah harga beras, terlebih hampir sebagian besar pemenuhan ketersediaan beras negara diperoleh dari kegiatan impor. Harga beras menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah yang termaktub dalam kebijakan pangan negara. Analisis kebijakan pangan mempunyai peran utama dalam merangkai suatu program yang menghubungkan antara masalah lingkungan mikro dan makro dengan tujuan untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Instrumen kebijakan harga yang pernah ditetapkan oleh pemerintah adalah dengan penetapan harga dasar gabah (HDG), dimana kebijakan tersebut mampu memberikan jaminan harga wajar terhadap petani sehingga dapat meningkatkan produksi dan juga memberikan perlindungan harga beli untuk konsumen atau masyarakat. Namun karena kebijakan harga dasar gabah (HDG) dianggap tidak efektif seiring peningkatan volume impor beras, maka pemerintah mulai mengganti kebijakan dengan model penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang merupakan transisi menuju pelepasan harga gabah ke pasar (Saputra *et al.*, 2014).

Pada periode tahun 2015-2019 tingkat harga beras di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perkembangan harga beras di Indonesia periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan gambar tersebut, perkembangan harga beras di Indonesia pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan dimana tercatat di tahun 2015 harga beras sebesar Rp. 11.465,- kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.476,- pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 harga beras mengalami kenaikan signifikan yaitu mencapai angka Rp. 11.838,-. Harga beras pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan mencapai Rp. 12.106,- dan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 di level Rp. 12.183,-.



Gambar 1. Tren Harga Beras di Indonesia Periode 2015 - 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Karenanya, berdasarkan Gambar 1, dapat dinyatakan bahwa selama periode 2015-2019 diidentifikasi harga beras tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya; dimana pada tahun 2015 berada pada angka Rp. 11.465,- mencapai level harga Rp. 12.183,- di tahun 2019. Secara kuantitas, grafik harga beras di Indonesia dari tahun ke tahun tersebut bergerak semakin ke atas.

Salah satu faktor yang dinilai dapat mempengaruhi harga beras adalah jumlah uang yang beredar. Pada teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Ricardo bahwa semakin banyak jumlah uang beredar mengakibatkan penurunan nilai mata uang itu sendiri. Kondisi tersebut terjadi apabila jumlah uang yang beredar bertambah namun barang yang tersedia atau ditawarkan tetap jumlahnya, sehingga mengakibatkan tingkat permintaan masyarakat juga mengalami peningkatan diikuti dengan peningkatan harga barang (Nopirin, 2000).

Pasokan beras nasional Indonesia terbanyak adalah berasal dari kegiatan impor. Oleh karenanya, faktor lain yang bisa memicu naiknya harga beras adalah kurs rupiah terhadap dollar. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata

uang negara lain (Eiteman, 2010; Adhawiyah *et al.*, 2018). Kegiatan impor merupakan satu bentuk perdagangan internasional, sehingga mata uang yang digunakan dengan mata uang asing (dollar) sebagai alat pembayaran. Ketika nilai dari mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang dolar maka akan terjadi kenaikan harga beli barang impor yang kemudian akan berpengaruh terhadap harga jual barang di pasar domestik.

Kenaikan atau penurunan harga di berbagai komoditi pangan, salah satunya beras juga bisa dipengaruhi karena terjadinya inflasi pada perekonomian negara. Salah satu sebab terjadinya inflasi adalah depresiasi nilai mata uang atau kurs terhadap mata uang internasional. Lonjakan angka inflasi juga memberi pengaruh buruk terhadap stabilitas perekonomian (Perlambang, 2012). Indonesia pernah mengalami hiperinflasi mencapai $\pm 600\%$ pada tahun 1965 tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian di tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, Indonesia kembali mengalami inflasi tinggi yaitu mencapai $\pm 77\%$; akibatnya masyarakat ikut merasakan dampak negatif dari tingginya inflasi tersebut. Peningkatan laju inflasi yang tinggi tahun 1998 disebabkan oleh pelemahan

nilai tukar rupiah (depresiasi). Oleh karena itu, laju inflasi di Indonesia harus tetap dapat dikendalikan sebaik mungkin supaya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat tidak mengalami penurunan.

Usaha untuk membuat laju inflasi bertahan di angka yang rendah dapat dengan penekanan harga melalui penekanan jumlah uang yang beredar, sebagai contoh dengan penahanan pemberian kredit atau menaikkan suku bunga pinjaman (Perlambang, 2012). Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga harga komoditas pangan agar tidak melambung, diperlukan peningkatan pengendalian pada berbagai sektor yang dipandang menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Saputra *et al.*, 2014). Berdasarkan pemikiran ini, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, kurs terhadap harga beras di Indonesia pada periode 2015-2019 dengan inflasi sebagai variabel intervening.

Jumlah Uang Beredar dan Inflasi

Uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli baik barang, jasa, maupun utang. Teori Kuantitas memaparkan penyebab inflasi yaitu penambahan jumlah uang beredar serta ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Ketika bank sentral tidak menambahkan volume uang yang beredar, kenaikan harga terjadi hanya untuk sementara waktu. Dengan kata lain, inflasi akan berhenti dengan sendirinya (Rahmawati *et al.*, 2017).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jumlah uang beredar mempunyai pengaruh signifikan terhadap angka inflasi (Maune *et al.*, 2020; Jumhur *et al.*, 2018; Mbongo *et al.*, 2014). Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka dalam penelitian ini dimunculkan hipotesis yang pertama:

H1: Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 2015-2019.

Kurs dan Inflasi

Kurs merupakan perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang milik negara lain (Mahendra, 2016). Keseimbangan nilai mata uang suatu negara dapat tercermin dari tingkat permintaan dan penawaran terhadap nilai tukar itu sendiri. Tingkat harga berperan dalam aktivitas kurs karena berfungsi sebagai penyeimbang antara jumlah uang beredar dengan jumlah permintaan uang. Ketika Bank Sentral menambahkan jumlah uang yang beredar maka akan menyebabkan tingkat harga juga meningkat, dan hal tersebut berdampak pada depresiasi mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

Penelitian yang dilakukan Rahadyan & Lubis (2018), Ningsih & Kristiyanti (2018), serta Larasati & Amri (2017), memperoleh hasil bahwa kurs mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dimunculkan hipotesis yang kedua:

H2: Kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 2015-2019.

Harga Beras dan Jumlah Uang Beredar

Level harga beras memiliki keterkaitan dengan peredaran jumlah mata uang. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar dibandingkan persediaan barang yang ada dalam pasar, mengakibatkan terjadinya kelebihan uang oleh masyarakat yang diiringi dengan meningkatnya permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Apabila jumlah permintaan tidak diseimbangkan dengan jumlah persediaan barang yang ada di pasar, maka hal ini akan mengakibatkan peningkatan harga pada suatu barang. Penawaran uang kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaannya. Ketika uang

yang ditawarkan lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaannya maka akan memicu terjadinya kenaikan harga suatu komoditi, salah satunya adalah beras yang merupakan komoditas pangan utama di Indonesia.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Browne & Cronin (2010) serta Faris (2016) tentang harga komoditas domestik menghasilkan temuan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah uang beredar (JUB) atas perubahan harga dari komoditas domestik. Berdasarkan argumen-argumen itu maka dimunculkan hipotesis ketiga:

H3: Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap harga beras di Indonesia periode 2015-2019.

Harga Beras dan Kurs

Tingkat harga beras juga dipandang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar sebagai mata uang dunia. Mengingat sebagian besar pasokan beras Indonesia didapatkan melalui kegiatan impor dikarenakan belum mampu terpenuhinya produksi beras dalam negeri. Pada saat nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami depresiasi atau nilainya melemah maka menyebabkan biaya impor barang ke dalam negeri lebih mahal, yang kemudian berimbas pada kenaikan harga barang di pasar. Diperlukan peran Bank Sentral untuk melakukan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar rupiah melalui penerapan kebijakan moneter yang tepat dan konsisten. Kestabilan dan peningkatan nilai tukar rupiah atas dolar tentunya berpengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat dikarenakan perekonomian berjalan dengan baik termasuk tingkat harga pada berbagai komoditas.

Studi yang dilakukan oleh Malian *et al.* (2004) serta Suarsih *et al.* (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara

kurs atau nilai tukar terhadap harga beras di pasar domestik. Rezitis (2015) serta Gilbert (2010) dalam penelitian mereka mengenai harga komoditas pertanian memperoleh temuan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara nilai tukar atau kurs atas perubahan harga komoditas pertanian. Berdasarkan hasil atau temuan penelitian terdahulu itu maka dimunculkan hipotesis keempat:

H4: Kurs berpengaruh signifikan terhadap harga beras di Indonesia periode 2015-2019.

Harga Beras dan Inflasi

Depresiasi mata uang yang ekstrim dapat memicu terjadinya krisis keuangan pada suatu negara dengan ditandainya kenaikan angka inflasi (Putra, 2017). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan perekonomian utamanya pada aktifitas produksi, ekspor, serta tingkat impor yang mengalami penurunan tingkat efisiensi sehingga berikutnya menyebabkan barang-barang domestik mengalami kenaikan harga karena penawaran barang di pasar.

Penelitian yang dilakukan Muljawan & Alibaba (2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara inflasi terhadap harga beras. Berdasarkan argumen itu maka dimunculkan hipotesis kelima:

H5: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga beras di Indonesia periode 2015-2019.

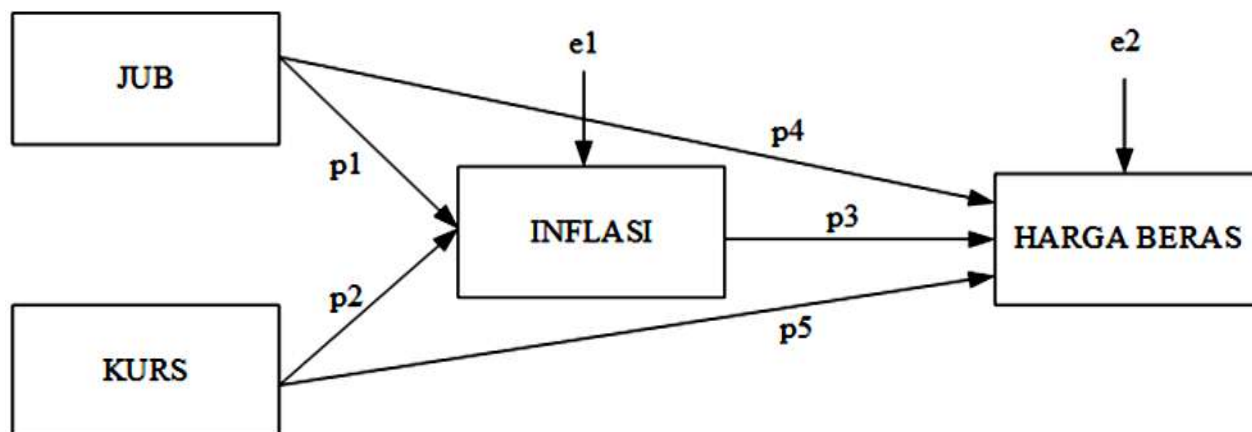
Jumlah Uang Beredar, Kurs, Inflasi, dan Harga Beras

Penelitian ini juga bertujuan untuk menghubungkan antara variabel independen yaitu jumlah uang beredar dan kurs, inflasi sebagai variabel intervening, serta variabel dependen yaitu harga beras. Karenanya dalam penelitian ini dimunculkan hipotesis keenam dan ketujuh, yaitu:

H6: Inflasi sebagai variabel mediasi antara jumlah uang beredar dan harga beras di Indonesia periode 2015-2019.

H7: Inflasi sebagai variabel mediasi antara kurs dan harga beras di Indonesia periode 2015-2019.

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dipaparkan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah penulis, 2020.

METODE PENELITIAN

Paradigma dalam penelitian ini adalah positivisme sehingga menggunakan metode kuantitatif. Sumber data sekunder merupakan data runtut waktu (*time series*) tahun 2015-2019 yang diperoleh dari hasil laporan publikasi BPS dan BI, serta dari beberapa dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti (Radjab & Jam'an, 2017).

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mencakup dua variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel intervening. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Variabel independen pertama adalah jumlah uang beredar (X_1). Kewajiban sistem moneter yang bisa menggambarkan likuiditas perekonomian adalah jumlah uang beredar (M_2). Komponen-komponen uang beredar dalam cakupan yang lebih luas meliputi uang kartal, uang giral, uang kuasi serta surat

berharga. Data yang digunakan adalah data jumlah uang beredar bulanan dalam bentuk miliaran rupiah tahun 2015-2019, berasal dari laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia BI.

Variabel independen kedua yaitu kurs (X_2). Kurs merupakan perbandingan nilai mata uang dalam negeri yang diukur dengan nilai mata uang asing. Untuk data yang digunakan yaitu kurs tengah rupiah per dollar AS atau IDR/USD bulanan dalam satuan rupiah tahun 2015-2019 yang diperoleh dari hasil publikasi BI.

Berikutnya, variabel dependen adalah harga beras (Y). Harga beras merupakan faktor yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menstabilkan perekonomian. Jika terjadi kenaikan harga beras tentu akan sangat berpengaruh terhadap sisi permintaan dan penawaran. Data yang dipakai yaitu harga beras bulanan dalam satuan rupiah tahun 2015-2019 yang diperoleh dari hasil publikasi milik BPS.

Variabel terakhir adalah inflasi sebagai intervening (X_3). Inflasi merupakan fenomena yang umum terjadi dalam perekonomian, dimana harga-harga barang serta jasa mengalami kenaikan dalam satu periode tertentu dan relatif lama. Dalam hal ini, penghitungan laju inflasi menggunakan IHK. Data yang digunakan adalah nilai inflasi bulanan dalam satuan persen tahun 2015-2019 dari hasil publikasi BPS serta laporan BI.

Metode Analisis Data

Metode analisis dilakukan melalui beberapa prosedur. Prosedur pertama yaitu data harus memenuhi asumsi klasik yang mencakup uji-uji autokorelasi, multikolinieritas, normalitas dan heteroskedastisitas. Prosedur kedua yaitu uji individual (parsial) yang diproses dengan menggunakan uji t , serta uji serentak (simultan) yang dilakukan melalui uji F , untuk menguji model secara keseluruhan (Suharjo, 2013).

Prosedur ketiga adalah teknik analisis jalur (*path analysis*), sebagai perluasan dari regresi linier berganda yang digunakan untuk menentukan hubungan kausalitas antar variabel yang ditetapkan (Ghozali, 2018). Analisis jalur dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (1) pertama menguji pengaruh jumlah uang beredar dan kurs terhadap inflasi, dan (2) menguji pengaruh jumlah uang beredar, kurs dan inflasi terhadap harga beras. Jalur hubungan antar variabel dapat dilihat pada Gambar 2, dengan persamaan matematis:

$$X_3 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \quad (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_2 \quad (2)$$

dimana Y adalah harga beras; β_0 adalah konstanta; β_1 sampai β_3 adalah koefisien korelasi dari tiap-tiap variabel independen serta intervening; X_1 adalah jumlah uang beredar; X_2 adalah kurs; X_3 adalah inflasi; serta, e_1 dan e_2 adalah *Error term* sub struktur 1 dan 2.

Prosedur uji statistik dari penelitian ini adalah uji Sobel. Uji sobel digunakan untuk mengukur efek tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melalui variabel pemediasi (Hayes, 2009). Formula dari uji Sobel adalah (Ghozali, 2018):

$$Sab = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

dimana Sab adalah *standar error* pengaruh tidak langsung; a adalah jalur X_1 dan X_2 ke X_3 ; b adalah jalur X_3 ke Y ; Sa adalah *standar error* koefisien a ; serta Sb adalah *standar error* koefisien b .

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, terlebih dahulu menghitung nilai t dari koefisien ab menggunakan rumus:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Apabila nilai t -hitung tersebut telah diketahui, selanjutnya dibandingkan dengan nilai t -tabel. Jika nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel, maka disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.

HASIL ANALISIS

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil *output* (Tabel 1), diidentifikasi secara deskriptif bahwa dari tahun 2015-2019 harga beras terendah sebesar Rp. 10.569,- dan harga tertinggi sebesar Rp. 12.414,- sedangkan untuk rata-ratanya sebesar Rp. 11.621,40,- dengan standar deviasi sebesar Rp. 465,955,- Berikutnya, jumlah uang beredar terendah sebesar Rp. 4.174.825,91 miliar dan tertinggi sebesar Rp. 6.136.552 miliar, sementara nilai rata-rata sebesar Rp. 5.127.984,62 miliar dengan standar deviasi Rp. 575.769,20 miliar.

Nilai kurs terendah selama tahun 2015-2019 sebesar Rp. 12.625,- dan tertinggi sebesar Rp. 15.227,- sedangkan rata-ratanya sebesar Rp. 13.716,70,- dengan standar deviasi bernilai Rp. 541,624,-. Untuk nilai inflasi terendah sebesar 2,48% dan inflasi

tertinggi sebesar 7,26%, sedangkan rata-rata nilai inflasi sepanjang tahun 2015-2019 sebesar 3,99%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi pertama adalah mendeteksi apakah model regresi mengalami gejala autokorelasi yaitu dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (D-W). Berdasarkan hasil *output* uji autokorelasi dalam Tabel 2, teridentifikasi nilai D-W yaitu 1,242 atau berada di antara -2 dan +2. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji asumsi kedua adalah uji multikolinieritas, yaitu dengan melihat skor *tolerance* dan VIF dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil *output* dalam Tabel 2 diperoleh skor *tolerance* dari ketiga variabel bebas > 0,10, sedangkan untuk skor VIF dari ketiga variabel bebas < 10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa model penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji asumsi ketiga adalah uji heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat skor *Sig.* dari setiap variabel independen. Hasil *output* dalam Tabel 2 menunjukkan skor *Sig.* variabel *Lag_X₁* (jumlah uang beredar) sebesar 0,195; skor *Sig.* variabel *Lag_X₂* (kurs) sebesar 0,789; dan, skor *Sig.* variabel *Lag_X₃* (inflasi) sebesar 0,724. Ketiga skor tersebut adalah lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji asumsi terakhir yaitu uji normalitas, yaitu menginterpretasikan grafik histogram ataupun tampilan *Normal P-P Plot*. Hasil *output* pada Gambar 3 menunjukkan diagram histogram yang menyerupai bentuk lonceng, sementara tampilan pada grafik *Normal P-P Plot* memperlihatkan titik-titik mengikuti arah garis diagonalnya. Berdasarkan interpretasi atas kedua grafik itu maka dapat dinyatakan bahwa data dalam model penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

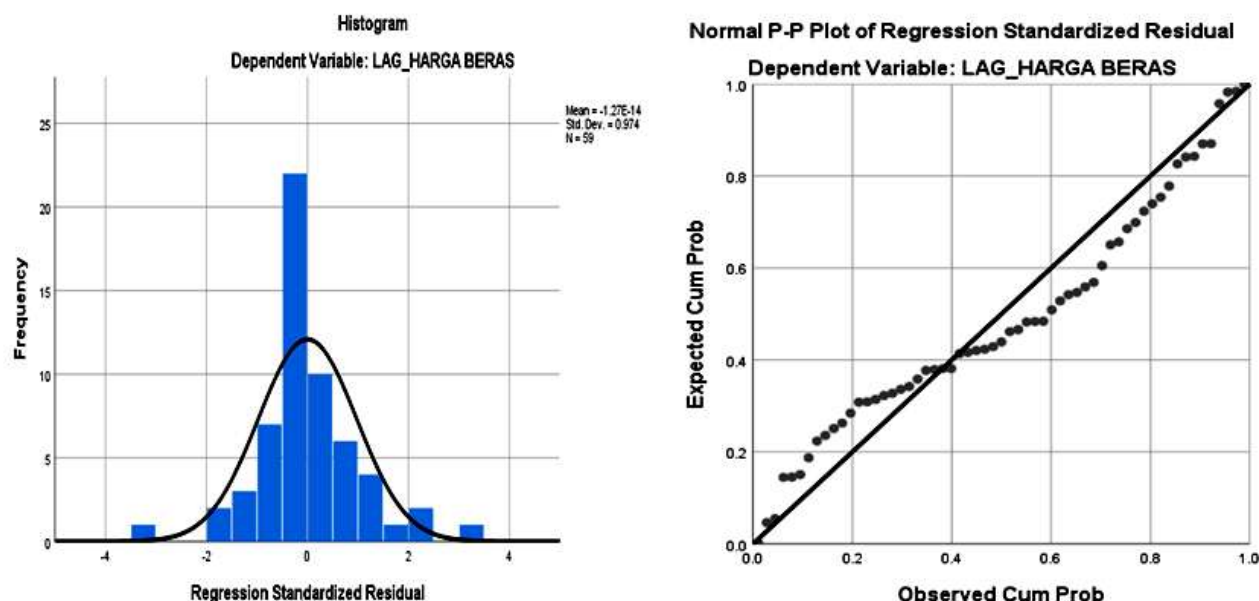
	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Harga Beras	10569	12414	11621,40	465,955
JUB	4174825,91	6136552,00	5127984,6255	575769,20074
Kurs	12652	15227	13716,70	541,624
Inflasi	2,48	7,26	3,9898	1,37212

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi, Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas

<i>Durbin-Watson</i> (D-W)	1,242			
	Tolerance	VIF	t	Sig.
(Constant)	-	-	1,477	0,146
Lag_JUB	0,651	1,536	-1,313	0,195
Lag_Kurs	0,862	1,160	-0,269	0,789
Lag_Inflasi	0,738	1,354	-0,355	0,724

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Tahap 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,956	2,322		2,996	0,004
	Lag_JUB	-1,835	0,415	-0,542	-4,418	0,000
	Lag_Kurs	0,727	0,721	0,124	1,009	0,317
F	=	9,924				
Sig	=	0,000				
R Square	=	0,262				

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Tahap 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,965	0,259		7,577	0,000
	Lag_JUB	0,199	0,050	0,497	3,986	0,000
	Lag_Kurs	-0,010	0,075	-0,015	-,135	0,893
	Lag_Inflasi	-0,031	0,014	-0,266	-2,269	0,027
F	=	14,620				
Sig	=	0,000				
R Square	=	0,444				

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Analisis Regresi 1 (Sub Struktur 1)

Berdasarkan hasil *output* analisis regresi tahap pertama (Tabel 3), maka persamaan regresi pertama dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Inflasi} = 6,956 - 1,835\text{JUB} + 0,727\text{Kurs}$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang bernilai negatif terhadap inflasi. Dengan kata lain, jika jumlah uang beredar mengalami peningkatan, maka inflasi akan menurun. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar (JUB) mengalami penurunan, maka inflasi akan menaik. Kondisi ini diasumsikan terjadi jika kurs memiliki nilai yang konstan.

Di sisi lain, persamaan itu menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh yang bernilai positif terhadap inflasi. Dengan demikian, jika nilai kurs (IDR/USD) menaik, maka inflasi juga akan mengalami kenaikan; sebaliknya jika nilai kurs (IDR/USD) menurun, maka inflasi juga akan mengalami penurunan. Kondisi ini diasumsikan terjadi jika jumlah uang beredar memiliki nilai yang konstan.

Analisis Regresi 2 (Sub Struktur 2)

Selanjutnya, berdasarkan hasil *output* analisis regresi tahap kedua (Tabel 4), maka persamaan regresi kedua yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Harga Beras} = 1,965 + 0,199\text{JUB} - 0,010\text{Kurs} - 0,031\text{Inflasi}$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang bernilai positif terhadap harga beras. Artinya, jika jumlah uang beredar meningkat, maka harga beras juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar (JUB) mengalami penurunan, maka harga beras juga menurun. Kondisi ini diasumsikan terjadi jika kurs dan inflasi memiliki nilai yang konstan.

Berkaitan dengan variabel independen yang kedua, persamaan tersebut menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh yang bernilai

negatif terhadap harga beras. Hal ini berarti bahwa jika kurs mengalami peningkatan, maka harga beras akan menurun. Sebaliknya, jika kurs mengalami penurunan, maka harga beras akan meningkat atau bertambah mahal. Kondisi ini diasumsikan terjadi jika jumlah uang beredar dan inflasi memiliki nilai yang konstan atau tidak berubah.

Persamaan itu lebih lanjut menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap harga beras. Hal ini berarti bahwa jika inflasi mengalami peningkatan nilai, maka harga beras akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika nilai inflasi mengalami penurunan, maka harga beras akan meningkat. Kondisi ini diasumsikan terjadi jika jumlah uang beredar dan kurs memiliki nilai yang konstan atau tidak berubah.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil *output* regresi pada Tabel 3 dan Tabel 4, maka dapat dijelaskan pembuktian atas hipotesis-hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Tabel 3 menunjukkan selama periode 2015-2019, jumlah uang beredar memiliki nilai Sig. *t* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (α); sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar secara parsial memiliki pengaruh langsung yang signifikan atas inflasi dapat dibuktikan kebenarannya. Tabel 3 juga menunjukkan selama periode 2015-2019, kurs memiliki nilai Sig. *t* sebesar 0,317 atau lebih besar dari 0,05 (α); sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kurs secara parsial memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap inflasi tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh selama periode 2015-2019, jumlah uang beredar memiliki nilai Sig. *t* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (α); sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh signifikan

atas harga beras bisa terbukti kebenarannya. Berikutnya, kurs diidentifikasi memiliki nilai Sig. t sebesar 0,893 atau lebih besar dari 0,05 (α); sehingga hipotesis keempat (H4) yang menyatakan kurs secara parsial memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap inflasi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Variabel inflasi pada Tabel 4 diidentifikasi memiliki nilai Sig. t sebesar 0,027 atau lebih kecil dari 0,05 (α); sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan inflasi secara parsial memiliki pengaruh langsung yang signifikan atas harga beras bisa terbukti kebenarannya.

Tabel 3 lebih jauh menunjukkan jumlah uang beredar dan kurs secara simultan terbukti berpengaruh signifikan atas inflasi, karena nilai Sig. F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, berdasarkan Tabel 4, jumlah uang beredar, kurs dan inflasi secara simultan terbukti signifikan mempengaruhi harga beras, dimana nilai Sig. F sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (α).

Hasil Uji Analisis Jalur

Hasil analisis tentang besaran pengaruh dari jumlah uang beredar dan kurs terhadap harga beras melalui inflasi sebagai variabel intervening, ditunjukkan dalam Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh besaran pengaruh langsung dari jumlah uang beredar terhadap harga beras adalah 0,497; pengaruh tidak langsung melalui mediasi inflasi terhadap harga beras adalah 0,144; dan, total pengaruhnya sebesar 0,641. Sementara itu, pengaruh langsung dari kurs terhadap harga

beras adalah -0,015; pengaruh tidak langsung melalui mediasi inflasi atas harga beras yaitu -0,033; dan, total pengaruhnya sebesar -0,048.

Untuk menguji dua hipotesis mediasi (H6 dan H7) maka dilakukan uji Sobel. Uji ini merupakan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel-variabel independen atas variabel dependen melalui variabel intervening. Prosedur perhitungan mula-mula untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga beras melalui inflasi, selanjutnya dilakukan untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap harga beras melalui inflasi.

Prosedur pertama adalah menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga beras melalui inflasi. Proses dimulai dengan menghitung nilai Sobel (Sab), lalu menghitung nilai t -statistik atas pengaruh mediasi:

1. Penghitungan Sobel

$$Sab = \sqrt{-0,031^2 0,415^2 + -1,835^2 0,014^2 + 0,415^2 0,014^2} \\ = 0,030.$$

2. Penghitungan nilai t -statistik

$$t = \frac{-0,542 \times -0,266}{0,030} = 4,806$$

Berdasarkan penghitungan diperoleh nilai t -hitung sebesar 4,805 atau lebih besar dari t -tabel (2,002) pada level signifikansi 0,05. Hal ini berarti inflasi secara signifikan memediasi pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga beras. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) dinyatakan dapat dibuktikan.

Tabel 5. Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	Jumlah Uang Beredar	Kurs
Pengaruh Langsung	0,497	-0,015
Pengaruh Tidak Langsung	-0,542 x -0,266 = 0,144	0,124 x -0,266 = -0,033
Pengaruh Total :	0,497 + 0,144 =	0,641
	-0,015 + -0,033 =	-0,048

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Prosedur kedua adalah menganalisis pengaruh kurs terhadap harga beras melalui inflasi. Proses dilakukan seperti halnya pada prosedur pertama, yaitu:

1. Penghitungan Sobel

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{-0,031^2 0,721^2 + 0,727^2 0,014^2 + 0,721^2 0,014^2} \\ &= 0,026. \end{aligned}$$

2. Penghitungan nilai *t*-statistik

$$t = \frac{0,124 \times -0,266}{0,026} = -1,269$$

Berdasarkan penghitungan diperoleh nilai *t*-hitung sebesar -1,269 atau lebih kecil dari *t*-tabel (2,002) pada level signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa inflasi tidak memediasi pengaruh kurs terhadap harga beras. Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) dinyatakan tidak terbukti.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah uang beredar berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, apabila volume uang beredar meningkat maka inflasi akan mengalami penurunan. Hasil temuan ini mengafirmasi penelitian yang dilakukan oleh Lim & Sek (2015) serta Ningsih & Kristiyanti (2018) yang di dalam studinya memperoleh temuan serupa.

Terdapat beberapa dugaan berkaitan pengaruh negatif dari jumlah uang beredar atas inflasi ini. Pertama, karena peredaran uang pada rentang tahun 2015-2019 tidak terlalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga perputaran uang yang terjadi dipandang tidak memengaruhi laju inflasi. Dugaan kedua yaitu persentase uang kuasi pada tahun penelitian cenderung memiliki angka yang relatif tinggi, sedangkan nilai dari uang kuasi sendiri tidak likuid, sehingga walaupun level persentasenya relatif

tinggi, tidak cukup untuk dapat memengaruhi inflasi (Utami & Soebagiyo, 2013).

Pengaruh Kurs terhadap Inflasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan atas inflasi. Hasil ini menyatakan apabila nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah akan berdampak terhadap naiknya tingkat inflasi.

Pengaruh yang tidak signifikan dari kurs terhadap inflasi itu disebabkan karena kurs rupiah terhadap dollar Amerika pada rentang tahun yang diteliti menunjukkan aktivitas fluktuasi tidak terlalu signifikan, sehingga melemah ataupun menguatnya kurs tidak akan terlalu berdampak terhadap laju inflasi. Hasil ini mendukung penelitian Madesha *et al.* (2013) yang juga menemukan bahwa nilai tukar tidak akan menimbulkan tekanan atas inflasi. Meskipun kurs tidak berdampak signifikan terhadap inflasi, pemerintah harus tetap selalu menjaga stabilitas nilai tukar. Karena jika kurs rupiah terhadap dollar terus melemah akan berdampak terhadap tingkat harga domestik yang mencerminkan tingkat inflasi (Langi *et al.*, 2014).

Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Harga Beras

Temuan penelitian ini menyatakan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga beras. Hasil ini mengidentifikasi bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap naiknya harga beras.

Hasil riset ini memperluas temuan Putra (2014) bahwa harga pangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh jumlah uang beredar (M2). Disamping itu, hasil ini juga sejalan dengan teori kuantitas uang, dimana peredaran uang yang terlalu berlebihan akan menimbulkan *purchasing power* yang tinggi di dalam masyarakat. Kondisi ini dinilai dapat

menyebabkan permintaan yang berlebihan dan selanjutnya berdampak pada kenaikan harga-harga dari barang dan jasa.

Pengaruh Kurs terhadap Harga Beras

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras. Koefisien negatif yang dimiliki kurs mengindikasikan bahwa jika nilai tukar menguat maka akan menyebabkan penurunan terhadap harga beras; sebaliknya, jika nilai tukar terdepresiasi maka harga beras akan mengalami kenaikan.

Hasil analisis ini sejalan dengan teori paritas daya beli, dimana seharusnya nilai tukar antar dua mata uang sama dengan rasio tingkat harga kedua negara (Taylor & Taylor, 2004). Meningkatnya laju inflasi suatu negara dapat disebabkan oleh menurunnya daya beli domestik suatu mata uang yang diiringi dengan menyusutnya nilai mata uang negara tersebut. Sebaliknya, jika terjadi apresiasi mata uang akan menimbulkan deflasi akibat dari meningkatnya daya beli.

Pengaruh Inflasi terhadap Harga Beras

Pengaruh inflasi terhadap harga beras dibuktikan dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga naiknya laju inflasi akan menurunkan harga beras pada periode tahun 2015-2019.

Hasil analisis ini sejalan dengan temuan riset milik Setyoaji *et al.* (2014) yang mengungkapkan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap harga beras. Sama halnya dengan temuan studi milik Muljawan & Alibaba (2009), bahwa tingkat inflasi berpengaruh nyata terhadap harga beras. Namun demikian, fluktuasi inflasi yang terjadi selama periode pengamatan ini dinilai masih pada kategori inflasi rendah, sehingga tidak memiliki potensi menimbulkan gejolak perekonomian yang berlebihan.

Pengaruh Mediasi melalui Inflasi

Hasil analisis pengaruh mediasi dalam penelitian ini menemukan bahwa inflasi mampu memediasi jumlah uang beredar terhadap harga beras secara positif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap kenaikan harga beras yang dimediasi oleh inflasi.

Hasil analisis dalam penelitian ini juga menemukan tidak adanya bukti bahwa inflasi memediasi pengaruh kurs terhadap harga beras periode 2015-2019. Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya nilai kurs tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga beras bila dimediasi oleh tingkat inflasi.

SIMPULAN

Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini memunculkan beberapa kesimpulan. Pertama, jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga beras. Kedua, kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi, namun berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras. Ketiga, inflasi secara parsial dan independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga beras; tetapi selaku variabel intervening hanya memediasi jumlah uang beredar terhadap harga beras.

Temuan penelitian ini lebih lanjut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah khususnya terkait masalah pengaturan jumlah uang beredar, karena jika jumlahnya tidak terkendali maka dapat memicu kenaikan inflasi dan berimbas pada kenaikan harga-harga komoditas seperti beras. Selain itu, stabilisasi nilai tukar atau kurs juga harus selalu diperhatikan guna menjaga stabilitas perekonomian.

Terakhir, temuan ini memunculkan rekomendasi bagi para peneliti lanjutan, yang diharapkan memperbanyak jumlah analisis data dari variabel-variabel lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan harga beras, dan memperluas periode penelitian sehingga mencakup rentang waktu yang lebih panjang atau lama sehingga hasil analisis yang diperoleh dinilai lebih sesuai.

REFERENSI

- Adhawiyah, R., Prajawati, M. I., & Firdian, R. (2018). Pengaruh paritas daya beli, paritas suku bunga terhadap nilai tukar rupiah dan dollar Amerika Serikat. *Iqtishoduna*, 14(1), 55-70. doi: 10.18860/iq.v0i0.4839.
- Browne, F., & Cronin, D. (2010). Commodity prices, money and inflation. *Journal of Economics and Business*, 62(4), 331-345. doi: 10.1016/j.jeconbus.2010.02.003.
- Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2010). *Manajemen keuangan multinasional*. Edisi terjemahan, edisi kesebelas. Erlangga.
- Faris, M. I. Z. A. (2016). Analisis pengaruh nilai tukar, inflasi, jumlah uang beredar (jub), produksi kedelai dalam negeri dan volume impor kedelai terhadap harga domestik komoditas kedelai. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/24918/>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25*, Badan Penerbit-Undip.
- Gilbert, C. L. (2010). How to understand high food prices. *Journal of Agricultural Economics*, 61(2), 398-425. doi: 10.1111/j.1477-9552.2010.00248.x.
- Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. *Communication Monographs*, 76(4), 408-420. doi: 10.1080/03637750903310360.
- Jumhur, J., Nasrun, M. A., Agustiar, M., & Wahyudi. (2018). Pengaruh jumlah uang beredar, ekspor dan impor terhadap inflasi (Studi empiris pada perekonomian Indonesia). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(3), 186-201. doi: 10.26418/jebik.v7i3.26991.
- Langi, T. M., Masinambow, V., & Siwu, H. (2014). Analisis pengaruh suku bunga bi, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs terhadap tingkat inflasi di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 44-58. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4184/3713>.
- Larasati, D. M., & Amri, A. (2017). Pengaruh tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 535-543. Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/5728>.
- Lim, Y. C., & Sek, S. K. (2015). An examination on the determinants of inflation. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 678-682. doi: 10.7763/JOEBM.2015.V3.265.
- Madesha, W., Chidoko, C., & Zivanomoyo, J. (2013). Empirical test of the relationship between exchange rate and inflation in Zimbabwe. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(1), 52-59. Retrieved from <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/4096>.
- Mahendra, A. (2016). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga sbi dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 1-12. doi: 10.1234/akuntansi.v2i1.170.
- Malian, A. H., Mardianto, S., & Ariani, M. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, konsumsi dan harga beras serta inflasi bahan makanan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 22(2), 119-146. doi: 10.21082/jae.v22n2.2004.119-146.

- Maune, A., Matanda, E., & Mundonde, J. (2020). Is money supply the cause of inflation in Zimbabwe? An empirical examination. *Acta Universitatis Danubius. Oeconomica*, 16(3), 17-37. Retrieved from <https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDOE/article/view/372>.
- Mbongo, J. E., Mutasa, F., & Msigwa, R. E. (2014). The effects of money supply on inflation in Tanzania. *Economics*, 3(2), 19-26. doi: 10.11648/J.ECO.20140302.11.
- Muljawan, R. E., & Alibaba, R. B. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras di Jawa Timur. *Buana Sains*, 9(2), 111-118. doi: 10.33366/bs.v9i2.230.
- Namira, Y., Nuhung, I. A., & Najamuddin, M. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia. *Jurnal Agribisnis*, 11(2), 183-201. doi: 10.15408/aj.v11i2.11843.
- Ningsih, S., & Kristiyanti, L. M. S. (2018). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia periode 2014-2016. *Daya Saing: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 20(2), 96-103. doi: 10.23917/dayasaing.v20i2.7258.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi moneter*. BPFE-UGM.
- Perlambang, H. (2012). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap tingkat inflasi. *Media Ekonomi*, 19(2), 49-68. doi: 10.25105/me.v18i2.2251.
- Putra, M. I. (2014). Determinasi kenaikan harga pangan di Indonesia (Pangan padi, kedelai periode 2001-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-16. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1387>.
- Putra, Y. P. (2017). Analisis pengaruh harga beras, produksi beras dan PDRB terhadap inflasi di Indonesia tahun 2010 – 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2), 1-24. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5368>.
- Radjab, E., & Jam'an, A. (2017). *Metode penelitian bisnis (1st ed.)*, Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahadyan, H., & Lubis, A. (2018). Monetary integration in the ASEAN economic community challenge: The role of the exchange rate on inflation in Indonesia. *International Journal of Services, Technology and Management*, 24(5-6), 463-479. doi: 10.1504/IJSTM.2018.094438.
- Rahmanta, & Maryunianta, Y. (2020). Pengaruh harga komoditi pangan terhadap inflasi di kota Medan. *Jurnal Agrica*, 13(1), 35-44. doi: 10.31289/agrica.v13i1.3121.
- Rahmawati, D., Hidayat, W., & Susilowati, D. (2017). Analisis pengaruh suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 2006-2015 (Pendekatan *error correction model*). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 240-254. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/5409>.
- Rezitis, A. N. (2015). The relationship between agricultural commodity prices, crude oil prices and US Dollar exchange rates: A panel VAR approach and causality analysis. *International Review of Applied Economics*, 29(3), 403-434. doi: 10.1080/02692171.2014.1001325.
- Saputra, A., Arifin, B., & Kasymir, E. (2014). Analisis kausalitas harga beras, harga pembelian pemerintah (HPP) dan inflasi serta efektivitas kebijakan HPP di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 2(1), 24-31. doi: 10.23960/jiia.v2i1.24-31.
- Setyoaji, S. B., Hani, E. S., & Sunartomo, A. F. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga beras IR-64 premium 2015-2020 di Jawa Timur. *Berkala Ilmiah Pertanian*, 1-11.

- Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69517>.
- Suarsih, S., Achasin, N. A., & Nuryartono, N. (2016). Dampak perubahan nilai tukar terhadap indeks harga konsumen bahan makanan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 1-14. doi: 10.21002/jepi.v17i1.548.
- Suharjo, B. (2013). *Statistika terapan disertai contoh aplikasi dengan SPSS*, Graha Ilmu.
- Taylor, A. M., & Taylor, M. P. (2004). The purchasing power parity debate. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4), 135-158. doi: 10.1257/0895330042632744.
- Utami, A. T., & Soebagiyo, D. (2013). Penentu inflasi di Indonesia; Jumlah uang beredar, nilai tukar, ataukah cadangan devisa?. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 144-152. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1266/1321>.



Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa

The Economic Potential Analysis of the Street Vendors in Kota Langsa

Iskandar Budiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa, Kota Langsa

e-mail korespondensi: iskandarbudiman@iainlangsa.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 06 Desember 2020 Disetujui: 16 Februari 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Artikel ini bersumber dari hasil penelitian, terfokus pada aktivitas para pedagang jajanan yang ada di sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa. Terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) pedagang kaki-lima dengan berbagai jenis barang dagangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor informal pedagang kaki-lima golongan ekonomi lemah dalam memperoleh lapangan kerja, prospek pengembangan usaha wisata kuliner terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga, serta penambahan sumber pendapatan asli daerah melalui pengutipan retribusi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan selanjutnya diolah menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pedagang <i>kaki-lima</i> di kawasan kota menjadi alternatif pekerjaan populer. Kondisi ini bersinergi dengan program pemerintah yang menata kawasan jajanan tersebut sebagai sentra wisata kuliner dan sangat membantu pedagang untuk meningkatkan pendapatan keluarga, juga telah memberi dampak terhadap meningkatnya pengunjung dan bertambahnya pendapatan dari retribusi.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.3043	
<i>Cara Mensitasi :</i> Budiman, I. (2021). Analisis potensi perekonomian pedagang kaki-lima di Kota Langsa. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 184-199. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3043.	
Kata Kunci: Potensi Ekonomi, Pedagang Kaki-Lima, Kota Langsa.	

Article Info	Abstract
Article History : Received: 06 December 2020 Accepted: 16 February 2021 Published: July 2021	<i>This article is based on the results of research, focused on the activities of hawker traders along Cut Nyak Dhien Street, Langsa City. There are more than seventy street vendors with various types of merchandise. The research aims to determine the role of the informal sector street vendors of economically weak groups in obtaining employment, the prospect of developing a culinary tourism business on family economic growth, and additional sources of local revenue. Data obtained through observation, interviews and documentation, and then processed using descriptive analysis techniques. The analysis results showed that street vendors in urban areas are a popular alternative to work. This condition is in synergy with the government program that arranges this area as a center for culinary tourism and is very helpful for traders to increase family income, as well as having an impact on increasing visitors and increasing local income.</i>
DOI Number : 10.33059/jseb.v12i2.3043	
How to cite : Budiman, I. (2021). Analisis potensi perekonomian pedagang kaki-lima di Kota Langsa. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 184-199. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3043.	
Keywords: Economic Potential, Street Vendors, Langsa City.	

PENDAHULUAN

Aktivitas perekonomian dalam wilayah perkotaan menjadi magnet bagi masyarakat luas dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan akan sandang dan pangan harus dipenuhi setiap harinya. Perekonomian suatu masyarakat juga memiliki peranan yang penting untuk mengukur kestabilan suatu bangsa dan negara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari level pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Umumnya pertumbuhan ekonomi dalam perkotaan disebabkan adanya kelemahan dari sistem ekonomi tradisional yang mengabaikan dimensi lokasi dan ruang. Disamping itu, ilmu ekonomi relatif menganggap bahwa struktur ekonomi wilayah dan perkotaan adalah sama dengan struktur ekonomi nasional (Prastowo, 2016).

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan *Gross Domestic Product* (GDP) pada satu tahun tertentu melebihi pertambahan penduduk (Egerer *et al.*, 2016). Dalam konsep ilmu ekonomi, pembangunan bisa diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dimana sebahagian besar masyarakat beralih dari taraf kehidupan yang miskin menuju kehidupan yang lebih baik (Berger *et al.*, 1997).

Dinamika pembangunan perekonomian saat ini berdampak pada sektor perekonomian yang cenderung lebih modern. Pusat-pusat perbelanjaan berbentuk gedung-gedung tinggi bermunculan. Toko-toko supermarket selaku pengganti toko kelontong bersifat tradisional bermunculan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Restoran-restoran berskala besar dan *franchise* kuliner luar negeri juga menjadi tempat “berkumpul” selain bersantap yang digemari masyarakat Indonesia. Hal tersebut

seakan menjadi simbol sebuah gaya hidup yang modern (Zaman, 2017).

Kawasan perdagangan merupakan salah satu sektor informal yang mampu diangkat sebagai tempat keinginan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu masyarakat. Kawasan perdagangan atau pasar pada masyarakat mempunyai peran penting yaitu sebagai pusat ekonomi maupun pusat kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Pada bidang distribusi, pasar mempunyai peranan menyebarluaskan barang-barang hasil produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat; sedangkan pada bidang konsumsi, pasar berperan menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan lainnya (Aliyah, 2017).

Di sisi lain, para pedagang kaki-lima dengan berbagai barang dagangan berjuang dalam memperoleh pendapatan dengan modal yang tentunya lebih rendah, tidak terorganisir dan ilegal. Bagi kelompok ekonomi lemah, sektor informal ini laksana pahlawan karena dapat dijadikan sebagai sumber utama dan/atau alternatif pendapatan. Sejak akumulasi penduduk di kota-kota baik besar maupun kecil, tidak dapat tercakup dalam peluang kerja formal yang ada, penduduk yang tidak mampu berkompetisi di sektor informal. Termasuk dalam di kelompok ini adalah penduduk dengan derajat pendidikan serta keterampilan yang rendah, korban tindakan penggusuran, kaum perempuan, dan modal kecil (Wijayaningsih, 2018).

Dalam proses pembangunannya, peran pemerintah kota maupun daerah sangat besar dan menentukan, disamping juga diperlukan peran masyarakat yang bersifat partisipatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan. Serupa halnya pada pembangunan perekonomian di Kota Langsa, menuju kota yang modern tentunya tidaklah terlepas dari perkembangan perekonomian kotanya. Kehadiran dari sejumlah tempat atau

lokasi perbelanjaan modern baik skala kecil seperti Indomaret, Alfamart, Mart 212 dan supermarket serta minimarket, membuktikan bahwa gaya konsumsi masyarakat dilatarbelakangi oleh sisi modern dan gaya hidup yang kian konsumtif (Safuwani, 2007).

Di sisi lain, sektor informal di kota ini terlihat masih bertahan khususnya dengan pedagang-pedagang kaki-lima dari berbagai umur. Salah satunya adalah pedagang kaki-lima di sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa. Setiap harinya transaksi *cash money* selalu terjadi di kawasan ini, walaupun ada beberapa yang berjualan dengan menu yang sama namun tidak menyurutkan langkah kaki konsumen untuk terus melakukan transaksi secara tunai.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa mayoritas pedagang kaki-lima tersebut terlihat masih usia muda dengan *range* usia sekitaran 17-40 tahun. Menjadi pedagang *kaki-lima* dilakukan untuk mencari atau menambah penghasilan sehari-hari serta untuk memajukan perekonomian keluarga. Mereka kreatif, rajin, dan pantang menyerah berusaha agar bisa *survive* dalam berbagai kondisi perekonomian.

Selain bisa berperan mengurangi tingkat pengangguran khususnya pada kelompok usia produktif, para pedagang kaki-lima ini juga berjasa untuk pemasukan retribusi di Kota Langsa. Kegiatan pedagang kaki-lima yang merupakan jenis usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Hal ini sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* yang menghendaki tercapainya suatu *mashlahah*, sehingga secara logis konsep ini juga *concern* menghindari kondisi kategori sulit (*mafsadah*) (Nasution, 2016).

Berdasarkan urgensi permasalahan dan analisis yang telah diuraikan, maka peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai kebangkitan ekonomi khususnya terhadap pedagang kaki-lima yang menjadikan Kota Langsa sebagai kota bebas pengangguran, kekinian di dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan penggalian pada potensi-potensi lokal, dimana kebangkitan ekonomi dinilai dapat mengatasi problem perekonomian yang paling mendasar, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Pedagang Kaki-Lima dan Perekonomian Masyarakat

Pedagang kaki-lima atau disingkat PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan bagi pejalan kaki (*pedestrian*). Istilah pedagang kaki-lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota (Ersina *et al.*, 2017). Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berjarak 5 (lima) kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki-lima”, dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki-lima” atau PKL (Yunus & Insani, 2017).

Pada tahap berikutnya, para pedagang *kaki-lima* inilah yang menjadi salah satu penggerak tumbuhnya tingkat perekonomian masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam

memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana level aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Hal ini karena secara mendasar aktivitas perekonomian merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga meningkat (Parimin & Putra, 2018).

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan produksi jangka panjang adalah kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Faktor utama yang dinilai mempengaruhi pertumbuhan perekonomian adalah ketersediaan sumber daya alam. Tanah sebagaimana *basic resource* dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan lain sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Faktor pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang bersifat non-ekonomi (Arsyad, 2015).

Faktor non-ekonomi bersama sektor ekonomi selanjutnya saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan dan kebudayaan yang menanamkan semangat untuk selalu

menghasilkan berbagai penemuan baru, juga merubah cara pandang, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor politik dan pengelolaan administratif yang tertata baik dinilai sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern (Syahputra, 2017).

Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah Kota Langsa memiliki peran penting dan sebagai *policy maker* dalam pengembangan perekonomian yang berbasis kearifan lokal dengan memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Menurut perspektif Islam, pemerintah memegang peran penting terhadap perekonomian umat yang didasari pada argumentasi (Hanifullah, 2012), bahwa: (a) Pemerintah wujud dari derivasi konsep kekhalifahan (*khilafah*)' (b) Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kafiyah*); serta, (c) Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan keuntungan (*falah*).

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Pemerintah karenanya adalah *khalifullah* atau pemegang mandat untuk merealisasikan keuntungan bersifat materi dan inmateri (*falah*). Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran dari pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit (Askari *et al.*, 2014). Tanggungjawab untuk membangun kesejahteraan terpondak pada pemimpin, seperti terkandung dalam Hadist Bukhari Muslim yang maksudnya:

"Ibn Umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya. Seseorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya”(Lihat: Imam Nawawi, tt., 303-304 dalam Badi, 2016).

Berdasarkan hadits tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam, semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, setidaknya atas dirinya sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab disini bukanlah semata-mata bermakna melaksanakan tugas, lalu setelah itu selesai serta tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin.

Dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas tercapainya keadilan dalam masyarakat. Mengenai hal ini, Ibnu Khaldun menyatakan pemaknaan bahwa (Muslim *et al.*, 2019):

“Kekuatan penguasa (*al-Mulk*) tidak dapat diwujudkan tanpa implementasi syariah, syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa, penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari rakyat (*ar-Rijal*), rakyat tidak dapat berdiri (sejahtera), kecuali dengan kekayaan (*al-Maal*), kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-Imarah*), pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (*al-'Adl*), keadilan adalah ukuran (*al-Mizan*) perhitungan akhirat.”

Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, Umer Chapra mengajukan relasi fungsional dalam sistim ekonomi syariah sebagai berikut (Amalia, 2016):

$$G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)$$

dimana keberhasilan suatu Pemerintahan (*G/goverment*) merupakan fungsi dari penerapan Syariah (*S/syariah*) dalam masyarakat (*N/nation*) untuk mewujudkan kesejahteraan (*W/wealth*) dengan menjalankan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi (*g/growth*) dan menegakkan keadilan (*j/justice*).

Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali digunakan oleh Keirt Hard dari University of Manchester pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian konsep informal dikembangkan oleh organisasi buruh dunia (ILO atau *International Labour Office*) dalam berbagai penelitian di lingkup dunia ketiga. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menangani masalah kemiskinan di dunia ketiga dalam hubungannya dengan problem pengangguran, migrasi dan urbanisasi (Kaur, 2010).

Konsep sektor informal seringkali digunakan untuk menjelaskan bahwa sektor informal dapat mengurangi pengangguran di negara-negara sedang berkembang. Bahkan beberapa pengamat pembangunan di negara yang sedang berkembang memandang sektor informal sebagai strategi alternatif pemecahan masalah keterbatasan peluang kerja. Sektor informal berfungsi sebagai katup pengaman yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya pencari kerja, baik dalam kota maupun pendatang dari desa (Sari, 2016).

Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari usaha-usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta dipengaruhi beberapa faktor pendorong, antara lain dorongan untuk mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh untuk mengatasi beban hidup dan dorongan untuk mengembangkan diri dari kelompok sosial. Semuanya terlihat dalam bentuk hasrat, kehendak, kemauan, baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok sosial (Pitoyo, 2016).

METODE PENELITIAN

Penyajian data pada artikel ini sepenuhnya mengikuti alur metode kualitatif melalui analisis deskriptif atas fenomena pedagang kaki-lima yang melakukan aktivitasnya di lokasi penelitian, yaitu di Jl. Cut Nyak Dhien Kota Langsa. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan observasi dan *depth-interview*, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016; Fuad *et al.*, 2019; Pratiwi *et al.*, 2021).

Subyek penelitian sebanyak lima (5) orang pelaku usaha yang telah berpengalaman menjalankan usahanya selama satu sampai tiga tahun. Sementara pada pihak Pemerintah Kota selaku pihak pemegang kebijakan yang menguasai banyak informasi terkait regulasi berkenaan pedagang kaki-lima, digunakan dua orang *informan* yang mewakili

instansi/dinas terkait, yaitu dari Disperindag Kota Langsa serta DPKAD Kota Langsa. Karakteristik dari informan dan responden dari penelitian ini terlihat dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, karakteristik dari responden sebagai pedagang kaki-lima dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan sifat kesamaan, yaitu dari golongan ekonomi lemah, pekerjaan bersifat rutin terjadwal, bukan pekerjaan sampingan, dan menjadikan pekerjaan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga. Sementara dari sisi informan adalah lembaga resmi milik pemerintahan kota yang bertanggungjawab atas upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program UMKM serta berperan sebagai pengambil kebijakan untuk mengatur lokasi para pedagang kaki-lima menjajakan dagangannya (Andiny & Nurjannah, 2018).

Dengan demikian, data yang diperoleh baik dari responden maupun juga informan akan saling menguatkan. Hal ini karena terjadinya sistem *mutual symbiosis* antara pemerintah yang bermaksud memajukan perekonomian rakyat dengan penyediaan fasilitas yang memadai dan juga para pedagang kaki-lima membayar retribusi dengan tetap menjaga imej keindahan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan kota untuk terus memikat jumlah pengunjung (Reza, 2016).

Tabel 1. Karakteristik Informan dan Responden

No.	Min	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Peran
1	Samsul Bahri	Laki-laki	Sektaris Disperindak	Informan
2	Mukhsin	Laki-laki	Staf Disperindak	Informan
3	Ridwan	Laki-laki	Penjual air kelapa	Responden
4	Syahrída	Perempuan	Penjual jeruk peras dan burger	Responden
5	Lia	Perempuan	Penjual cemilan	Responden
6	Rani	Perempuan	Penjual gorengan	Responden
7	Ajo Ujang	Laki-laki	Penjual sate	Responden

Sumber: Data diolah, 2020.

Dalam proses analisis data, unit penting adalah tersedianya informasi yang akurat dari semua pihak baik dari responden, informan dan juga masyarakat (Mastura *et al.*, 2019). Untuk memudahkan proses analisis, data diklasifikasikan untuk menjelaskan beberapa aspek, yaitu: (1) adanya peran sektor informal pedagang kaki-lima terhadap ketersediaan lapangan kerja; (2) adanya prospek pengembangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga; serta, (3) adanya penambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengutipan retribusi.

HASIL ANALISIS

Peran Sektor Informal bagi Ketersediaan Lapangan Kerja

Masalah angkatan kerja dan tenaga kerja di Indonesia dalam berbagai sektor yang dilakukan pemerintah sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi keahlian tertentu. Berbagai jenis lapangan pekerjaan terbuka setiap waktu di seluruh Indonesia, tetapi pencari pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan di Indonesia, diindikasikan antara lain disebabkan oleh tiga hal (Adianto & Fedryansyah, 2018). Pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, karena jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah dan rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia. Ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dimana sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,02 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 sebelumnya sebesar

5,17 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Kepala BPS pada saat itu, Suhariyanto, mengatakan hal ini terjadi akibat situasi perekonomian global yang melambat. Namun di situasi ekonomi seperti ini terjadi pertumbuhan di di seluruh lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Di Indonesia, dalam tiga dekade terakhir jumlah pekerja informal terus menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25 persen menjadi sebesar 36 persen dan 42 persen dalam rentang waktu per sepuluh tahun (1980-1990-2000). Sebahagian besar pekerja informal khususnya di perkotaan terserap ke dalam sektor perdagangan, diantaranya yaitu sektor perdagangan jalanan atau *kaki-lima* (Athaillah *et al.*, 2013).

Tipe perdagangan jalanan telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang relatif cukup populer, terutama di kalangan kelompok masyarakat miskin di area perkotaan. Hal ini terkait dengan mobilitas usaha yang fleksibel, modal yang dibutuhkan relatif kecil dan tidak memerlukan prosedur teknis yang sulit. Bapak Samsul Bahri, Sekretaris Disperindak Kota Langsa, mengemukakan:

“Peran kami selaku pemerintah untuk meningkatkan PAD Kota Langsa salah satunya adalah dengan pemberdayaan Pedagang Kaki-Lima yang berada di Kota Langsa, himbauan dari Walikota Langsa terus membantu masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa, kami juga menyediakan fasilitas yaitu dengan pemberian pinjaman sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia. Modal pinjaman yang diberikan melalui Bank yang ditunjuk yaitu sebesar Rp. 20.000.000 per pedagang kaki-lima, dengan tujuan untuk membantu kegiatan pedagang kaki-lima”.

Berkenaan dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah, Beliau juga menyampaikan bahwa:

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa dalam hal ini untuk membantu pedagang kaki-lima di Kota Langsa yaitu dengan memberikan fasilitas senyaman mungkin. Untuk tahap awal kami memberikan pelayanan mulai dari lapak penjualan, tenda, dan yang sedang kami usahakan adalah masuknya sarana dan prasarana air bersih guna untuk mempermudah pedagang kaki-lima melakukan kegiatan penjualan. Sedangkan untuk akses bagi pengguna pejalan kaki/sepeda motor/mobil, sedang kami upayakan untuk mengalihkan perjalanannya agar tidak terganggu penjualan tersebut.”

Berbagai kebijakan berkaitan dengan penanganan pedagang kaki-lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa, baik yang bersifat *exclusion* (penggusuran) maupun *inclusion* (tendanisasi), sebahagian besar terbukti Pemerintah Kota Langsa masih terus melakukan upaya dalam peningkatan dan pembinaan terhadap pedagang kaki-lima yang mereka adalah penduduk asli Kota Langsa. Hal ini merupakan upaya untuk memfasilitasi tujuan mereka berjualan yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Para pedagang kaki-lima terus dipantau dan memperoleh pembinaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mukhsin dari Disperindak Kota Langsa sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Langsa juga melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki-lima contohnya seperti kegiatan seminar yang dilakukan oleh Pemda dan bekerjasama dengan pihak instansi terkait. Hal ini agar masyarakat Kota Langsa khususnya pedagang kaki-lima mengerti dan menguasai tentang konsep dasar penjualan, dan mampu melakukan penataan dari lokasi yang telah ditentukan sebagai salah satu obyek

wisata kuliner Kota Langsa yang mesti tertata dengan baik”.

Sistem Tata Kelola Pedagang Kaki-Lima

Keberadaan pedagang kaki-lima adalah satu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil baik di kota besar maupun kota kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran atas para PKL marak terjadi, bahkan tindakan sewenang-wenang sering terjadi yang berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan sosial-ekonomi serta mengusik ketertiban masyarakat di perkotaan. Munculnya istilah Pedagang Kaki-Lima (PKL) ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai (Handoyo, 2014).

Pedagang Kaki-Lima yang berada di lokasi Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa merupakan salah satu asset pendapatan bagi Pemerintah Kota Langsa. Namun dalam hal ini pemerintah Kota Langsa harus melakukan pembinaan dan memberi perhatian khusus terhadap pedagang kaki-lima dikarenakan mereka merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat Kota Langsa dan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Langsa yang salah satunya adalah bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai pendapat Bapak Ridwan selaku salah seorang pedagang air kelapa di lokasi itu:

“Selama ini saya selaku pedagang yang berjualan di lokasi sini belum adanya penyediaan akses atau fasilitas yang baik atau memadai. Contohnya saya berjualan disini ya, semua fasilitas kami bawa sendiri dari rumah seperti, tenda, gerobak dan lain-lain. Jadi ya selama ini pemerintah Kota Langsa cuma menyediakan lapak jualan saja”.

Apabila diperhatikan bahwa para pedagang kaki-lima yang berdagang di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa adalah penduduk asli Kota Langsa untuk mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan hidup diri-

nya dan keluarganya. Secara umum, pedagang kaki-lima banyak yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu dan anak-anak muda yang belum ada pekerjaan tetap sehingga mereka dengan sendirinya membuka usaha dengan modal sendiri (Permatasari *et al.*, 2014). Seharusnya hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Langsa dan dinas yang ditunjuk untuk mengelola pedagang kaki-lima yang ada di Kota Langsa. Seperti keluhan Bapak Syahrida selaku pedagang jeruk peras dan burger yang sudah berjualan selama lebih dari dua tahun bahwa selama ia berjualan sampai saat ini, tidak ada yang diberikan oleh pemerintah selain lapak dan itu juga tidak dilengkapi dengan sarana air bersih.

Berkenaan dengan kenyamanan pembeli yang dinilai dapat mempengaruhi daya beli, Ibu Lia selaku pedagang cemilan menyatakan pendapat berikut:

“... dulu kami berjualan di depan pendopo wali kota, kemudian kami dipindahkan ke Jalan Cut Nyak Dhien. Pasti setelah kami dipindahkan pendapatan kami sedikit berkurang, karena pembeli memilih lokasi yang bagus untuk santai, lagi pula disini terlalu sempit sangat mengganggu akses bagi pengguna jalan. Harapan kami pemerintah Kota Langsa kedepannya menyediakan tempat yang baru lebih nyaman dan terjangkau”.

Demikian juga pendapat Ajo Ujang, seorang pedagang sate yang menaruh harapan kepada Pemerintah Kota:

“Harapan kami kepada Pemerintah Kota Langsa untuk melihat-lihat kami pedagang kaki-lima ini, karena secara tidak langsung kami disini juga membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Coba bayangkan saja pak kami yang berjualan di sini sudah terekrut sejumlah pekerja. Contoh seperti saya saja mempekerjakan dua orang karyawan, kemudian kami disini

membayar retribusi setiap sorenya ada yang mengutip. Adapun besaran uang retribusi yang dikutip Rp. 2.000,- untuk retribusi dan Rp. 1.000,- untuk sampah. Namun penyediaan akses lainnya belum ada sampai saat ini, jadi masih sangat serba kekurangan”.

Dengan demikian, keberadaan pedagang kaki-lima di wilayah Kota Langsa dalam perkembangannya, telah menggunakan area atau jalan fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, serta kelancaran lalu lintas sehingga dinilai perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial maupun ketentraman pada para anggota masyarakat (Wijayaningsih, 2018).

Prospek Retribusi dari Pedagang Kaki-Lima

Kemampuan satu wilayah untuk tumbuh secara cepat sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lainnya juga saling berkaitan. Faktor-faktor yang memiliki peran sebagai penentu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut perlu diketahui secara terperinci beserta sifatnya. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini dinilai cukup logis karena dalam era otonomi saat ini masing-masing daerah berlomba agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya bagi upaya mendorong penciptaan ataupun perbaikan kemakmuran masyarakat setempat (Nuraini, 2017).

Berkenaan dengan dampak pengutipan retribusi terhadap pelayanan kepada pedagang kaki-lima, Bapak Samsul Bahri mewakili Disperindag Kota Langsa merespon:

“Untuk perhatian khusus terhadap pedagang kaki-lima, kami selaku pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa selalu menampung aspirasi dari pedagang-pedagang kaki-lima yang ada di Kota

Langsa guna untuk memberikan pelayanan yang baik demi kemajuan para pedagang. Namun ini perlahan-lahan kami kelola dengan baik”.

Pada dasarnya, peran Pemerintah Kota Langsa dalam proses pelaksanaan program pembangunan ekonomi rakyat harus memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam lingkup pandangan Islam, peran pemerintah didasari beberapa argumentasi (Habibullah, 2017), yaitu: (a) Derivasi dari konsep kekhalifahan; (b) Kosekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kafiyah*); serta, (c) Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.

Qanun Kota Langsa Nomor 06 Tahun 2018 berkenaan dengan Pedagang Kaki-Lima) menerangkan kegiatan pedagang kaki-lima merupakan salah satu perdagangan sektor informal yang perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai salah satu pilihan dan penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam persoalan ini, Sekretaris Disperindag menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Dalam hal pemberdayaan Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa, kami selaku pemerintah ada juga memberikan fasilitas terutama fasilitas KUR bagi UMK yang bekerja sama dengan beberapa Bank di Kota Langsa, diantaranya Bank BRI, Mandiri dan Bank BNI, dan kerjasama itu atas dasar Peraturan Menteri Bersama tentang UMKM dan diteruskan atas dasar wewenang Walikota Langsa. Fasilitas itu pada tahun 2017 memberikan penyaluran KUR dari Bank BRI sebesar Rp. 76 Milyar untuk pengembangan Pedagang Kaki-Lima atau UMK di Kota Langsa. Sedangkan untuk sarana pada tahun 2016 melalui peraturan Walikota Langsa, kami juga memberikan fasilitas seperti: tenda yang berukuran 3 x 3/unit untuk UMK,

dan kemudian kami juga menyediakan air bersih dan meteran listrik. Salah satunya untuk PAD Kota Langsa yang bersumber dari pedagang kaki-lima ini yaitu retribusi yang dikutip perharinya antara lain Rp. 2.000 retribusi dan Rp. 2.000 sampah atau perbulan nya sebesar Rp. 3.500.000 – Rp. 4.000.000 dan ini disetorkan ke Disperindag dan nantinya disetorkan ke bendahara daerah Kota Langsa”.

Dari permasalahan yang telah diuraikan itu, pemerintah merupakan pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan tata kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Pemerintah bisa memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dan amanahnya, hal ini dikarenakan kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya dinilai disebabkan oleh beberapa faktor (Charis *et al.*, 2020), yaitu: (a) asimetri dan kekurangan informasi; (b) pelanggaran moral; serta, (c) kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

Pembahasan

Kota Langsa sebagai Kota Jasa

Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001, dan saat ini memfokuskan diri sebagai kota pendidikan, perdagangan, kuliner/makanan, dan wisata (Hibabullah *et al.*, 2019; Nugroho, 2019). Kota Langsa berlokasi sangat dekat dengan Kota Medan, yaitu ibukota Propinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran (Miswar & Ramadhani, 2019). Kota Langsa memiliki sentra wisata kuliner bernama CBD (*Central Business District*) Kuliner Langsa) yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Cut Nyak Dhien (Kristiana *et al.*, 2018).

Pengembangan Kota Langsa sebagai destinasi wisatawan lokal dan manca negara tidak terlepas dari kemampuan pemerintah kota dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan visi dan misinya. Visi Kota Langsa adalah "*Langsa Kota Jasa dan Industri yang maju dan Islami*", sementara misi yang dimiliki diantaranya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Diskominfo Kota Langsa, 2017).

Sistem Tata Kelola yang Dinamis dan Modern

Mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, dimana hal ini ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi. Bila sebuah kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota itu dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki-lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki-lima menjadi pilihan yang mudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan sektor informal yaitu mudah dimasuki, disebabkan usaha tersebut memiliki skala relatif kecil (Zulfa, 2016).

Namun untuk pelaksanaannya terhadap pedagang kaki-lima yang ada di Kota Langsa, dari tahun ke tahun dinilai terus mengalami peningkatan. Bagaimanapun juga, pemerintah diharapkan terus melakukan pembinaan salah satunya adalah dengan memberikan kegiatan seminar maupun pemberian bantuan permodalan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu dalam proses perdagangan, sebab penghasilan yang diperoleh melalui berjualan itu adalah sumber utama mata pencaharian bagi mereka.

Pemerintah Kota Langsa dan jajarannya ataupun dinas terkait yang menangani permasalahan PKL ini juga diharapkan terus melakukan berbagai upaya pembenahan dan pemberian fasilitas yang baik. Hal ini karena tanpa disadari para pedagang kaki-lima ini membantu program pemerintah berkenaan dengan pengentasan pengangguran maupun kemiskinan. Target Pemerintah Kota Langsa melalui pedagang kaki-lima adalah menjadikan Kota Langsa sebagai destinasi Wisata Kuliner yang mengadopsi nilai-nilai religi dan nilai-nilai budaya lokal.

Berkaitan dengan aspek sistem tata kelola yang dinamis dan modern, direkomendasikan kepada pihak pemerintah Kota Langsa untuk melakukan sejumlah upaya pengembangan tata kelola wisata kuliner tradisional secara modern dengan terus memperhatikan kondisi PKL yang ada di Kota Langsa. Rekomendasi ini diberikan mengingat PKL yang ada di Kota Langsa dilihat dari segi fasilitas belumlah sangat memadai, misalnya seperti fasilitas tempat berjualan yang tidak nyaman karena terlalu sesak dengan pengguna kendaraan motor dan mobil, serta kelemahan pada sarana air bersih maupun tempat pembuangan sampah (Anon, 2018).

Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Penertiban para pedagang kaki-lima dapat dilakukan secara terprogram melalui pembinaan dan pengembangan usaha dengan berbagai program pelatihan keterampilan usaha. Sebaiknya pemerintah Kota Langsa untuk lebih memberdayakan mereka, yaitu para pedagang kaki-lima yang terletak di Jalan Cut Nyak Dhien. Apabila target pemerintah setempat ingin menjadikan obyek wisata kuliner sebagai salah satu daya tarik untuk berkunjung ke Kota Langsa, maka semestinya Pemerintah Kota Langsa terus memperhatikan kondisi pedagang kaki-lima.

Hal ini terutama dalam pemberian pinjaman atau sarana dan prasarana kepada pedagang tersebut, sehingga mereka kondisinya makin lebih baik lagi (Syamsulbahri, 2018).

Keindahan lokasi tempat kegiatan usaha masih terganggu dan sangat tidak nyaman, karena tidak didukung ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang usaha yang asri dan seragam dari segi warna, penempatan serta bentuk dari produk usaha. Kondisi ini terjadi karena mereka secara individu merancang sendiri, padahal sebaiknya pihak Disperindag yang mengatur agar sesuai dengan keserasian dan keasrian Kota Langsa sebagai kota jasa. Kondisi sisi ruas jalan juga sering digunakan untuk parkir, sehingga membuat jalan macet dan tentunya sangat tidak nyaman (Petersen & Schäfer, 2004).

Selain pembinaan di bidang pengelolaan keuangan serta pemberdayaan kapasitas keahlian usaha, mereka juga perlu adanya pembinaan mental spiritual untuk lebih menjamin ketentraman jiwa. Jika diamati dan ditelusuri bahwa aktivitas usaha mereka mulai dari jam 15.00 sampai 24.00 WIB, tentu saja banyak sisi yang terabaikan untuk mencapai kepuasan yang ideal. Mereka berharap ada perhatian khusus terhadap mereka, karena mereka berjualan ini salah satunya adalah untuk menyambung tujuan hidup serta mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan anak sekolah dan juga pengajian agama islam di lembaga non formal (Handoyo, 2014).

Seorang pedagang memberi pengakuan bahwa ia sudah hampir lima tahun berjualan, dan selama itu yang ia butuhkan selaku pedagang ini adalah akses penyediaan tempat yang lebih baik, ingin diberikan pembiayaan untuk pembuatan gerobak dan tenda yang layak. Hal ini karena jika ia berharap kepada putaran keuntungan dari penjualan usaha maka tidaklah cukup bagi dirinya untuk membuat gerobak dagang yang lebih baik

lagi. Harapannya adalah adanya pemberian pinjaman modal dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, karena kalau bunga terlalu tinggi maka para pedagang pun tidak akan mampu untuk menutupinya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi juga ditemukan bahwa ada pihak ketiga yang menawarkan pembiayaan dan bahkan ada yang sudah mengambil jasa pembiayaan informal yang dilakukan oleh para rentenir atas nama koperasi untuk membantu usaha mereka. Tentu saja model pembiayaan yang ditawarkan menyalahi dari prinsip-prinsip syariah, seperti mengandung unsur *riba* dan *gharar* (Saepudin & Cahyani, 2016; Pratiwi *et al.*, 2021). Namun demikian berdasar fakta lapangan, mereka lakukan peminjaman pada rentenir itu karena ada keterpaksaan untuk keberlangsungan usaha mereka.

PKL dan Retribusi

Pemerintah Kota Langsa juga sangat diuntungkan jika upaya-upaya pemberdayaan dan pengembangan pedagang kaki-lima dilakukan secara terprogram sesuai visi dan misi Kota Langsa sebagai kota jasa. Jika pendapatan sumber ekonomi dari warga kota mengalami peningkatan maka berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah, dan mereka sebagai pelaku usaha di lokasi yang telah ditentukan pemerintah akan membayar retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk membantu peningkatan UMKM di Kota Langsa, dalam hal ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Bersama tentang izin UMKM atas dasar surat Keputusan Walikota Langsa/Kecamatan sudah dijalankan dengan baik. Program pengembangan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dinilai mampu mengatasi masalah permodalan dan juga adanya pengawasan bersama. Pada tahun 2017 KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui Bank BRI Kota Langsa mendapatkan bantuan

dana sebesar Rp. 76 milyar. Sedangkan pada tahun 2016 sebelumnya melalui peraturan Walikota Langsa, bantuan yang diberikan berupa: tenda ukuran 3 x 3 per 1 UMKM, air bersih, dan meteran listrik. Program ini tidak terlepas dari pantauan Disperindag Kota Langsa untuk memberikan *reward* kepada pedagang berprestasi pada *event* ulang tahun Kota Langsa (Andiny & Nurjannah, 2018).

Retribusi yang berasal dari pengutipan pedagang kaki-lima pada setiap harinya dengan ketentuan besaran Rp. 2.000., disetor kepada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa. Selanjutnya, untuk setiap bulannya retribusi tersebut disetorkan kembali ke kantor Dinas Keuangan dan Pendapatan Asset Daerah Kota Langsa. Pendapatan retribusi ini merupakan salah satu sumber devisa bagi Kota Langsa (Berwulo *et al.*, 2017).

SIMPULAN

Aktivitas pedagang kaki-lima adalah salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat Kota Langsa yang tidak dapat memasuki sektor formal karena pekerjaan tersebut mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal.

Lokasi pedagang kaki-lima yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Langsa termasuk dalam penataan keindahan kota, sehingga pola penyebaran aktivitas keramaian kota terpusat pada lokasi tertentu yang dapat menjamin ketertiban dan kenyamanan para pengunjung. Meskipun telah dibuat tentang penataan pedagang kaki-lima, namun baik pedagang kaki-lima maupun masyarakat menganggap perlu diadakan pengaturan yang lebih lanjut untuk mendisiplinkan pedagang kaki-lima tersebut yang melakukan penjualan dan tidak menambah lagi *space* yang menyalaui ukuran yang disetujui.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dinyatakan beberapa rekomendasi kepada pihak pemerintah Kota Langsa. Rekomendasi pertama, berkaitan dengan akses sarana dan prasarana sebaiknya Pemerintah Kota Langsa membantu para pedagang kaki-lima untuk memberikan fasilitas yang baik, dikarenakan pedagang kaki-lima ini bisa dijadikan sebagai salah satu wisata kuliner di Kota Langsa, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kalangan masyarakat bawah. Rekomendasi kedua adalah agar dilakukan peninjauan atas pinjaman modal KUR yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan menteri dan ditetapkan dalam peraturan Walikota Langsa untuk dapat mendata kembali para pedagang yang membutuhkan modal dan dipinjamkan secara mudah melalui Bank Syariah, serta ada pihak yang melakukan pendampingan usaha dan pengawasan secara prinsip Syariah bagi pedagang kaki-lima.

Rekomendasi ketiga adalah perlu adanya penelitian lanjutan terhadap dampak negatif pertumbuhan pedagang kaki-lima yang terkonsentrasi di satu titik, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, suasana tidak nyaman, polusi udara, dan masalah sosial lainnya. Kondisi demikian menuntut Pemerintahan Kota untuk menyediakan lebih banyak lagi ruang terbuka bagi pedagang kaki-lima untuk berdagang. Tentu saja alternatif lokasi dimaksud semakin memperindah Kota Langsa sebagai tujuan wisata.

REFERENSI

- Adianto, J., & Fedryansyah, M. (2018). Peningkatan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi Asean Economy Community. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 77-86. doi: 10.24198/focus.v1i2.18261.
- Aliyah, I. (2017). Pemahaman konseptual pasar tradisional di perkotaan. *Cakra Wisata Jurnal Pariwisata dan Budaya*,

- 18(2), 1-16. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/34367>.
- Amalia, E. (2016). Transformasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif bagi penguatan usaha kecil mikro di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 65-92. doi: 10.15408/aiq.v3i1.2497.
- Andiny, P., & Nurjannah. (2018). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37. Retrieved from <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ekonomi-dan-bisnis/article/view/674/614>.
- Anon. (2018). Kuliner sebagai pendukung industri pariwisata berbasis kearifan lokal. *Teknoba*, 6(1), 1-9. doi: 10.1529/jtbb.v6i1.16667.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 1-37. Retrieved from <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Understanding development in an Islamic framework. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 1-36. doi: 10.12816/0004129.
- Athaillah, Hamzah, A., & Masbar, R. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(3), 1-13. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/view/4529/3904>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>.
- Badi, J. A. (2016). Commentary of forty hadiths of An Nawawi. *Islamic Learning Foundation*, 1-220. Retrieved from https://ahadith.co.uk/downloads/Commentary_of_Forty_Hadiths_of_An-Nawawi.pdf.
- Berger, P. G., Ofek, E., & Yermack, D. L. (1997). Managerial entrenchment and capital structure decisions. *Journal of Finance*, 52(4), 1411-1438. doi: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb01115.x.
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1), 22-33. Retrieved from <https://studylibid.com/doc/2411385/analisis-pendapatan-asli-daerah--pad--di-kota---e>.
- Charis, M., Ammar, M., Wijokongko, D., & Al-Hafizd, M. F. (2020). Kategori kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(2), 171-189. Retrieved from <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1744573>.
- Diskominfo Kota Langsa. (2017). *Visi dan Misi Pemerintahan Kota Langsa*. Retrieved from <https://www.langsakota.go.id/visi-dan-misi/>.
- Egerer, M., Langmantel, E., & Zimmer, M. (2016). Gross domestic product. in *Regional Assessment of Global Change Impacts: The Project GLOWA-Danube*, 147-152. doi: 10.1007/978-3-319-16751-0_17.
- Ersina, S., Rahayu, I., & Yuliana. (2017). Jalur pedestrian sebagai salah satu fasilitas perkotaan. *National Academic Journal of Architecture*. 4(1), 57-65. doi: 10.24252/nature.v4i1a7.
- Fuad, M., Sudarma, M., & Irianto, G. (2019). Exploration of obstacles faced by successors in the intergenerational transition process of family business. *Journal of Applied Management (JAM)*, 17(1), 20-29. doi: 10.21776/ub.jam.2019.017.01.03.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(9), 691-710. doi: 10.30868/am.v5i09.190.

- Handoyo, E. (2014). Kontribusi modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima pascarelokasi. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2), 729-736. doi: 10.15294/komunitas.v5i2.2743.
- Hanifullah, H. (2012). Membangun sistem ekonomi umat berbasis syariah. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 267-292. doi: 10.21274/epis.2012.7.2.267-292.
- Hibabullah, A., Pranada, R. H., Adipraja, F. M., Nugroho, S. A., & Arafad, Y. (2019). Pembangunan aplikasi explore wisata di Kota Langsa. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 91-100. doi: 10.34010/miu.v17i1.2241.
- Kaur, A. (2010). Labour migration in Southeast Asia: Migration policies, labour exploitation and regulation. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(1), 6-19. doi: 10.1080/13547860903488195.
- Kristiana, Y., Suryadi, M. T., & Sunarya, S. R. (2018). Eksplorasi potensi wisata kuliner untuk pengembangan pariwisata di Kota Tangerang. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 9(1), 18-23. doi: 10.31294/khi.v9i1.3604.
- Mastura, M., Sumarni, M., & Eliza, Z. (2019). Peranan informasi akuntansi terhadap keberhasilan UMKM di Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 20-33. doi: 10.32505/v4i1.1248.
- Miswar & Ramadhani, T. (2019). Pengaruh faktor-faktor demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 164-174. doi: 10.0123/jse.v3i2.1890.
- Muslim, M. B., Saepullah, S., & Widayatsari, A. (2019). Political economy from the perspective Ibn Khaldun. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 59-74. doi: 10.15408/aiq.v11i1.13341.
- Nasution, A. P. (2016). Pemberdayaan sektor ekonomi informal: Suatu tinjauan empiris. *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1-7. doi: 10.33373/dms.v4i2.40.
- Nugroho, S. A. (2019). Pembangunan aplikasi explore wisata di Kota Langsa. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 91-100. doi: 10.34010/miu.v17i1.2227.
- Pratiwi, N. R., Prajawati, M. I., & Basir S. (2021). Kredit rentenir dan silaturahmi. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 102-116. doi: 10.33059/jseb.v12i1.2296.
- Nuraini, I. (2017). Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. *Prosiding, Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Persaingan Global"*, Malang, 17 Mei, 79-93. Retrieved from <https://docplayer.info/47864925-Kualitas-pertumbuhan-ekonomi-daerah-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>.
- Parimin & Putra, M. U. M. 2018. Perekonomian Indonesia dalam era globalisasi ASEAN. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 8(1), 1-12. Retrieved from <https://mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/view/466>.
- Permatasari, A., Putro, U. S., & Nuraeni, S. (2014). Strategic analysis relocating street vendor through 3D negotiation case study: Street vendor Surakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115, 436-443. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.451.
- Petersen, R., & Schafer, C. (2011). Perencanaan tata ruang kota dan transportasi perkotaan. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Retrieved from http://sutp.transport-nama.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB2_Land-Use-Planning-and-Demand-Management/GIZ_SUTP_SB2a-Land-use-Planning-and-Urban-Transport_ID.pdf.
- Pitoyo, A. J. (2016). Dinamika sektor informal di Indonesia: Prospek, perkembangan, dan kedudukannya dalam sistem ekonomi makro. *Populasi*, 18(2), 129-146. doi: 10.22146/jp.12081.

- Prastowo, P. (2016). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penggunaan lahan perkotaan pendekatan spatial econometrics: Studi kasus perkotaan DIY. (2011). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(1), 22-30. doi: 10.18196/jesp.17.1.2458.
- Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022*. Pemerintah Kota Langsa.
- Reza, A. (2016). Penataan ruang terbuka publik sebagai jalur pedestrian mall di Kota Langsa (Studi kasus jalan rel kereta api Kota Langsa). *ETD Unsyiah*. Retrieved from https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18573.
- Saepudin, E., & Cahyani, P. D. (2016). Strategi mempersempit ruang gerak rentenir melalui kelompok masyarakat berbasis modal sosial (Studi kasus di Kampung Rahayu Purwokerto). *Islamadina*, 17(2), 57-70. doi:10.30595/islamadina.v0i0.1326.
- Safuwani. (2007). Gaya hidup, konsumerisme dan modernitas. *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh*, 5(1), 38-46. Retrieved from <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/1342>.
- Sari, N. P. (2016). Transformasi pekerja informal ke arah formal: Analisis deskriptif dan regresi logistik. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 28-36. doi: 10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p03.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia (1990-2016). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191. Retrieved from <https://ejurnal.unsam.id/index.php/jse/article/download/334>.
- Syamsulbahri, D. (2018). UMKM dalam perspektif pembiayaan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(1), 59-76. doi: 10.14203/JEP.26.1.2018.59-76.
- Wijayaningsih, R. (2018). Keterkaitan pedagang kaki lima terhadap kualitas dan citra ruang publik di koridor kartini Semarang pada masa pra-pembongkaran (Studi kasus: Penggal Jl. dr. Cipto - Jl. Barito). *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*, 7(3), 185-200. Retrieved from <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/vitruvian/article/view/3780>.
- Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata kelola pedagang kaki lima di Kota Makassar (Studi kasus pedagang pisang epe' di Pantai Losari). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 3(1), 23-36. doi: 10.31947/jakpp.v3i1.4064.
- Zaman, S. (2017). Pola konsumtif masyarakat urban dalam perspektif semiotik dan budaya. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 40-49. doi: 10.17510/paradigma.v7i1.138.
- Zulfa, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(1), 13-22. Retrieved from <https://jurnal.unimal.ac.id/visi/article/download/226/179>.



Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa)

Evaluating the Effectiveness of the Implementation of City Without Slum Program (Case Study in Langsa City Area)

Safrizal Safrizal¹⁾, Safuridar Safuridar²⁾, Muhammad Fuad³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, Kota Langsa

e-mail korespondensi: muhammadfuad@unsam.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 05 Februari 2021 Disetujui: 26 April 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Pertumbuhan dan perkembangan penduduk bisa menimbulkan eksekusi bagi munculnya kawasan permukiman kumuh, yang sering dilihat sebagai sesuatu yang potensial menimbulkan masalah di perkotaan. Untuk mengurangi permasalahan perumahan dan kawasan kumuh tersebut, salah satu program pemerintah adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program KOTAKU di Kota Langsa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari program ini. Responden penelitian adalah seluruh kepala desa di Kota Langsa, anggota masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program KOTAKU, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan total jumlah 166 orang responden. Data primer dikumpulkan melalui instrumen kuesioner. Evaluasi efektivitas dihitung menggunakan nilai rerata secara persentase dari setiap indikator. Hasil analisis data menemukan bahwa program KOTAKU dinilai sudah efektif sebagai upaya mengurangi permukiman kumuh di Kota Langsa. Namun demikian, teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program tersebut. Kata Kunci: Efektivitas, Program KOTAKU, Kota Langsa.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.3242 <i>Cara Mensitasi :</i> Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Studi kasus pada wilayah Kota Langsa). <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 200-213. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3242.	

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 05 February 2021 Accepted: 26 April 2021 Published: July 2021	<i>Population growth and development can lead to excesses for the emergence of slum areas, which are often seen as a potential problem in urban areas. To reduce the problems of housing and slum areas, one of the government programs is the City Without Slum (in Indonesia called KOTAKU) program. This study aims to analyze the effectiveness of the program in Langsa City and identify the inhibiting factors of this program. 166 respondents were all village chiefs in Langsa City, community members who were directly or indirectly involved in the program, as well as other stakeholders. Primary data were collected through a questionnaire. The effectiveness evaluation is calculated using the mean value as a percentage of each indicator. The results found that the KOTAKU program was considered effective as an effort to reduce slum settlements in Langsa City. However, several factors were identified that were the main obstacles in the implementation of the program.</i> Keywords: Effectiveness, KOTAKU Program, Langsa City.
<i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.3242 <i>How to cite :</i> Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Studi kasus pada wilayah Kota Langsa). <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 200-213. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3242.	

PENDAHULUAN

Adanya pembangunan suatu daerah menyebabkan terjadinya pertumbuhan serta perkembangan penduduk yang pesat dan memiliki dampak terhadap sejumlah aspek, khususnya ketersediaan sarana serta prasarana bersifat mendasar yang saling menyusul dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini bisa menimbulkan eksekusi bagi munculnya kawasan permukiman kumuh, yang sering dilihat sebagai sesuatu yang potensial menimbulkan masalah pada area perkotaan.

UU Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah tipe permukiman yang dinilai tidak layak huni akibat ada kondisi ketidakteraturan bangunan, tingginya derajat kepadatan bangunan, serta kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat; sedangkan Perumahan Kumuh merupakan perumahan yang mengalami degradasi kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Salah satu upaya yang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kondisi kumuh yaitu upaya meningkatkan derajat kualitas perumahan serta permukiman kumuh guna mempertinggi mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat (Brelsford *et al.*, 2018; Sari, 2018).

Untuk mengurangi permasalahan dari area perumahan dan kawasan kumuh itu, pemerintah meluncurkan program yang dinamakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini adalah salah satu andalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Informasi tentang program ini dinyatakan dalam website milik KOTAKU (<http://kotaku.pu.go.id>) dengan tujuan umum adalah meningkatkan akses atas infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya

permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Pada tujuan umum itu terkandung dua maksud. Maksud pertama yaitu memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur serta fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Maksud kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan derajat kualitas permukiman kumuh, dengan berbasis masyarakat, serta partisipasi dari pemerintah daerah. Program ini mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal atas air minum, 0 persen permukiman kumuh, serta 100 persen akses atas sanitasi layak (<http://kotaku.pu.go.id>).

Program KOTAKU telah dilaksanakan di Kota Langsa sejak tahun 2016, berdasarkan SK Walikota No. 324/413/2016. Program ini tersebar di lima kecamatan dan 66 desa, dengan total luas dari kawasan kumuh di Kota Langsa mencapai 89.235 Ha. Dari total desa yang termasuk dalam SK Walikota tersebut, lima desa ditetapkan sebagai desa penanganan kumuh, sementara desa lainnya dimasukkan dalam kategori pencegahan.

Hasil penelusuran awal peneliti melalui wawancara dengan pihak pengelola program KOTAKU baik bersifat *online* maupun *offline*, belum ditemukan hasil riset akademis mengenai penilaian efektifitas dari program KOTAKU di Kota Langsa. Karenanya penelitian ini diekspektasikan memperoleh hasil-hasil yang bermanfaat sebagai referensi dasar mengenai tingkat efektifitas program tersebut di Kota Langsa. Hal ini dinilai sangat krusial karena derajat efektivitas suatu program penting untuk dievaluasi secara berkelanjutan agar bisa diidentifikasi kendala ataupun kelemahan yang dihadapi selama pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua rumusan masalah utama yang ingin dibahas. Masalah pertama adalah untuk

mengidentifikasi apakah program KOTAKU yang dilaksanakan di Kota Langsa sudah berjalan dengan efektif atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah kedua adalah berupaya memperdalam faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kota Langsa.

Pengertian dan Standar Pengukuran Efektifitas

Efektifitas memiliki kata dasar “efektif” yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” atau sesuatu yang dilakukan bisa berhasil baik. Beberapa peneliti menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pencapaian tujuan, dimana apabila kontribusi output semakin besar terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan ataupun program, maka pelaksanaan kegiatan atau program tersebut dinyatakan semakin efektif (Sudriamunawar, 2012; Cribbin, 2010; Satries, 2011).

Efektifitas adalah proses komunikasi bagi pencapaian tujuan yang direncanakan sesuai anggaran biaya, skedul waktu dan jumlah personil yang ditentukan (Daft, 2012; Steers, 2005; Anggara & Sumatri, 2016). Efektifitas berfokus pada output suatu kegiatan yang dicapai berdasar-kan batasan anggaran biaya, skedul waktu dan jumlah personil yang ada; dimana apabila output yang dihasilkan semakin memenuhi atau melebihi tujuan yang ingin dicapai, maka pelaksanaan program dinilai semakin efektif (Alam *et al.*, 2017; Garcia-Sanchez *et al.*, 2013; Mihaiu *et al.*, 2010).

Variabel-variabel yang bisa digunakan sebagai standar pengukuran untuk menilai apakah pencapaian tujuan telah terlaksana secara efektif atau tidak dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Budiani (2009) menyatakan empat standar efektivitas, yaitu: (1) ketepatan sasaran program; (2) sosialisasi program; (3) tujuan program; serta, (4) pemantauan

program. Karauwan *et al.* (2017) menyatakan lima ukuran efektivitas, yaitu: (1) produksi; (2) efisiensi; (3) kepuasan; (4) adaptasi; dan (5) pengembangan. Selanjutnya, Siagian (2014) menyatakan tujuh ukuran efektivitas meliputi: (1) kejelasan tujuan yang ingin dicapai; (2) kejelasan strategi bagi pencapaian tujuan; (3) kemantapan proses analisis serta perumusan kebijakan; (4) kematangan proses perencanaan; (5) ketepatan dari penyesuaian program; (6) tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kerja; serta (7) proses pelaksanaan program secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, standar ukuran dari efektifitas mengarah pada harus adanya perbandingan di antara input dan output. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini mengarah kepada perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan program KOTAKU, yang diperoleh melalui instrumen kuesioner dan wawancara mendalam, dan didukung hasil observasi dan evaluasi data sekunder.

Program KOTAKU

Program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh merupakan program yang dijalankan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota pada 34 Propinsi; dan menjadi basis penanganan pemukiman kumuh melalui pengintegrasian berbagai sumber daya maupun sumber pendanaan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, institusi pendonor, swasta, masyarakat, serta para *stakeholder* lain. Program ini disosialisasikan awal oleh Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 26 April 2016, selanjutnya tiap pemerintah daerah melakukan sosialisasi pada wilayahnya masing-masing.

Program KOTAKU adalah kelanjutan dari program PNPM Mandiri Perkotaan sebelumnya. Perbedaan keduanya adalah pada tujuan (*objectives*) dimana program PNPM-MP memiliki tujuan peningkatan akses sosial bagi masyarakat miskin serta memenuhi

kebutuhan dari masyarakat miskin; sementara program KOTAKU bertujuan mencegah dan menangani area pemukiman kumuh. Namun tujuan akhir keduanya pada masyarakat miskin adalah serupa, yaitu peningkatan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat miskin (Pedoman KOTAKU, 2016). Tujuan program KOTAKU adalah peningkatan akses masyarakat di pemukiman kumuh terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan dalam mendukung terciptanya pemukiman kota layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pencapaian *output* program ini berkontribusi atas tercapainya sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berupa pengentasan wilayah pemukiman kumuh perkotaan menjadi sebesar 0 (nol) persen (Pedoman KOTAKU, 2016).

Output dari program KOTAKU adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur serta pelayanan perkotaan pada pemukiman kumuh (seperti adanya drainase, air bersih atau minum, pengelolaan sampah, pengamanan kebakaran, serta ruang terbuka publik), penurunan luasan pemukiman kumuh sebagai hasil dari ketersediaan akses tersebut, berfungsinya kelembagaan Pokja PKP pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung program ini, adanya kepuasan penerima manfaat atas kualitas dari infrastruktur dan pelayanan perkotaan serta meningkatnya kesejahteraan dan penghidupan berkelanjutan dari masyarakat di pemukiman kumuh (Pedoman KOTAKU, 2016).

Telaah Riset tentang Efektifitas Program KOTAKU

Sejumlah penelitian terdahulu yang tersebar di beberapa daerah telah dilakukan untuk mengukur derajat peran atau efektivitas dari program KOTAKU terhadap daerah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil beragam

ditemukan oleh para peneliti terdahulu itu dalam menilai efektivitas program tersebut.

Studi Zuhrya (2017) yang melakukan deskripsi atas implementasi dan kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Studi ini dilakukan pada Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian memperoleh bahwa implementasi program KOTAKU dinilai telah melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Namun kendala yang ada yaitu kurangnya partisipasi aktif dari kelompok masyarakat dengan pendidikan tinggi (sarjana) dan kurangnya motivasi terhadap program tersebut.

Studi Uli S. (2018) pada Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta, menggunakan respon masyarakat di lokasi sebagai data yang diperoleh melalui teknik observasi lapangan, kuesioner, wawancara dan data sekunder. Temuan yang diperoleh menyatakan bahwa masyarakat menilai hasil-hasil implementasi program KOTAKU sudah efektif, terutama variabel penyediaan atas sarana proteksi kebakaran yang dinilai cukup efektif karena keterbatasan jumlah sarana di Karangwaru.

Studi terdahulu milik Widiyanti (2018) yang berlokasi di wilayah Kricak RW 1 Tegalrejo Yogyakarta, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis persepsi masyarakat wilayah setempat tentang implementasi program KOTAKU. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi implementasi Program Kotaku di lokasi penelitian telah berjalan sesuai tujuan program dimana masyarakat menyatakan telah merasakan dampak positif, seperti fisik lingkungan berubah menjadi tidak kumuh, kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan telah tumbuh, adanya ruang

terbuka publik, dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan ruang terbuka publik.

Penelitian yang dilakukan saat ini juga bertujuan mengevaluasi tingkat efektifitas pelaksanaan program KOTAKU di wilayah Kota Langsa melalui perspektif masyarakat sasarannya. Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui teknik observasi, kuesioner dan wawancara seperti yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Pendekatan analisis interaktif digunakan untuk menganalisis data dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kota Langsa meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Baro serta Kecamatan Langsa Lama. Total jumlah desa sebanyak 66 buah.

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan observasi, menyebarkan kuesioner, serta melakukan wawancara pada para responden. Responden adalah aparatur pemerintah baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/gampong yang terdapat program KOTAKU yang dilaksanakan Pemerintah Kota Langsa. Jumlah total responden yaitu

sebanyak 138 orang, dengan profil yang dirangkum dalam Tabel 1.

Deskriptif kuantitatif digunakan sebagai metode analisis data dengan menjabarkan dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Lima aspek digunakan sebagai standar pengukuran efektivitas dari program KOTAKU (Budiani, 2009; Kristanto, 2013; Siagian, 2014), meliputi: (1) pemahaman program, yaitu derajat pemahaman masyarakat secara umum maupun peserta sasaran secara khusus terhadap kegiatan program; (2) ketepatan sasaran, yaitu sejauhmana pencapaian sasaran antara yang dikehendaki dengan yang terealisasi; (3) ketepatan waktu, yaitu apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diestimasikan berdasarkan batasan waktu pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya; (4) pencapaian tujuan, yaitu level kesesuaian antar hasil pelaksanaan program yang dicapai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya; serta, (6) pemantauan perubahan, yaitu menilai arah dan besaran dari dampak program terhadap terjadinya perubahan nyata atas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Prosedur penilaian dilakukan dengan mencari nilai rerata persentase atas setiap indikator efektivitas. Penentuan skor dalam pengukuran tingkat efektivitas dijalankan dengan memberikan nilai berupa skala Likert dengan kisaran dari satu sampai empat pada setiap pertanyaan.

Tabel 1. Profil Responden

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa/Gampong di Wilayah Kota Langsa	66
2	Sekretaris Desa/Gampong di wilayah Kota Langsa	66
3	Camat/Sekretaris Camat di Wilayah Kota Langsa	5
4	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa	1
Jumlah Sampel		138

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Untuk mengidentifikasi hasil dari level efektivitas terhadap program tersebut maka ditentukan interval kelas sebagai pengukuran, dengan rumus (Widyanti, 2018; Nababan, 2015; Ichsan & Jannah, 2019):

$$\text{Interval (i)} = \frac{\text{Nilai Atas} - \text{Nilai Bawah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Dikarenakan penggunaan skala Likert berupa skor 1 sampai 4, maka skala penilaian yang diperoleh yaitu 0,75. Dengan demikian, level keputusan atau kriteria pengukuran efektivitas dari program adalah jika nilai antara 1 sampai 1,75 maka program dinilai tidak efektif; jika nilai lebih dari 1,75 sampai 2,5 maka program dinilai kurang efektif; jika nilai lebih dari 2,5 sampai 3,25 maka program dinilai efektif; dan, jika nilai lebih dari 3,25 sampai 4 maka program dinilai sangat efektif.

HASIL ANALISIS

Program KOTAKU di Kota Langsa

Program KOTAKU di Kota Langsa dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Tujuan utama program ini yaitu peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada permukiman kumuh perkotaan serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan ini mencakup dua maksud, yaitu memperbaiki akses masyarakat atas infrastruktur dan fasilitas pelayanan pada permukiman kumuh perkotaan; serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas di permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan derajat partisipasi dari pemerintah daerah.

Program KOTAKU ini terdiri dari dua kegiatan utama yaitu infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data penelitian yang digunakan meliputi periode tahun 2017 sampai 2020, dimana tercatat 64 desa telah mendapatkan program

Kotaku ini baik berupa program perbaikan sarana fisik maupun program pemberdayaan masyarakat. Mayoritas desa ini memperoleh jenis program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan pelatihan KSM/KPP dalam meningkatkan kompetensi, pelatihan aparatur desa, pelatihan perencanaan partisipatif, pelatihan pengelolaan keuangan desa, ataupun pelatihan ketrampilan. Program ini memiliki tujuan meningkatkan peran serta masyarakat atas pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam mengurangi wilayah kumuh perkotaan, serta mengupayakan ada perubahan perilaku masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan sekitarnya.

Sedangkan untuk program perbaikan infrastruktur hanya beberapa desa saja yang mendapatkannya. Program perbaikan sarana fisik seperti perbaikan jalan desa, perbaikan drainase, pembuatan sumur bor, penyediaan gerobak/bak sampah, pembangunan MCK, hidran umum, pemasangan paving blok, pembangunan, pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan lain sebagainya. Tujuan dari program ini yaitu memperbaiki akses masyarakat atas infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh.

Analisis Efektifitas Program KOTAKU

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa yang meliputi lima kecamatan. 166 responden yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas memiliki rentang usia antara 45 sampai 56 tahun (56 orang atau 33,73%), serta telah menempuh jenjang pendidikan Strata-1 (75 orang atau 45,18%).

Aspek-aspek dari standar pengukuran efektivitas dari program KOTAKU meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta pemantauan perubahan (Budiani, 2009; Karauwan *et al.*, 2017; Siagian, 2014). Hasil analisis atas masing-masing aspek efektivitas tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pemahaman Program

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana proram KOTAKU dinyatakan telah efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program ini, dengan nilai rata-rata sebesar 3,01. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana proram KOTAKU juga dinyatakan telah efektif dalam memberikan pemahaman sehingga masyarakat mengerti maksud dan tujuan dari tentang program ini, dengan nilai rata-rata sebesar 3,16.

Sosialisasi program KOTAKU di Kota Langsa di masyarakat juga dinilai sangat efektif, dengan nilai rata-rata 3,25. Hanya saja, level frekuensi atas kegiatan pemberian pemahaman oleh pihak pelaksana mengenai program KOTAKU di Kota Langsa dinilai relatif masih kurang efektif, dengan nilai rata-rata 2,49. Tingkat partisipasi masyarakat di dalam program KOTAKU dinilai telah sangat efektif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi program ini dalam mengurangi kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Langsa, dengan nilai rata-rata 3,29. Tanggapan masyarakat terhadap program KOTAKU di wilayah desa responden secara umum dinilai telah masuk pada kategori efektif, dengan nilai rata-rata sebesar 3,14.

Secara umum, berdasarkan hasil akhir dalam Tabel 2 dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,06, maka dinyatakan bahwa aspek-aspek pemahaman program terhadap program KOTAKU di wilayah Kota Langsa telah termasuk kriteria efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas program ini.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran sangat penting dalam melihat apakah suatu program dapat mencapai tujuan diharapkan. Nilai rata-rata efektivitas pada aspek ketepatan sasaran program dirangkum pada Tabel 3.

Pada pernyataan pertama diperoleh bahwa kondisi infrastruktur atau kelembagaan di desa sebelum adanya program KOTAKU dinilai kurang efektif untuk mendukung perekonomian Kota Langsa, dimana nilai rata-rata sebesar 2,31. Dihubungkan pada pernyataan kedua dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,10, maka bisa dinyatakan bahwa program KOTAKU yang dijalankan di Kota Langsa dinilai efektif dalam mengurangi pemukiman kumuh karena sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pemukiman tempat tinggalnya layak dan bersih.

Tabel 2. Efektivitas Pemahaman Program atas Program KOTAKU di Kota Langsa

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata
1	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap program KOTAKU.	3,01
2	Masyarakat mengerti maksud dan tujuan program KOTAKU.	3,16
3	Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang program KOTAKU.	3,25
4	Frekuensi kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap program KOTAKU.	2,49
5	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi program KOTAKU.	3,29
6	Tanggapan masyarakat terhadap program KOTAKU di desa responden.	3,14
Nilai Rata-Rata		3,06

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Tabel 3. Efektivitas Ketepatan Sasaran Program KOTAKU di Kota Langsa

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata
1	Kondisi infrastruktur/kelembagaan di desa sebelum adanya program KOTAKU.	2,31
2	Program KOTAKU yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan masyarakat.	3,10
3	Kesesuaian antara anggaran dengan infrastruktur & kelembagaan yang terbangun pada Program KOTAKU.	3,01
4	Infrastruktur & kelembagaan yang terbangun dengan Program KOTAKU dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik.	3,08
5	Program KOTAKU yang dijalankan dapat berpengaruh dalam menghilangkan pemukiman/lingkungan kumuh di desa.	3,37
6	Masyarakat mendapatkan manfaat dari program KOTAKU.	3,04
Nilai Rata-Rata		2,98

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Tabel 3 menyatakan tingkat kesesuaian antara anggaran dengan infrastruktur dan kelembagaan yang terbangun pada program KOTAKU di Kota Langsa dinilai efektif, dimana nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,01. Infrastruktur dan kelembagaan yang dibangun melalui program KOTAKU juga dinilai efektif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan lebih baik, ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 3,08. Pernyataan tentang program KOTAKU yang dijalankan juga dinilai berpengaruh relatif efektif dalam menghilangkan permukiman atau lingkungan kumuh di desa, dimana nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,37. Program KOTAKU juga dinilai secara efektif memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dimana nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,04.

Secara umum, berdasarkan hasil akhir dalam Tabel 3 dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,98, maka dinyatakan bahwa aspek-aspek ketepatan sasaran dari pelaksanaan program KOTAKU di wilayah Kota Langsa telah termasuk dalam kriteria efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menggembirakan karena menunjukkan tujuan pemerintah melalui program ini bisa dicapai.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu diukur melalui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan itu, yaitu apakah telah sesuai dengan yang diekspektasikan sebelumnya. Nilai rata-rata efektivitas pada aspek ketepatan waktu program dirangkum pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diidentifikasi waktu penyelesaian atas proses perencanaan dari kegiatan infrastruktur dan kelembagaan yang dilaksanakan pada Program KOTAKU sudah dikategorikan efektif, dimana nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,20. Selanjutnya juga diidentifikasi bahwa waktu penyelesaian atas proses pelaksanaan dari kegiatan infrastruktur dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui Program KOTAKU sudah dikategorikan efektif, dimana nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,20.

Kesesuaian antara proses pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kelembagaan yang terlaksana pada program KOTAKU dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dinyatakan tergolong efektif, dimana perolehan nilai rata-rata 3,23. Lebih jauh, kesesuaian antara proses pengawasan atas kegiatan infrastruktur dan kelembagaan yang terlaksana pada program KOTAKU dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dinyatakan

termasuk kategori sangat efektif, dimana perolehan nilai rata-rata sebesar 3,30. Proses evaluasi atas keberlanjutan program KOTAKU di Kota Langsa dinyatakan tergolong efektif oleh para responden, dimana nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,23.

Hasil akhir berkenaan dengan aspek ketepatan waktu dari pelaksanaan program KOTAKU di wilayah Kota Langsa, dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,22, maka dinyatakan termasuk dalam kriteria efektif.

Pencapaian Tujuan

Tujuan dari program KOTAKU yaitu peningkatan akses atas fasilitas infrastruktur serta pelayanan dasar pada kawasan kumuh perkotaan sebagai upaya untuk mendukung perwujudan area permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan. Nilai rata-rata efektivitas pada aspek pencapaian tujuan program dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 4. Efektivitas Ketepatan Waktu Program KOTAKU di Kota Langsa

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata
1	Waktu penyelesaian proses perencanaan kegiatan infrastruktur & kelembagaan yang dilaksanakan pada Program KOTAKU.	3,20
2	Waktu penyelesaian proses pelaksanaan kegiatan infrastruktur & kelembagaan yang dilaksanakan pada Program KOTAKU.	3,14
3	Proses pelaksanaan kegiatan infrastruktur & kelembagaan yang dilaksanakan pada Program KOTAKU sudah sesuai dengan perencanaan.	3,23
4	Proses pengawasan pada kegiatan infrastruktur & kelembagaan yang dilaksanakan pada Program KOTAKU sudah sesuai dengan perencanaan.	3,30
5	Evaluasi keberlanjutan program KOTAKU .	3,23
Nilai Rata-Rata		3,22

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Tabel 5. Efektivitas Pencapaian Tujuan Program KOTAKU di Kota Langsa

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata
1	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program yaitu keteraturan dalam dimensi bangunan/gedung pada desa.	3,67
2	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program pada dimensi akses jalan lingkungan yang baik pada desa.	3,75
3	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program pada dimensi akses air minum yang layak dan berkualitas pada desa.	3,51
4	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program pada dimensi ketersediaan drainase Lingkungan yang baik pada desa.	3,81
5	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program pada dimensi ketersediaan pengelolaan air limbah yang baik pada desa.	3,30
6	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program yaitu pada dimensi pengelolaan sampah yang baik di desa.	3,55
7	Program KOTAKU bisa mencapai tujuan program yaitu pada dimensi ketersediaan ruang terbuka hijau di desa.	3,79
Nilai Rata-Rata		3,63

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Tabel 6. Efektivitas Pemantauan Perubahan dari Program KOTAKU di Kota Langsa

No	Pernyataan	Nilai Rata-Rata
1	Perubahan pada dimensi bangunan/gedung lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU.	3,19
2	Perubahan pada dimensi akses jalan lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU.	3,20
3	Perubahan pada dimensi akses air minum pada lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU.	3,04
4	Perubahan pada dimensi drainase lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU.	3,35
5	Perubahan pada dimensi ketersediaan pengelolaan air limbah sekitar dengan adanya program KOTAKU.	3,16
6	Perubahan pada dimensi pengelolaan sampah sekitar dengan adanya program KOTAKU.	3,39
7	Perubahan pada dimensi ketersediaan ruang terbuka hijau sekitar dengan adanya program KOTAKU.	2,80
Nilai Rata-Rata		3,16

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Hasil analisis mengidentifikasi nilai rata-rata yang diperoleh mengenai pencapaian program KOTAKU dalam mencapai tujuan keteraturan dalam dimensi bangunan/gedung pada desa sebesar 3,67, sehingga dikategorikan sangat efektif. Pencapaian program KOTAKU dalam mencapai tujuan dimensi akses jalan lingkungan yang baik di desa juga dikategorikan sangat efektif, dengan nilai rata-rata sebesar 3,75. Kategori sangat efektif juga diberikan pada pencapaian program KOTAKU atas tujuan akses air minum yang layak dan berkualitas di desa, dengan nilai rata-rata sebesar 3,51.

Selanjutnya, berdasarkan hasil yang dirangkum pada Tabel 5, pencapaian program KOTAKU dalam mencapai tujuan dimensi ketersediaan drainase lingkungan yang baik di desa terkategori sangat efektif, dengan nilai rata-rata sebesar 3,75. Pencapaian program KOTAKU dalam mencapai tujuan dimensi ketersediaan pengelolaan air limbah maupun dimensi pengelolaan sampah yang baik di desa juga terkategori sangat efektif, dimana

nilai rata-rata dari masing-masing pernyataan adalah 3,30 serta 3,55. Kategori sangat efektif juga diberikan pada pencapaian program KOTAKU atas tujuan dimensi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai di desa, dengan nilai rata-rata sebesar 3,79.

Hasil akhir berkenaan dengan aspek pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui program KOTAKU yang dilaksanakan di wilayah Kota Langsa dapat dinyatakan termasuk kategori sangat efektif, dimana nilai rata-rata yang dicapai sebesar 3,63.

Pemantauan Perubahan

Aspek ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang terpantau pada lingkungan sekitar desa di wilayah Kota Langsa melalui keberadaan program KOTAKU, sehingga bisa dinilai apakah program itu sudah terlaksana dengan efektif atau kurang efektif. Nilai rata-rata efektivitas pada aspek pemantauan perubahan program dirangkum pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diidentifikasi bahwa perubahan pada dimensi bangunan atau gedung di lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU termasuk kategori efektif, yaitu nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,19. Perubahan pada dimensi akses jalan lingkungan di lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU juga termasuk kategori efektif, yaitu nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,20. Perubahan pada dimensi akses air minum pada lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU termasuk kategori efektif juga, dimana nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,04. Lebih jauh, perubahan pada dimensi drainase lingkungan pada lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU dimasukkan dalam kategori sangat efektif, karena perolehan nilai rata-rata yaitu 3,35.

Berikutnya, perubahan pada dimensi ketersediaan pengelolaan air limbah pada lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU termasuk kategori efektif, dimana nilai rata-rata diperoleh yaitu 3,04. Perubahan pada dimensi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU juga termasuk kategori efektif, dimana nilai rata-rata diperoleh sebesar 2,80. Sementara itu, nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,39 untuk aspek perubahan dalam dimensi pengelolaan sampah pada lingkungan sekitar dengan adanya program KOTAKU yang dilaksanakan maka termasuk kategori sangat efektif.

Hasil akhir berkenaan dengan aspek pemantauan perubahan dari adanya program KOTAKU yang terlaksana di wilayah Kota Langsa, dengan perolehan nilai rata-rata yaitu 3,16, maka terkategori dalam kriteria efektif.

Pembahasan

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang sedang berkembang di Propinsi Aceh terasa mulai mengalami kemunculan beberapa kawasan pemukiman kumuh yang harus

segera diantisipasi. Sebagai respon atas kondisi tersebut, sejak tahun 2016 program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU mulai dijalankan di Kota Langsa. Tujuan program KOTAKU yaitu peningkatan akses terhadap fasilitas infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh.

Analisis efektifitas pelaksanaan program ini diukur menggunakan 5 (lima) dimensi yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan program serta pemantauan perubahan. Efektifitas berfokus pada output suatu kegiatan yang dicapai berdasarkan batasan anggaran biaya, skedul waktu dan jumlah personil yang ada. Pelaksanaan suatu program dinilai efektif jika output yang dihasilkan semakin memenuhi atau melebihi tujuan yang ingin dicapai (Alam *et al.*, 2017; Garcia-Sanchez *et al.*, 2013; Mihaiu *et al.*, 2010).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara khusus di Kota Langsa, pelaksanaan program Kotaku berada pada angka rata-rata 3,21 atau bahwa pelaksanaan program Kotaku di Kota Langsa ini dinilai efektif dalam mencapai tujuan mengurangi pemukiman kumuh yang ada. Apabila kontribusi output yang dihasilkan program ini semakin besar atas pencapaian tujuan program pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program KOTAKU di Kota Langsa dalam upaya pengentasan wilayah pemukiman kumuh perkotaan dapat dinyatakan semakin efektif. Hal ini sesuai dengan argumen yang diajukan sejumlah ahli dan peneliti sebelumnya (Widiyanti, 2018; Zuhrya, 2017; Daft, 2012; Sudriamunawar, 2012; Satries, 2011; Cribbin, 2010).

Berdasarkan hasil ini, direkomendasikan dua hal penting. Pertama, agar pemerintah dapat terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kota Langsa, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai

pada tahap keberlanjutan program sehingga tujuan dari pada program itu sendiri segera terwujud. Kedua, berupaya melakukan usaha yang lebih komprehensif kepada pihak-pihak pemangku kepentingan terutama dalam hal peningkatan anggaran program KOTAKU di masa datang, sehingga cakupan penyelesaian program menjadi semakin meluas dan titik-titik pemukiman kumuh semakin berkurang di Kota Langsa.

Penelitian ini juga mengidentifikasi dua hambatan utama dalam pelaksanaan dalam program KOTAKU di wilayah Kota Langsa. Hambatan utama terkait dengan keterbatasan dana atas biaya pembangunan infrastruktur yang membutuhkan jumlah sangat besar. Dana pembangunan merupakan satu masalah sangat pelik karena keterbatasan ketersediaan anggaran dari negara tentunya mempengaruhi program perbaikan infrastruktur. Seperti ang sementara ini terjadi di Kota Langsa dimana perencanaan program KOTAKU diperkirakan baru terselesaikan setengah bagian dari yang diekspektasikan. Pemerintah sesungguhnya telah berupaya mengantisipasi permasalahan dana tersebut melalui pemberian kebebasan hak bagi BKM untuk mendapatkan dana tambahan dari pihak eksternal lainnya, seperti apa yang tertera dalam pedoman umum pelaksanaan program KOTAKU. Namun demikian, perolehan dana dari pihak luar selain pemerintah tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan.

Faktor selanjutnya sebagai penghambat program pemberdayaan KOTAKU di Kota Langsa adalah kesadaran masyarakat, yaitu ketidakkonsisten masyarakat atau masih naik turunnya (fluktuatif) semangat masyarakat untuk bersedia terlibat dalam proses program tersebut. Lebih jauh, persoalan kesadaran ini juga terlihat dari adanya dominasi kelompok tertentu sehingga bisa dinyatakan bahwa pihak yang berperan aktif hanyalah orang itu saja. Porsi keikutsertaan kelompok anak muda

juga diidentifikasi masih sangat kurang dalam proses pelaksanaan program KOTAKU. Kemunculan fenomena ini tentu bukanlah hal yang mengejutkan, karena pada dasarnya beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan ini akan berkaitan dengan derajat partisipasi anggota masyarakatnya. Kesadaran masyarakat sendiri menjadi instrument penting bagi keberhasilan sebuah program pemberdayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pelaksanaan program Kotaku di Kota Langsa melalui empat tahapan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan yang meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi Pembentukan/Penguatan TIPP (Tim Inti Perencana Partisipatif). Tahap kedua yaitu perencanaan, dimulai dengan melakukan perumusan kondisi permukiman layak huni pada tingkat desa/gampong yang diinginkan masyarakat di masa mendatang.

Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan kegiatan baik berupa kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Tahap keempat adalah tahap keberlanjutan diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan, meskipun hal ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di mana di dalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi.

Walaupun terdapat sejumlah hambatan utama dalam pelaksanaan aktivitas atau program KOTAKU, diantaranya masalah keterbatasan dana yang secara khusus dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta persoalan kesadaran masyarakat yang fluktuatif, namun pelaksanaan program KOTAKU sampai saat ini di wilayah Kota Langsa dinilai masih berkategori efektif.

Kondisi riil yang terjadi terkait program ini dinilai menarik untuk diperdalam oleh para peneliti berikutnya yang bisa menghubungkan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lebih spesifik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang telah membiayai kegiatan penelitian monotahun ini melalui dana DRPM Tahun 2020. Artikel ini merupakan bagian hasil dari hibah monotahun tersebut. Terima kasih juga pada Kepala Bappeda Kota Langsa, Kepala Dinas PUPR Kota Langsa c/q Kabid Bina Marga, Koordinator wilayah program KOTAKU Kota Langsa, pihak Kecamatan dalam wilayah Kota Langsa, Pemerintah gampong/desa yang menjadi obyek penelitian, serta Ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) gampong/desa, dimana telah bekerjasama secara baik selama kegiatan penelitian ini.

REFERENSI

- Alam, M. R., Kitenge, E., & Bedane, B. G. (2017). Government effectiveness and economic growth. *Economics Bulletin*, 37(1), 222-227. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312945627_Government_Effectiveness_and_Economic_Growth.
- Anggara, S., & Sumatri, I. (2016). *Administrasi pembangunan: Teori dan praktik*. Pustaka Setia.
- Brelsford, C., Martin, T., Hand, J., & Bettencourt, L. M. A. (2018). Toward cities without slums: Topology and the spatial evolution of neighborhoods. *Science Advances*, 4(8), 1-8. doi: 10.1126/sciadv.aar4644.
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>.
- Cribbin, J. (2010). *Kepemimpinan meng-efektifkan strategi organisasi*. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Daft, R. L. (2012). *Manajemen*. Alihbahasa: Edward Tanujaya & Shirley Tiolina. PT. Salemba Empat.
- Garcia-Sanchez, I. M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Frias-Aceituno, J. (2013). Determinants of government effectiveness. *International Journal of Public Administration*, 36(8), 567-577. doi: 10.1080/01900692.2013.772630.
- Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas penyaluran dana ZIS: Studi kasus pada SMA Terbuka binaan LAZ Sukses Kota Depok. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 86-99. doi: 10.29240/alfalah.v4i1.775.
- Karauwan, N. M., Laloma, A., & Tampongangoy, D. L. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46), 1-11. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16293>.
- Mihaiu, D. M., Opreana, A., & Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, effectiveness and performance of the public sector. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 13(4), 132-147. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227489762_Efficiency_Effectiveness_and_Performance_of_the_Public_Sector.
- Nababan, D.R.N. (2015). Efektivitas program pelayanan sosial anak korban bencana oleh Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) di Desa Kutambelin Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <https://docplayer.info/63330602->

- Dewi-riris-natalia-nababan.html.
- Pedoman Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. (2016). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Sari, A. C. P. (2018). Analisis implementasi pembangunan partisipatif dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) studi komparatif: Desa Bligo Kecamatan Candi dan Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 57-70. doi: 10.30742/equilibrium.v14i2.452.
- Satries, W. I. (2011). Efektivitas pemberdayaan pemuda pada organisasi kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi. *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Retrieved from <https://docplayer.info/39458070-Universitas-indonesia-efektivitas-program-pemberdayaan-pemuda-pada-organisasi-kepemudaan-al-fatih-ibadurrohman-kota-bekasi-tesis.html>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2016). *Research methods for business: A skill building approach (7th Edition)*. Wiley.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Steers R. M. (2005). *Efektivitas organisasi*. Edisi Terjemahan. Erlangga.
- Sudriamunawar, H. (2012). *Pengantar studi administrasi pembangunan*. CV Mandar Maju.
- Surat Keputusan Walikota Kota Langsa No. 324/413/2016. Kota Langsa.
- Uli S., E. M. (2018). Evaluasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/pelelitian/detail/160286>.
- UU RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- <http://kotaku.pu.go.id>.
- Widiyanti, I. (2018). Implementasi program KOTAKU dalam menyelesaikan persoalan lingkungan kumuh di Kricak Yogyakarta. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Retrieved from <https://docplayer.info/125210099-Implementasi-program-kotaku-dalam-menyelesaikan-persoalan-lingkungan-kumuh-di-kricak-yogyakarta-skripsi.html>.
- Yusuf, A. M. (2015). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Kencana.
- Zuhrya, A. (2017). Peranan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) sebagai media pendidikan sosial untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi (Studi kasus pada masyarakat marginal di Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri). *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQorKRtOfuAhXDxCsKHW61DS0QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fetheses.uin-malang.ac.id%2F9809%2F1%2F13130015.pdf&usg=AOvVaw2qTiiqQWt2Z2T8Nn4eElfl>.



Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

The Influence of Minimum Wages, Poverty and Unemployment on HDI in Regency/City of East Java Province

Moh. Faizin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

e-mail korespondensi: faizin@iainponorogo.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 01 Desember 2020 Disetujui: 21 April 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Paradigma pembangunan suatu negara dewasa ini tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonominya, tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2010/2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan, dan pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, terhadap IPM. Secara simultan, hasil penelitian menemukan ketiga variabel independen (yaitu: upah minimum, kemiskinan dan pengangguran) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.3027	
<i>Cara Mensitasi :</i> Faizin, M. (2021). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 214-227. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3027.	
Kata Kunci: Upah Minimum, Kemiskinan, Pengangguran, IPM.	

Article Info	Abstract
Article History : Received: 01 December 2020 Accepted: 21 April 2021 Published: July 2021	<i>The paradigm of development of a country today is not only measured by the rate of economic growth, but also by paying attention to human development. The purpose of this study was to analyze the effect of minimum wages, poverty and unemployment on the Human Development Index (HDI) in districts/cities in East Java Province. The method used is panel data regression in 38 districts/cities in East Java in 2010/2018. The results showed partially, the minimum wage has a positive and significant effect, poverty has a negative but not significant effect, and unemployment has a negative and significant effect, toward HDI. Simultaneously, the results found that the three independent variables (i.e.: minimum wage, poverty and unemployment) had a significant effect on HDI.</i>
DOI Number : 10.33059/jseb.v12i2.3027	
How to cite : Faizin, M. (2021). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 214-227. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3027.	
Keywords: Minimum Wage, Poverty, Unemployment, HDI.	

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pembangunan bagi suatu negara tidak hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan memperhatikan level pembangunan manusia termasuk didalamnya kualitas hidup manusia pada suatu daerah atau negara tersebut (Kahang *et al.*, 2016). Selain itu, teori pembangunan cenderung banyak menekankan pada aspek akumulasi modal manusia dimana hal ini dilakukan melalui penciptaan generasi yang lebih produktif melalui peningkatan kualitas pengetahuan, perbaikan nutrisi dan kesehatan maupun peningkatan kualitas keterampilan. Perkembangan suatu negara dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Standar hidup, kesehatan serta pendidikan yang layak menjadi ukuran dalam menghitung tingkat IPM (Amalia *et al.*, 2019). Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara maju, berkembang ataupun dianggap negara yang tertinggal adalah dengan melihat seberapa tinggi nilai IPM di negara tersebut.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari seberapa besar penghasilan yang mereka dapatkan. Upah bagi masyarakat merupakan sumber atas penghasilan. Apabila terjadi kenaikan atas jumlah penghasilan, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Sebaliknya, bila upah mengalami penurunan maka berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan (Ningrum, 2017). Kebijakan mengenai upah minimum kabupaten dan kota diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan jaminan atas penghasilan atas pekerjaan kaum buruh, kebijakan upah minimum juga diharapkan mampu menjadi media distribusi pemerataan pembangunan pada tiap daerah. Peningkatan pendapatan masyarakat pada masing-masing daerah nantinya juga mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan berdampak pada berkurangnya laju migrasi

penduduk desa ke kota (Marta *et al.*, 2019). Kebijakan mengenai upah minimum juga pada ujungnya akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan daya beli masyarakat.

Ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat berdampak kepada terbentuknya jurang kemiskinan (Nisa *et al.*, 2020). Kemiskinan itu sendiri merupakan persoalan pada setiap negara, dan seringkali menjadi permasalahan yang nyaris tidak ada ujungnya. Kemiskinan akan berakibat pada turunnya taraf hidup masyarakat sehingga berdampak pada terbatasnya pemenuhan kebutuhan setiap hari (Nasution, 2019). Ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar merupakan pengertian kemiskinan secara umum (Sartika *et al.*, 2016). Pada sisi yang lain, kemiskinan menjadi pangkal persoalan sosial yang lain, baik masalah kriminalitas atau masalah ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dan lapangan kerja secara layak. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Ketidakmampuan akses pendidikan dan kesehatan dan lapangan kerja secara layak selanjutnya berdampak pada naiknya jumlah pengangguran pada angkatan kerja. Dengan kata lain, kemiskinan bisa berdampak pada pengangguran serta kurangnya pendapatan, dan selanjutnya pengangguran itu sendiri menjadikan terbentuknya masyarakat miskin. Perputaran siklus atas pengangguran dan kemiskinan tersebut apabila tidak dilakukan pemotongan mata rantai dengan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan serta menciptakan lapangan pekerjaan maka akan terus menjadi siklus yang tidak pernah ada ujungnya. Kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan tidak akan berdampak signifikan apabila tidak diimbangi dengan adanya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan (Nugraha, 2020).

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi strategis di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan luas wilayah sebesar 47.800 km² serta terdiri dari 38 kabupaten/kota dan jumlah penduduk sebanyak 39.699.000 jiwa. Data BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur sebesar 70,77 dan upah rata-rata di kabupaten/kota sebesar Rp. 2,48 juta dimana yang tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp. 3,52 juta dan terendah adalah Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1,61 juta. Di sisi yang lain, angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi tersebut dihitung masih relatif cukup tinggi, dimana data terakhir pada tahun 2020 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 4.056.000 orang dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 69,45 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2020).

Penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia telah banyak dilakukan, tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Jasasila (2020) memperoleh bahwa derajat kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM. Hasil itu berbeda dibandingkan dari temuan-temuan penelitian milik Muliza *et al.* (2017), Tarumingkeng *et al.* (2018) serta Umiyati *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap level IPM.

Sementara pada kasus yang berbeda, hasil penelitian milik Meydiasari & Soejoto (2017) menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Begitu pula dengan hasil empiris yang senada diperoleh sejumlah para ahli (Meydiasari & Soejoto, 2017; Baeti, 2013; Hamzah *et al.*, 2012; Ningrum *et al.*, 2020; Arizal & Marwan, 2019; Syofya, 2018) yang mengidentifikasi bahwa pengangguran mempunyai dampak negatif terhadap IPM.

Berbeda dengan riset-riset sebelumnya, penelitian ini menganalisis upah minimum, kemiskinan serta pengangguran sebagai variabel independen yang mempengaruhi level IPM. Berdasarkan latar belakang atau fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini lebih jauh bertujuan menganalisis besaran pengaruh dari upah minimum, kemiskinan dan pengangguran terhadap IPM di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Manusia

UNDP pertama kalinya menggunakan indikator IPM pada tahun 1990 (Heka, 2017). IPM diartikan oleh UNDP sebagai sebuah proses dalam memperluas berbagai pilihan pada penduduk berkaitan dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Pada setiap daerah sudah seharusnya menjadikan lingkup pembangunan manusia yang seutuhnya menjadi titik berat proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara fisik dan mental serta spiritual.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penghitungan IPM diantaranya adalah peranan IPM sebagai parameter tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup yang ada di masyarakat. Pembangunan manusia yang tepat dan baik dapat meningkatkan level kesejahteraan masyarakat (Hatta & Khoirudin, 2020). Selain itu, IPM dapat digunakan dalam menentukan peringkat suatu daerah/negara yang satu dengan daerah yang lain. Di sisi yang lain, IPM juga menjadi parameter atas kinerja sebuah pemerintahan dikarenakan peran pemerintah sebagai faktor fasilitator dan katalisator dalam proses pembangunan. Tingginya nilai IPM, dengan kata lain, menjadi cerminan atas semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk (Ariza, 2016).

Rata-rata pencapaian pembangunan suatu negara atau daerah dalam menggunakan IPM diukur berdasarkan tiga parameter, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Level kesehatan diukur dengan memperhatikan angka harapan hidup (AHY) saat kelahiran; tingkat pendidikan diukur dengan melihat rata-rata lama sekolah; serta, derajat ekonomi (hidup yang layak) dilihat menggunakan kemampuan daya beli atau PNB perkapita.

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pemberian upah minimal pada pekerja bertujuan agar para pekerja mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum sendiri diartikan sebagai upah terendah yang diterima setiap bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap dimana penetapan upah dilakukan gubernur. Masing-masing daerah mempunyai standar kebutuhan hidup yang berbeda, sehingga situasi ini yang menjadikan besaran upah minimum tidak berlaku secara nasional namun hanya berlaku untuk wilayah tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah minimum terbagi atas: (a) upah minimum provinsi; (b) upah minimum kabupaten/kota; (c) upah minimum sektoral provinsi; dan, (d) upah minimum sektoral kabupaten/kota. Penetapan upah dilakukan oleh gubernur selaku kepala daerah. Penetapan upah minimum disesuaikan dengan penilaian kebutuhan hidup layak serta dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja yang masih lajang untuk dapat hidup layak selama satu bulan.

Berbeda dengan sejumlah riset empiris terdahulu, penelitian ini menyoroti upah minimum sebagai variabel yang dinilai mempengaruhi IPM. Hal ini didasarkan pada

fakta bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan bagian dari instrumen kebijakan dalam penciptaan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar daerah. Melalui penerapan kebijakan upah minimum secara tepat diharapkan akan mengurangi laju migrasi dari desa ke kota. Pada saat yang sama, kebijakan upah minimum juga dapat berdampak pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pemikiran itu, maka hipotesis pertama yang dimunculkan untuk dianalisis pada penelitian ini bahwa upah minimum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM.

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai level ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar. Kemiskinan digolongkan menjadi beberapa bagian. Golongan pertama adalah kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang dialami seseorang karena pendapatan rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan kedua yaitu kemiskinan relatif, atau derajat kemiskinan yang dialami seseorang dengan kondisi di atas garis kemiskinan tetapi berada pada jarak antara miskin dan non miskin. Golongan ketiga adalah kemiskinan struktural, yakni level kemiskinan yang diderita oleh seseorang yang mengalami kemiskinan tetapi mereka lebih bersikap enggan untuk melakukan perbaikan hidupnya hingga ada bantuan untuk dapat keluar keadaan tersebut.

Dewasa ini definisi kemiskinan menjadi lebih kompleks, dimana dimensi kemiskinan mencakup permasalahan adanya kerentanan, ketidakberdayaan serta ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi. Hal ini menjadikan kemiskinan menjadi lebih multi-dimensi dalam masyarakat. Kemiskinan juga dianggap sebagai ketidaksetaraan kesempatan dalam mengakumulasi kekuatan sosial

baik berupa modal dan asset, jaringan sosial dalam memperoleh pekerjaan, barang dan jasa. Ketidakmampuan dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang bermanfaat dalam kemajuan hidup mereka juga dapat dinilai sebagai kemiskinan (Palenewen *et al.*, 2018).

Penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel kemiskinan terhadap IPM yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Jasasila (2020) menemukan hasil bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat IPM. Sebaliknya, studi-studi yang dilakukan oleh Muliza *et al.* (2017), Tarumingkeng *et al.* (2019) serta Umiyati *et al.* (2017) secara empiris memperoleh kemiskinan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM. Adanya *gap* riset itu mendasari dirumuskannya hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM.

Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang sudah termasuk dalam angkatan kerja dan yang secara aktif sedang mencari pekerjaan untuk tingkat upah tertentu, tetapi orang itu tidak mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Lebih jauh, pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Sukirno, 2004).

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh pengangguran terhadap IPM seperti milik Meydiasari & Soejoto (2017), Baeti (2013) serta Hamzah *et al.* (2012) menemukan hasil empiris yang menunjukkan bahwa pengangguran mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Temuan-temuan serupa bahwa pengangguran memiliki dampak negatif terhadap IPM juga diperoleh Ningrum *et al.* (2020), Arizal & Marwan (2019) maupun Syofya (2018).

Berdasarkan sejumlah hasil empiris tersebut maka dirumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai IPM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang merupakan perpaduan data *time series* (runtut waktu) serta data *cross section*. Tujuan dari metode analisis estimasi adalah memperkirakan parameter regresi yang berupa *intersep* dan *slope* (Sakti, 2018; Sriyana, 2015). Penggunaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini dinilai menjadi pilihan yang tepat, karena data terdiri dari banyak obyek pengamatan (kabupaten/kota) serta terdiri dari beberapa periode waktu tertentu.

Data panel yang digunakan bersumber pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur yang total berjumlah 38 kabupaten dan kota. Sumber data berasal dari BPS untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2018. Data sekunder yang digunakan adalah data Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK), persentase kemiskinan, data pengangguran yang digunakan sebagai variabel independen, serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Persamaan data panel pada penelitian ini adalah:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Upah Minimum}_{it} + \beta_2 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_3 \text{Pengangguran}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam analisis regresi data panel adalah melakukan pemilihan model, menjalankan uji asumsi klasik, serta melakukan interpretasi model.

Pemilihan Model

Estimasi model data panel bertujuan untuk menentukan estimasi terbaik suatu model. Dalam mengestimasi model terdapat tiga model (Baltagi, 2008; Croissant & Millo,

2008). Pertama yaitu model CEM (*Common Effect Model*) yang merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya sekedar menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa perlu memperhatikan perbedaan waktu dan obyek. Kedua adalah model FEM (*Fixed Effect Model*) yang menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan pada intersep serta berasumsi bahwa slop antar obyek dan antar waktu bersifat tetap. Ketiga yaitu model REM (*Random Effect Model*) yang melakukan estimasi dimana variabel pengganggu di anggap saling berpengaruh antar obyek dan antar waktu.

Terdapat tiga jenis pengujian atas estimasi data panel pada model CEM, FEM dan model REM untuk memilih model yang tepat, yaitu: (1) Uji *Chow* yang digunakan untuk memilih antara model CEM dan model FEM; (2) Uji Hausman yang bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat antara model FEM dan model REM; serta, (3) Uji *Lagrange Multiplier* yang bertujuan untuk memilih model paling tepat antara model REM dan model CEM (Basuki & Prawoto, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Tahap selanjutnya yakni melakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas berguna untuk melihat normal dan tidaknya distribusi data yang digunakan. Uji ini diperlukan karena apabila residual tidak terdistribusi secara normal maka akan berakibat pada penggunaan uji *t* dalam melihat koefisien regresi menjadi tidak relevan (Gujarati, 2016). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*, dimana dalam mengambil keputusan atas hasil uji didasarkan pada nilai probabilitas yang dibandingkan dengan nilai signifikansi (α) sebesar 0,05 (Widarjono, 2013). Kriteria

penilaian adalah apabila probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari α maka dinyatakan *residual* mempunyai distribusi normal; namun, jika probabilitas *Jarque-Bera* lebih kecil dari α maka dinyatakan *residual* tidak mempunyai distribusi normal.

Uji *multikolinieritas* dilakukan apabila model pada regresi memiliki variabel bebas jamak (lebih dari satu), yaitu untuk melihat ada atau tidaknya hubungan secara linier pada masing-masing variabel bebas (Gujarati, 2016). Apabila terjadi multikolinearitas, dampaknya adalah banyak dari variabel independen bisa menjadi tidak signifikan sementara koefisien determinasi memiliki nilai tinggi dalam mempengaruhi variabel dependen (Basuki & Prawoto, 2016). Kriteria penilaian yaitu jika nilai korelasi dari setiap variabel independen lebih kecil dari 0,8 maka dinyatakan data semua variabel tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menggambarkan nilai dari residual pada model memiliki varians yang konstan atau tidak. Pengujian ini menjadi penting karena apabila pada model terjadi heteroskedastisitas maka hasil uji *t* dan uji *F* tidak bisa akurat (Widarjono, 2013; Gujarati, 2016). Kriteria penilaian dari uji heteroskedastisitas adalah jika nilai probabilitas (prob.) dari semua variabel bebas lebih besar dari α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam model regresi.

Interpretasi Model

Tahap terakhir dalam model regresi data panel adalah dengan melakukan interpretasi model. Interpretasi model dilakukan dengan melihat koefisien pada masing-masing variabel independen (Basuki & Prawoto, 2016; Sriyana, 2015). Dalam menginterpretasikan terdapat dua hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu: (1) besar kecilnya nilai koefisien; dan, (2) tanda positif atau

negatif pada nilai koefisien tersebut. Nilai koefisien menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen atas variabel dependen; sementara tanda positif ataupun negatif menunjukkan apakah hubungan antar variabel berlangsung secara berbanding lurus atau berbanding terbalik.

Pada tahap ini, sama halnya dengan model regresi linier berganda, juga dilakukan uji hipotesis pada analisis regresi data panel menggunakan uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk menganalisis apakah pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen bersifat signifikan atau tidak, dengan kriteria penilaian jika nilai probabilitas dari suatu variabel independen lebih kecil dari α (0,05) maka dinyatakan bahwa variabel independen tersebut secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Gujarati, 2016; Widarjono, 2013). Sementara itu, uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan dari semua variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan kriteria penilaian yaitu jika nilai probabilitas yang diperoleh keseluruhan variabel independen lebih kecil dari α (0,05) maka dinyatakan semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan atas variabel dependen (Basuki & Prawoto, 2016; Gujarati, 2016).

Pada tahap ini juga dianalisis nilai koefisien determinasi (R^2) yang berfungsi mengidentifikasi besaran kemampuan ketiga variabel independen (yaitu: upah minimum, Kemiskinan dan pengangguran) yang dibahas dalam penelitian ini untuk menjelaskan variasi naik turunnya derajat IPM. Model dikatakan baik apabila nilai R^2 mendekati angka 1; namun sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 dan mendekati angka 0 maka model dikatakan kurang baik (Gujarati, 2016).

HASIL ANALISIS

Hasil Pemilihan Model

Langkah pertama dalam analisis regresi data panel melakukan estimasi atas tiga model, yaitu CEM (*Common Effect Model*), FEM (*Fixed Effect Model*), dan REM (*Random Effect Model*), sehingga bisa dilakukan pemilihan model yang paling tepat bagi proses analisis penelitian ini. Tabel 1 memuat hasil estimasi pemilihan model. Pada Tabel 1 diperoleh bahwa hasil estimasi untuk masing-masing model CEM, FEM dan REM, mempunyai nilai signifikansi yang berbeda.

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemilihan model yang paling tepat. Untuk pemilihan tahap pertama, yakni pemilihan antara model CEM dengan model FEM, digunakan Uji Chow. Hasil uji Chow pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Cross-section Chi-square* yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari α (0,05). Dengan demikian dinyatakan pemilihan model yang dianggap paling tepat adalah model FEM.

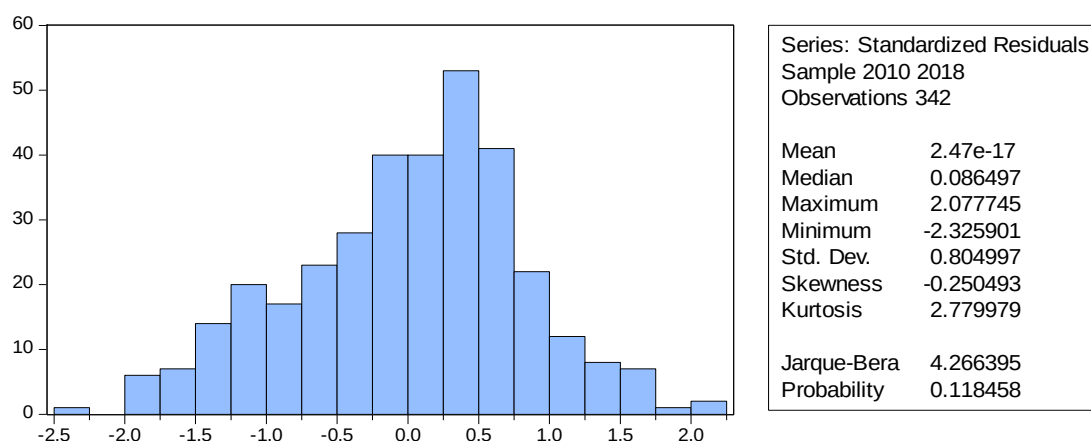
Pengujian kedua dijalankan dengan menggunakan uji Hausman, yaitu dalam menentukan model yang dianggap paling tepat antara model FEM dan model REM. Hasil dalam Tabel 1 menunjukkan nilai probabilitas dari uji Hausman adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari α (0,05). Hasil ini menunjukkan model paling tepat berdasarkan hasil uji Hausman adalah model FEM.

Dalam pemilihan model pada regresi data panel seharusnya dilakukan sebanyak tiga tahapan, yakni uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Tetapi karena pada tahapan uji Chow dan uji Hausman telah menunjukkan bahwa pemilihan model yang tepat adalah model FEM, maka uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan lagi.

Tabel 1. Hasil Estimasi dan Pemilihan Model

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	t-Statistic	Prob.	t-Statistic	Prob.	t-Statistic	Prob.
Upah minimum	6,982617	0,0000	25,78358	0,0000	25,38463	0,0000
Kemiskinan	7,085384	0,0000	-1,753223	0,0806	-0,903731	0,3668
Pengangguran	-18,79452	0,0000	-8,043941	0,0000	-10,41204	0,0000
Pemilihan Model						
Uji Chow	Effects Test		Statistic		d.f.	Prob.
	Cross-section F		110,644367		(37.301)	0,0000
	Cross-section Chi-square		916,928163		37	0,0000
Uji Hausman	Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
	Cross-section random		49,593060	3	0,0000	

Sumber: Data diolah, 2020.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah, 2020.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pertama yang dilakukan yaitu uji normalitas, dengan menggunakan uji *Jaque-Bera*. Berdasarkan hasil uji normalitas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,118. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi (α) sebesar 0,05 maka dinyatakan bahwa residual di dalam model penelitian ini adalah terdistribusi secara normal.

Uji asumsi klasik kedua adalah uji multikolinieritas, yang dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya

varians yang konstan dari terbentuknya model. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 2 diperoleh nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 0,80. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data dari semua variabel yang dianalisis dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji asumsi klasik ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dimana hasil olah data yang diperoleh dirangkum dalam Tabel 3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari kesemua variabel bebas yaitu lebih besar dibandingkan α (0,05). Hasil ini menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas

dalam model penelitian ini, atau bahwa tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik yang terjadi pada model, sehingga dapat dilakukan analisis data panel tahap berikutnya.

Hasil Interpretasi Model

Dalam tahap uji pemilihan model, telah diperoleh hasil uji Chow dan uji Hausman bahwa model yang dianggap paling tepat dalam bahasan penelitian ini adalah model FEM (*Fixed Effect Model*). Karenanya pada

tahap interpretasi model dilakukan proses estimasi model menggunakan FEM.

Berdasarkan hasil estimasi model FEM yang dirangkum dalam Tabel 4, dengan memperhatikan nilai koefisien dari masing-masing variabel, maka didapatkan persamaan model bagi penelitian ini sebagai berikut:

$$IPM = 67,852 + 2,82 \text{ Upah Minimum} - 0,085 \text{ Kemiskinan} - 0,235 \text{ Pengangguran}$$

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

	Upah minimum	Kemiskinan	Pengangguran
Upah minimum	1,000000	0,159171	-0,301175
Kemiskinan	0,159171	1,000000	-0,396720
Pengangguran	-0,301175	-0,396720	1,000000

Sumber: Data diolah, 2020.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.552504	0.142875	3.867038	0.0001
Upah minimum	5.47E-08	4.55E-08	1.203498	0.2296
Kemiskinan	-0.001215	0.018005	-0.067472	0.9462
Pengangguran	0.001663	0.005428	0.306345	0.7595

Sumber: Data diolah, 2020.

Tabel 4. Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67,85210	0,503509	134,7586	0,0000
Upah minimum	2,82E-06	1,09E-07	25,78358	0,0000
Kemiskinan	-0,085576	0,048811	-1,753223	0,0806
Pengangguran	-0,235821	0,029317	-8,043941	0,0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

<i>R-squared</i>	0,979756	<i>Mean dependent var</i>	68,37269
<i>Adjusted R-squared</i>	0,977066	<i>S.D. dependent var</i>	5,657790
<i>S.E. of regression</i>	0,856817	<i>Akaike info criterion</i>	2,640882
<i>Sum squared resid</i>	220,9749	<i>Schwarz criterion</i>	3,100610
<i>Log likelihood</i>	-410,5908	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	2,824025
<i>F-statistic</i>	364,1912	<i>Durbin-Watson stat</i>	0,440020
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000000		

Sumber: Data diolah, 2020.

Interpretasi atas model atau persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut. Nilai konstanta menyatakan bahwa nilai IPM adalah sebesar 67,862 jika ketiga variabel independen (upah minimum, kemiskinan dan pengangguran) tidak mengalami perubahan nilai atau bersifat konstan. Selanjutnya, diperoleh koefisien regresi dari variabel upah minimum bernilai positif yang diinterpretasikan bahwa arah pengaruh dari variabel independen ini bersifat searah terhadap variabel dependen. Atau, bahwa jika besaran upah minimum yang diberikan kepada pekerja mengalami kenaikan maka nilai IPM juga akan mengalami kenaikan; sebaliknya, jika besaran upah minimum yang diperoleh pekerja mengalami penurunan maka nilai IPM akan mengalami penurunan pula.

Kondisi yang berbeda teridentifikasi berdasarkan model regresi dari penelitian ini dimana diperoleh koefisien regresi baik dari variabel kemiskinan maupun variabel pengangguran adalah bernilai negatif, yang diinterpretasikan bahwa arah pengaruh dari kedua variabel independen ini bersifat berlawanan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, bahwa jika tingkat kemiskinan atau derajat pengangguran suatu daerah mengalami kenaikan maka akan menyebabkan nilai IPM yang dicapai daerah tersebut mengalami penurunan; sebaliknya, jika tingkat kemiskinan ataupun derajat pengangguran yang dialami suatu daerah mengalami penurunan maka nilai IPM yang dicapai daerah itu akan mengalami kenaikan.

Lebih jauh, berdasarkan Tabel 4, dapat diidentifikasi apakah pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen bersifat signifikan atau tidak signifikan. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) atas upah minimum menyatakan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, karena nilai probabilitas yang diperoleh lebih

kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, hasil analisis ini menyatakan hipotesis pertama yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu bahwa upah minimum yang berlaku di suatu daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai IPM pada daerah tersebut dapat dibuktikan secara empiris.

Berikutnya, hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) atas kemiskinan menyatakan bahwa variabel independen ini memiliki pengaruh yang bersifat tidak signifikan terhadap IPM, karena nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α ($0,0806 > 0,05$). Dengan demikian, hasil analisis ini menolak secara empiris atas hipotesis kedua yang dimunculkan dalam penelitian ini karena hasil yang teridentifikasi menyatakan bahwa tingkat kemiskinan yang dialami suatu daerah berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan atas capaian IPM pada daerah itu.

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) mengenai pengangguran menyatakan variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, karena nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Hasil analisis ini karenanya membuktikan hipotesis ketiga yang dimunculkan dalam penelitian ini secara empiris, yaitu bahwa derajat pengangguran yang dialami suatu daerah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai IPM yang dicapai oleh daerah yang bersangkutan.

Terakhir, hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) yang terangkum dalam Tabel 4 menunjukkan pengaruh dari ketiga variabel independen secara keseluruhan memiliki sifat signifikan atas IPM, karena nilai probabilitas F yang diperoleh lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sebagai tambahan, berdasarkan Tabel 4 juga diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,9771 yang menyatakan interpretasi bahwa kemampuan dari ketiga variabel independen yang dianalisis pada penelitian ini dalam menjelaskan varians yang terjadi atas capaian

nilai IPM adalah sebesar 97,71%; selebihnya sebesar 2,29% menyatakan bahwa fluktuasi nilai IPM juga dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain tidak dianalisis dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil analisis menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Hal ini berarti kenaikan kebijakan pemerintah dalam menaikkan upah minimum akan mempunyai dampak positif pada peningkatan pendapatan dalam masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2015). Dampak dari kenaikan pendapatan yang ada di masyarakat tersebut akan berdampak pula pada kemudahan akses dari sisi pendidikan, kesehatan serta perekonomian yang dilakukan masyarakat (Ningrum, 2017; Marta, 2019). Dengan demikian, penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa kenaikan atas upah minimum dapat berdampak kepada kenaikan kualitas hidup masyarakat yang berujung pada kenaikan nilai IPM pada daerah atau wilayah tersebut.

Faktor kemiskinan berdasarkan hasil penelitian ini terbukti memiliki arah pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia itu sendiri, namun pengaruh itu tidak bersifat nyata atau secara langsung. Hasil dari penelitian ini mendukung temuan yang diperoleh Jasasila (2020) bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM. Di sisi lain, hasil penelitian ini menentang argumen empiris milik Ningrum *et al.* (2020) yang menyatakan kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Begitu pula, hasil penelitian ini tidak mendukung temuan-temuan empiris terdahulu milik Arizal & Marwan (2019), Sinuraya (2020), Tarumingkeng *et al.* (2019)

serta Umiyati *et al.* (2017) yang memperoleh bahwa kemiskinan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian, hasil ini secara empiris mengidentifikasi bahwa semakin tinggi angka kemiskinan pada suatu wilayah maka akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat IPM di wilayah tersebut; akan tetapi pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat kemiskinan tersebut bersifat tidak langsung atas IPM. Karenanya, dibutuhkan bentuk-bentuk instrumen kebijakan pemerintah lainnya yang berfungsi sebagai pendukung upaya mengurangi serta menurunkan level angka kemiskinan yang mutlak dibutuhkan.

Selanjutnya, penelitian ini memperoleh temuan hasil bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan atas IPM. Nilai koefisien dalam persamaan regresi yang didapat menunjukkan tanda negatif, dimana mengandung arti bahwa terdapat hubungan yang terbalik antara pengangguran terhadap IPM; atau bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran maka akan berdampak pada penurunan angka indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini memperluas temuan empiris terdahulu milik Meydiasari & Soejoto (2017), Baeti (2013), Hamzah *et al.* (2012), Ningrum *et al.* (2020), Arizal & Marwan (2019), Sinuraya (2020), serta Syofya (2018).

Hasil penelitian ini lebih jauh memberi penjelasan bahwa tingkat pengangguran pada tiap-tiap daerah pengangguran seharusnya diturunkan dalam upaya meningkatkan level kualitas hidup dari masyarakat. Kebijakan mengurangi angka pengangguran dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuka lapangan pekerjaan, melaksanakan program pembangunan padat karya, serta mempermudah iklim investasi di daerah; dan di sisi lain, diperlukan juga peningkatan kualitas keterampilan yang terdapat di dalam masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Temuan akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik upah minimum, kemiskinan maupun pengangguran secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM. Hasil ini menjelaskan bahwa pihak pemerintah daerah secara khusus dapat menjalankan strategi peningkatan IPM di daerahnya melalui penekanan pada ketiga faktor tersebut. Argumen ini didukung oleh temuan koefisien determinasi pada penelitian ini bahwa ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi sangat besar dalam mempengaruhi derajat variabilitas pergerakan nilai IPM.

SIMPULAN

Hasil-hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, baik upah minimum, kemiskinan maupun pengangguran, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Namun secara parsial, upah minimum memiliki pengaruh yang bersifat positif (searah) dan signifikan, kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif (berlawanan) tetapi tidak signifikan, dan pengangguran memiliki pengaruh yang negatif (berlawanan) dan signifikan, terhadap IPM.

Hasil penelitian ini diekspektasikan bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ekonomi sosial kemasyarakatan di setiap daerah. Kebijakan masing-masing daerah dalam permasalahan perekonomian tidak seharusnya berorientasi masih kepada kebijakan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi secara makro saja, tetapi juga diperlukan kebijakan yang dapat langsung menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Di antara bentuk kebijakan itu tentunya dengan menerapkan kebijakan yang tepat terkait penetapan upah minimum, penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Dengan penerapan bentuk kebijakan yang tepat tersebut nantinya

akan berdampak kepada peningkatan kualitas pembangunan manusia (IPM) di daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Rekomendasi yang diberikan untuk penelitian berikutnya adalah diharapkan menggunakan model pendekatan melalui variabel-variabel independen yang berbeda, penggunaan metode analisis data yang bervariasi, serta periode penelitian yang lebih panjang. Dengan usaha ini dinilai akan memberikan temuan empiris yang lebih akurat, lebih 'kaya', serta mendalam atas kondisi riil yang berlaku.

REFERENSI

- Amalia, R. Y., Fauziah, S., & Wahyuningsih, I. (2019). Pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 33–46. doi: 10.29244/jam.7.1.33-46.
- Ariza, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dalam perspektif Islam. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 1–21. doi: 10.24260/almaslahah.v12i1.348.
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. doi: 10.24036/jmpe.v2i3.7414.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85-98. doi: 10.15294/edaj.v2i3.1984.
- Baltagi, B. H. (2013). *Econometrics analysis of panel data* (5th ed). Wiley.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis*. PT. RajaGrafindo Persada.

- BPS Provinsi Jawa Timur. (2020). *Provinsi Jawa Timur dalam angka 2020*. Surabaya.
- Croissant, Y., & Millo, G. (2008). Panel data econometrics in R: The plm package. *Journal of Statistical Software*, 27(2), 1-42. doi: 10.18637/jss.v027.i02.
- Gujarati, D. N. (2016). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi Ketiga). Salemba Empat.
- Hamzah, M. Z., Risqiani, R., & Sofilda, E. (2012). Human development quality and its problems in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 5(7), 29-36. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2192206.
- Hatta, R., & Khoirudin, R. (2020). Analisis tingkat kemiskinan di Propinsi NTT: Pendekatan dua panel. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 138-150. doi: 10.33059/jseb.v11i2.2004.
- Heka, A. J. L. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *EFISIENSI*, 17(1), 206-217. Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/16658>.
- Jasasila, J. (2020). Pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Batanghari 2011-2019. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 40-44. doi: 10.33087/eksis.v11i1.192.
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Forum Ekonomi*, 18(2), 130-140. doi: 10.29264/jfor.v18i2.863.
- Marta, J., Fauzi, A., Juanda, B., & Rustiadi, E. (2019). *Migrasi desa-kota di Indonesia: Keputusan, pola dan perilaku serta konsekuensi*. Retrieved from: <https://202.124.205.241/handle/123456789/103346>.
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 1(2), 116-126. doi: 10.26740/jpeka.v1n2.p116-126.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51-69. doi: 10.24815/jped.v3i1.6993.
- Nasution, L. N. (2019). Kajian tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pasca pemekaran. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(1), 13-20. doi: 10.30596/ekonomikawan.v19i1.3235.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 6(2), 212-222. doi: 10.29040/jiei.v6i2.1034.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192. doi: 10.22219/jep.v15i2.5364.
- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *SOROT*, 15(1), 55-63. doi: 10.31258/sorot.15.1.55-63.
- Nugraha, D. P. (2020). Kemiskinan di Kota Bengkulu, apa penyebabnya? *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*, 20(1), 31-37. doi: 10.20961/jiep.v20i1.35514.

- Palenewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52-61. Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20950>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*. Jakarta.
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). Studi faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 106-118. Retrieved from: <http://files/853/Sartika et al. - 2016 - Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat.pdf>.
- Sinuraya, M. B. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah, kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. *JEpa*, 5(2), 217-223. Retrieved from: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/909>.
- Sriyana, J. (2015). *Metode regresi data panel*. Ekonesia.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi teori pengantar* (Edisi ketiga). PT. Raja Grafindo Persada.
- Syofya, H. (2018). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 177-185. doi: 10.31849/jieb.v15i2.1153.
- Tarumingkeng, W. A., Rimate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2018). Pengaruh belanja modal dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82-95. doi: 10.35794/jpekd.32728.19.2.2018.
- Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(1), 29-37. doi: 10.22437/jssh.v1i1.3764.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.



Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah terhadap Eksternalitas Sampah Plastik Di Kota Jayapura

The Impact of Government Policies Implementation on Plastic Waste Externalities in Jayapura City

Christina Irwati Tanan¹⁾, Jimmi Ari Duri²⁾, Dwi Utari Tamanbali³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi, Universitas Ottow Geissler, Papua

e-mail korespondensi: christinatanan06@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 07 November 2020 Disetujui: 21 Maret 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura selama tahun 2017-2020. Penelitian ini dilakukan di Kantor Lingkungan dan Kebersihan. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian ini melibatkan 230 responden masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kebijakan pemerintah Kota Jayapura tentang pengelolaan sampah plastik telah mampu menekan jumlah sampah plastik. Namun demikian, masih banyak dari anggota masyarakat yang menilai Pemprov belum sepenuhnya mampu menekan jumlah sampah plastik, serta percaya kebijakan tersebut tidak mampu mengurangi sampah plastik di kota. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diharapkan kebijakan ini juga dapat diterapkan di pasar tradisional sehingga bisa semakin mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengurangi sampah plastik di Kota Jayapura. Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Pemerintah, Kota Jayapura.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.2848	
<i>Cara Mensitasi :</i> Tanan, C. I., Duri, J. A., & Tamanbali, D. U. (2021). Dampak penerapan kebijakan pemerintah terhadap eksternalitas sampah plastik di Kota Jayapura. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 228-241. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2848.	

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 07 November 2020 Accepted: 21 March 2021 Published: July 2021	<i>This study aims to determine government policies and their impact on plastic waste management in Jayapura City in 2017-2020. The study was conducted at the Environmental and Cleanliness Office. Using qualitative data analysis methods, the study involved 230 community respondents. The results indicate that the majority of the public consider the Jayapura City government's policy on plastic waste management to have been able to reduce the amount of plastic waste. However, there are still many community members who think that the provincial government has not been able to fully reduce the amount of plastic waste, and believe that the policy is not able to reduce plastic waste in the city. Based on the results obtained, it is hoped that this policy can also be applied in traditional markets so that it can further reduce the use of plastic bags and reduce plastic waste in Jayapura City.</i> Keywords: Plastic Waste, Government Policies, Jayapura City.
<i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.2848	
<i>How to cite :</i> Tanan, C. I., Duri, J. A., & Tamanbali, D. U. (2021). Dampak penerapan kebijakan pemerintah terhadap eksternalitas sampah plastik di Kota Jayapura. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 228-241. doi: 10.33059/jseb.v12i2.2848.	

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Kota Jayapura bahwa pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kota Jayapura, diperkirakan 1 atau 2 ton sampah dalam satu hari diangkut pada pembuangan akhir (TPA) (Ramah, 2017). Adanya kebijakan mengenai pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dapat mengurangi pemakaian plastik (Putri, 2019).

Andrawina *et al.* (2019) memperoleh hasil riset bahwa 85,42 persen diantaranya bersedia mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik, dan 40 persen diantaranya berpartisipasi dalam kebijakan plastik terutang. Sementara itu, Utcha & Chavalparit (2019) meneliti bahwa Thailand telah menetapkan Strategi 3R Nasional serta Rencana Induk Nasional Pengelolaan Sampah (2016-2021), selain juga meluncurkan “Rencana Pengelolaan Sampah Plastik 2017-2021”, yang terdiri dari beberapa pendekatan.

Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas negatif dari adanya penggunaan plastik di masyarakat sebagai akibat dari kegiatan ekonomi produsen dan konsumen yang mengakibatkan munculnya dampak negatif. Hal ini karena eksternalitas sampah plastik terjadi karena besarnya penggunaan plastik di masyarakat padahal ketergantungan pada plastik sekali pakai berdampak buruk bagi lingkungan dan manusia, karena mencemari lingkungan juga menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Dengan adanya bahaya yang timbul dari penggunaan plastik maka pemerintah berupaya melalui kebijakan dan programnya untuk mengurangi penggunaan plastik sehingga menurunkan sampah plastik.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah eksternalitas sampah plastik baik melalui kebijakannya, program bank sampah yang dilakukan di

masyarakat bahkan pelatihan daur ulang sampah plastik yang berhubungan dengan pengelolaan sampah plastik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi masalah sampah plastik, seperti program pemerintah dalam menurunkan sampah plastik, melakukan pengolahan sampah berupa kegiatan daur ulang serta larangan menggunakan kantong belanja plastik, strategi tanpa sampah, dan *recycling strategy* yang ditujukan kepada perilaku manusia untuk mengurangi limbah (Willis *et al.*, 2018).

Salah satu regulasi Pemerintah Kota Jayapura untuk menurunkan sampah plastik dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota No. 1 tahun 2019 mengenai penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura. Penerapan peraturan ini efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019 (Tanan & Duri, 2021). Sampai dengan saat ini upaya ini belum sepenuhnya mengurangi penggunaan plastik di masyarakat. Muslihun *et al.* (2020) menemukan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar mendapat dukungan dari pemerintah daerah, pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun konsumen mengetahui dan telah mendukung kebijakan ini, namun dalam kenyataannya tidak banyak mengubah pola perilaku dari konsumen.

Perencanaan dan kebijakan pemerintah atas masalah sampah plastik karenanya perlu dievaluasi untuk menganalisis dampaknya di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada upaya memahami bagaimana kebijakan pemerintah serta menganalisis dampak akibat penerapan kebijakan pemerintah tersebut terhadap eksternalitas sampah plastik di Kota Jayapura. Persoalan ini dinilai penting karena menjadi studi kasus mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah dan pengelolaan sampah plastik, khususnya wilayah di Kota Jayapura.

Eksternalitas (Dampak sampingan)

Eksternalitas adalah kegiatan yang bisa berpengaruh pada tingkat kesejahteraan orang atau pihak lain. Untuk itu dapat diukur atau dinilai dengan uang, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam harga produk yang dihasilkan. Eksternalitas dapat timbul karena adanya kegiatan seseorang yang berdampak pada orang lain (sekumpulan atau sekelompok orang lain), tetapi tidak memperoleh kompensasi ataupun balas jasa, sehingga hal ini dapat mengakibatkan atau berdampak pada inefisiensi pada alokasi faktor produk (Mangkoesoebroto, 2016).

Menurut Prasetyia (2012), eksternalitas ada karena variabel dependen berupa adanya pelaku ekonomi tertentu mengganggu fungsi utilitas (fungsi kegunaan) terhadap pelaku ekonomi lain. Kegiatan produksi suatu barang efeknya dapat memperoleh manfaat atau biaya dimana belum diperhitungkan proses produksi dari barang yang dihasilkan, karena adanya mekanisme pasar tidak dimasukan dalam semua biaya atau manfaat sosial.

Salah satu contoh eksternalitas negatif adalah pembuangan kemasan makanan dan minuman (seperti: plastik, botol-botol plastik) secara begitu saja sehingga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kemasan yang sudah habis masa pakainya saat ini merupakan salah satu masalah lingkungan utama karena waktu penggunaan yang singkat (Ciuffi *et al.*, 2020).

Masalah Pengelolaan Sampah Plastik

Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), antara 22 hingga 43 persen plastik yang dipergunakan dibuang pada tempat pembuangan sampah yang ada. Demikian juga, diperkirakan 10 hingga 20 juta ton sampah plastik mengakibatkan pencemaran di lautan setiap tahunnya (Muryono, 2018). Walaupun belum didapatkan adanya data yang pasti atau akurat tentang seberapa besar jumlah pencemaran sampah plastik di

Indonesia, KLHK menyatakan sampah plastik dari 100 toko/gerai anggota ASPRINDO selama kurun waktu satu tahun menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Menurut pihak Indonesia Solid Waste Association (InSWA), produksi sampah plastik yang ada di Indonesia diperkirakan sebanyak 5,4 juta ton per tahun (Yuliyah, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan sebagai kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilaku, yang mempengaruhi kelangsungan mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Siahaan, 2004). Pengelolaan sampah di Indonesia sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah di Indonesia (Astuti, 2018).

Berbagai cara telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah pencemaran sebagai akibat dari sampah plastik. Salah satu cara adalah daur ulang, yaitu proses dengan membuat bahan bekas pakai yang dapat menghasilkan bahan yang baru. Kegiatan mendaur ulang dianggap dapat mengurangi atau menurunkan jumlah sampah plastik yang tidak dimanfaatkan. Cara lain yaitu penggunaan alat incinerator pada pusat-pusat incinerator yang berlokasi di luar kota, dimana sampah plastik dapat dimusnahkan dengan cara dibakar. Cara ini dapat mengatasi pengurangan bahan plastik dalam volume besar, serta dapat menekan tingkat ketergantungan atas plastik yang berlebihan.

Pemerintah di sejumlah negara maju dan berkembang telah membuat pelarangan ataupun pembatasan produk plastik dengan melarang pembuatan atau produksi dan penjualan kantong plastik. Pada saat kegiatan berbelanja, masyarakat disarankan memakai

tas kertas atau tas berbahan kain lainnya, seperti rami, katun, atau bahan lainnya yang ramah lingkungan.

Palugaswewa (2018) meneliti kebijakan pemerintah Sri Lanka yang telah menetapkan berbagai alternatif sebagai pilihan untuk memajukan sistem pengelolaan limbah atau sampah di negaranya. Beberapa upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kebijakan, strategi, juga pedoman penetapan peraturan, dan juga menyediakan fasilitas infrastruktur untuk dapat dipergunakan dalam pengelolaan limbah atau sampah. Olusunmade (2019) dalam studinya menemukan bahwa meskipun hampir 50 persen dari populasi yang diteliti mengaku sadar akan bahaya limbah plastik, tapi masih terdapat ketidakpedulian dalam cara penanganan limbah ini, seperti yang dapat diamati dari pembuangan limbah secara sembarangan, menciptakan sampah di sekitar lingkungan.

Di wilayah China, diperkirakan 111 juta metrik ton sampah plastik akan dipindahkan dengan kebijakan baru oleh pemerintah negara tersebut pada tahun 2030 (Brooks *et al.*, 2018). Dari kasus negara China tersebut dipahami bahwa diperlukan ide dan tindakan global untuk mengurangi jumlah bahan yang tidak dapat didaur ulang, yaitu dengan mendesain ulang. Khan *et al.* (2019) dalam studinya menemukan bahwa level konsumsi plastik telah meningkat secara global, yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar dan menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Kebijakan daur ulang sampah plastik karenanya dinilai bisa membantu mengurangi sampah dan ancaman lingkungannya.

Kebijakan Pemerintah terhadap Masalah Sampah Plastik

Masalah sampah sudah menjadi masalah serius yang ditangani Pemerintah Indonesia (Septiadi, 2018). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional (Jakstranas). Peraturan tersebut juga termasuk sampah plastik di laut dimana regulasi yang ada bersifat lebih ketat dan spesifik. Peraturan ini diperlukan sebagai pedoman strategi jangka panjang dalam penanganan pencemaran plastik laut di Indonesia, dan analisis yang tepat mengenai dampak regulasi tersebut terhadap pemangku kepentingan dan pihak yang terkena dampak juga akan diperlukan (Prisandani & Amanda, 2019).

Pembudayaan hidup ramah lingkungan melalui kebijakan kantong plastik berbayar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menurunkan masalah yang disebabkan oleh sampah plastik (Novianti & Kartika, 2017). Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di pasar modern dan pusat perbelanjaan serta resmi diterapkan dalam masyarakat di Kota Jayapura mulai tanggal 1 Februari 2019. Larangan penggunaan kantong plastik ini berdasarkan Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1/2019, tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura. Sebenarnya pada tahun 2016–2017 penerapan larangan penggunaan kantong plastik telah mulai diberlakukan dengan menerapkan penggunaan kantong plastik berbayar maupun kantong plastik yang ramah lingkungan di tempat pusat perbelanjaan di Kota Jayapura, yang diharapkan menjadi satu solusi dalam menurunkan sampah plastik di kota itu.

Pembatasan sampah sejak awal membutuhkan pemberdayaan masyarakat dan juga kebijakan strategis yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui pembinaan kepada pihak masyarakat, juga dengan penerapan kemajuan teknologi terkini (Yustikarini *et al.*, 2017).

Program Bank Sampah merupakan penerapan upaya kebijakan dengan mendaur ulang sampah menyediakan fasilitas dan sosialisasi pengolahan sampah. Perpaduan kebijakan fiskal insentif dan disinsentif dapat menekan jumlah sampah plastik menjadi berkurang (Purwoko & Wibowo, 2018; Wanda, 2019). Kebijakan pemerintah dalam program pengelolaan sampah melalui bentuk keterlibatan keaktifan masyarakat dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah, jejaring pengolahan sampah mandiri dan mobil hijau (Mulasari *et al.*, 2014). Studi milik Fangga & Mulasari (2016) menemukan situasi adanya kelompok masyarakat yang secara aktif mengelola sampah rumah tangga dan selanjutnya mendapatkan insentif dari Pemerintah Bantul. Temuan riset Maolani & Ishak (2018) memperoleh fakta program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dili melalui sejumlah program seperti penyuluhan lingkungan terkait pengelolaan sampah, menyediakan bak sampah di setiap desa, proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara sampai kepada tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Wang *et al.* (2020) merekomendasikan beberapa hal. Pertama, peningkatan insentif atau denda dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pengumpul maupun pendaur ulang akan berpartisipasi dalam proses daur ulang. Kedua, bentuk insentif dukungan kebijakan bisa mendorong pengumpul dan pendaur ulang untuk berpartisipasi dalam daur ulang sampah plastik lebih awal daripada insentif subsidi. Terakhir, pendaur ulang berperilaku lebih sensitif daripada kolektor terhadap hukuman yang diberlakukan pemerintah.

Pengelolaan sampah karenanya adalah bentuk tanggungjawab bersama yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah plastik yang bertujuan mengurangi volume sampah plastik itu membutuhkan keterlibatan

bersama antara pemerintah dan masyarakat secara aktif. Upaya-upaya yang bisa dijalankan seperti melalui program bak sampah, penyediaan fasilitas, atau kombinasi kebijakan fiskal insentif dan disinsentif. Sejumlah upaya ini perlu diupayakan demi memberikan manfaat berupa lingkungan menjadi bersih, asri dan nyaman, dan juga mendatangkan manfaat ekonomi.

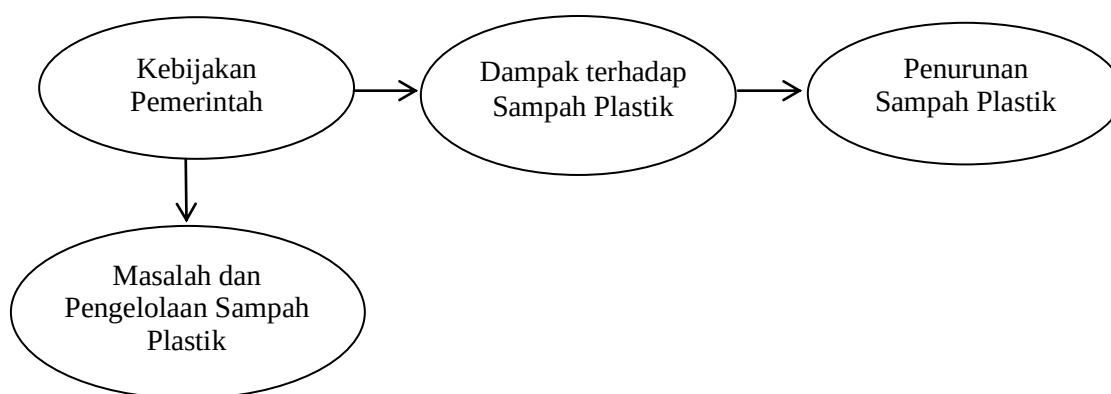
Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah Plastik

Program Bank Sampah memberikan dampak positif baik kepada masyarakat maupun lingkungan. Hal ini dinilai sangat membantu pemerintah berkenaan dengan upaya menurunkan volume sampah (Saputri, 2015). Namun demikian, toko ritel modern tidak merasakan dampak perubahan yang nyata dalam aspek ekonomi dengan adanya kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan (Saraswaty, 2018). Bentuk dampak negatif yang muncul adalah karena TPA mendapatkan beban sampah yang paling besar sebagai lokasi ujung akhir pengelolaan sampah. Penanggulangan dampak dari pencemaran seperti biaya pengolahan limbah, biaya pengumpulan dan pembuangan sampah (eksternalitas negatif) dilakukan melalui pengenaan cukai pada produk plastik.

Untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sampah plastik di daerah diperlukan peraturan pemerintah, fasilitas pendukung, serta keterlibatan aktif semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan sampah plastik yang ada di lingkungan dan sampai di TPA. Widiantera (2020) menemukan penetapan Peraturan Gubernur Bali tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai telah ditanggapi secara positif oleh banyak pihak seperti penggiat dan komunitas lingkungan, maupun berbagai komponen masyarakat lainnya.

Regulasi untuk pengelolaan sampah plastik laut, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut, dan masyarakat Indonesia telah berperan aktif dalam mengurangi sampah plastik (Prisandani & Amanda, 2019). Bai *et al.* (2018) menyarankan untuk memperkuat tata kelola dan pengendalian sampah plastik pada kegiatan perikanan pesisir di wilayah ang bersangkutan guna upaya mengurangi jumlah

sampah plastik di laut. Lebih jauh, tantangan yang muncul dalam pengelolaan limbah selama dan setelah pandemi yaitu perlunya sistem pengelolaan sampah yang responsif secara dinamis, serta disarankan untuk mengurangi potensi dampak pandemi pada sistem dalam pengelolaan limbah (Klemeš *et al.*, 2020).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah penulis, 2020.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah pembeli atau konsumen di pasar retail modern di Kota Jayapura. Selanjutnya, sampel mencakup 230 responden yang dipilih menggunakan teknik *accidental sampling* (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan baik data primer maupun data sekunder (Hardani *et al.*, 2020). Data primer dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner dimana para responden diminta memberikan respon persepsi atas pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai kebijakan pemerintah tentang sampah plastik di Kota Jayapura dan dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap upaya mengatasi masalah sampah plastik di Kota Jayapura. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer pendukung yang diharapkan mempertegas persepsi para responden tersebut terhadap fenomena yang dianalisis. Teknik observasi

juga digunakan untuk melengkapi data primer dengan melihat dan mencermati secara langsung perkembangan kebijakan dari pemerintah terhadap masalah sampah plastik dari tahun ke tahun yang diteliti. Berikutnya, data sekunder diperoleh melalui upaya menelaah dokumen dan laporan yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Kota Jayapura terhadap masalah dan pengelolaan sampah plastik.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk memberikan deskripsi analisis tetapi bukan digunakan dalam membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2019). Data primer utama yang diperoleh melalui instrumen kuesioner pada para responden yang terdiri dari Ibu rumah tangga, pedagang atau wirausaha, PNS dan mahasiswa, akan dihitung nilai rata-rata untuk memperoleh gambaran persepsi mereka atas

permasalahan yang dibahas. Nilai rata-rata tersebut disajikan dalam bentuk grafik dan tabel, lalu dianalisis secara naratif.

HASIL ANALISIS

Kebijakan Pemerintah mengatasi masalah Sampah Plastik di Kota Jayapura

Perkembangan sampah di Kota Jayapura meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan masalah yang harus diselesaikan melalui peranan aktif pemerintah dan masyarakat. Perkembangan sampah perhari di Kota Jayapura ditunjukkan dalam Tabel 1. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa perkembangan sampah perhari dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,0 persen; sementara untuk periode tahun 2018 sampai 2019 terjadi peningkatan menjadi 4,0 persen; dan di tahun 2020 pada masa pandemi meningkat dari tahun 2019 menjadi 10 persen.

Berikutnya, hasil analisis lapangan yang dilakukan peneliti mengidentifikasi adanya sejumlah kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam upaya mengatasi masalah sampah plastik. Upaya-upaya itu berupa sejumlah aturan yang dikeluarkan sebagai berikut.

Kebijakan pertama adalah upaya merespon terbitnya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun No. S1230/PSLB3-PS/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang kebijakan penerapan plastik berbayar. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah munculnya keputusan mengenai uji coba kebijakan plastik berbayar yang hanya diterapkan di pasar ritel modern. Biaya yang diterapkan

adalah Rp. 200,- per kantong. Uji coba kebijakan plastik berbayar ini diterapkan sampai pada bulan Juni 2016.

Pemerintah Kota Jayapura juga melakukan sejumlah sosialisasi penerapan kebijakan kantong plastik melalui sejumlah leaflet yang disebarakan kepada SKPD (saat Musrenbag Distrik), di lingkungan sekolah, pada saat kegiatan kerja bakti, pada waktu memberikan pelayanan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapenda dan juga saat pelayanan di kantor-kantor yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah pada tahun 2018 yaitu Peraturan Walikota Jayapura Nomor 19 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Jayapura diterbitkan dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah Kota Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya mengeluarkan Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura. Peraturan atau instruksi ini diterapkan pada lingkup pasar modern (mall, toko retail, swalayan ataupun pusat pembelanjaan) yang ada di wilayah Kota Jayapura. Penerapan instruksi ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2019. Sejak diberlakukan aturan ini maka pasar modern tidak lagi menyediakan kantong plastik ketika pembeli membeli barang-barang di toko-toko di Kota Jayapura, sehingga pembeli akan membawa sendiri kantong alternatif pengganti kantong plastik ataupun membeli kantong alternatif yang dijual di toko-toko tersebut.

Tabel 1. Perkembangan Sampah per Hari di Kota Jayapura (Periode 2017-2020)

Tahun	Volume Sampah per Hari (ton)	Perubahan (%)
2017	292	-
2018	302	3,0
2019	313	4,0
2020	344,3	10,0

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura tentang Sampah Plastik (Periode 2016-2020)

Tahun	Dasar Kebijakan	Materi Kebijakan
2016	Surat Edaran No. SE-06/PSLB3-PS/2016	Pengurangan sampah plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis
2017	Surat Edaran N0.660.1/886/2016	Pengurangan penggunaan kantong plastik
2018	Peraturan Walikota Jayapura Nomor 19 Tahun 2018	Kebijakan dan strategi daerah Kota Jayapura dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
2019	Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019	Penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura

Sumber: Tanan & Duri, 2021.

Dalam mendukung penurunan sampah plastik di Kota Jayapura, terdapat juga dalam program Adipura, demikian juga adanya program Adiwiyata pada sekolah-sekolah di Kota Jayapura. Berkaitan dengan program pengolahan sampah plastik organik dan non organik, ada juga kebijakan daur ulang botol plastik dimana Pemerintah Kota Jayapura menyelenggarakan lomba membuat Pohon Natal dari botol plastik.

Demikian juga program Bank Sampah yang melibatkan kelompok masyarakat dalam tingkat RT/RW dengan mengumpulkan plastik, kertas dan almunium yang kemudian akan di jual kepada pengepul yang berlokasi di Abe dan Sentani; program “Kampung Iklim” untuk pengolahan sampah organik dan non organik; kebijakan pengolahan sampah plastik yang ditetapkan yaitu pemerintah sebesar 70 persen dan 30 persen dari masyarakat; serta, program membagikan

kantong belanja gratis dan botol minum gratis di pusat perbelanjaan. Pada kantor Walikota Kota Jayapura sudah diterapkannya larangan penyajian minuman dalam kemasan botol plastik.

Untuk mengetahui efektivitas penerapan aturan ini, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah terhadap penurunan volume sampah plastik di Kota Jayapura. Instruksi dari Walikota tentang larangan penggunaan kantong plastik, bagaimanapun, telah diterapkan di mall, supermarket ataupun ritel modern. Akan tetapi, instruksi ini belum diterapkan untuk lingkup pasar tradisional (Tanan & Duri, 2021). Rangkaian kebijakan pemerintah ini dapat ditunjukkan dalam Tabel 2 yang mengemukakan kebijakan pemerintah yang sudah diberlakukan atau diterapkan dalam mengatasi masalah dan pengelolaan sampah plastik.

Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi Masalah dan Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Jayapura

Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan plastik berbayar yang diterapkan maka Pemerintah Kota Jayapura menyebar poling kepada 1.000 orang anggota masyarakat. Hasil poling tersebut menyatakan bahwa 75,2 persen dari para responden tersebut menginginkan adanya penerapan harga plastik berbayar sebesar Rp. 200,- sampai Rp. 500,- per kantong; 12,7 persen menginginkan penerapan harga plastik berbayar sebesar Rp. 500,- sampai Rp. 600,- per kantong; 6,5 persen menginginkan penerapan harga plastik berbayar sebesar Rp. 750,- sampai Rp. 1.000,- per kantong; dan, 5,6 persen menginginkan penerapan harga plastik berbayar lebih besar dari Rp. 1.000,- per kantong.

Selain itu, juga dilakukan monitoring oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup terhadap penerapan kebijakan plastik berbayar di Kota Jayapura pada bulan Mei tahun 2016. Hasil monitoring penerapan kebijakan plastik berbayar di lingkup ritel modern ini dilakukan pada sejumlah toko, seperti Supermarket Saga Jayapura, Hypermart Jayapura, Supermarket Saga Abepura, Mega Abepura, Surya Jayapura, Gelael, Hypermart Abepura, Robinson Supermarket, Toko Aneka, dan sejumlah toko lainnya. Proses monitoring ini dijalankan selama masa penerapan program plastik berbayar selama 3 bulan.

Melalui proses monitoring tersebut terobservasi bahwa pelaksanaan kebijakan plastik berbayar ini mengalami sejumlah kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah plastik, adanya konsumen yang belum bersedia membayar Rp. 200,- untuk penggunaan plastik yang terbuat dari bahan *oxium*,

ataupun fakta bahwa tidak semua retail menggunakan plastik *biodegradable*.

Untuk mengatasi kendala-kendala itu, Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi dampak sampah plastik di Kota Jayapura. Demikian juga kegiatan daur ulang sampah plastik di masyarakat baik berupa pelatihan-pelatihan untuk dapat mengurangi sampah plastik di lingkungan masyarakat.

Implementasi terkait Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura efektif dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2019. Penerapan instruksi ini berdampak pada penurunan penggunaan kantong plastik belanja khususnya di pasar modern, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyediakan kantong belanja alternatif pada saat berbelanja. Lebih jauh, apabila dilihat dari dampak instruksi Walikota Jayapura terhadap sampah plastik maka penurunan sampah plastik dinilai sudah mengalami penurunan walaupun belum sepenuhnya signifikan. Hal ini karena kondisi penerapan peraturan yang dibuat pemerintah tersebut belum diterapkan di pasar tradisional.

Hasil analisis terhadap dampak dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan pihak pemerintah dalam mengatasi masalah dan pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura dapat dilihat melalui persepsi para anggota masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan 230 responden yang merupakan pembeli atau konsumen di sejumlah pasar modern yang tersebar di Kota Jayapura. Hasil penyebaran kuesioner atas para responden itu ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap masalah Sampah Plastik di Kota Jayapura

Persepsi Masyarakat	Jumlah (Orang)	Jumlah (%)
Menurunkan sampah plastik	74	32,0
Belum sepenuhnya menurunkan sampah plastik	98	43,0
Tidak menurunkan sampah plastik	58	25,0
Total Jumlah	230	100,0

Sumber: Tanan & Duri, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 diidentifikasi bahwa mayoritas anggota masyarakat (98 orang atau 43%) menilai bahwa berbagai kebijakan yang telah diupayakan Pemerintah Kota Jayapura belumlah mampu sepenuhnya menurunkan persoalan sampah plastik. Sebanyak 58 orang (25%) dari total responden menyatakan bahwa berbagai kebijakan Pemerintah Kota Jayapura tersebut tidak mampu menurunkan persoalan sampah plastik. Sementara 74 orang (32%) lainnya dari total responden berpendapat bahwa berbagai kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang telah dilakukan selama ini sudah mampu menurunkan persoalan sampah plastik di wilayah Kota Jayapura.

Berdasarkan sejumlah fakta di lapangan ini, seperti yang ditemui oleh Olusunmade (2019) dalam penelitiannya, meskipun hampir 50 persen dari populasi yang diteliti untuk penelitian tersebut mengaku sadar akan bahaya limbah plastik, akan tetapi masih terdapat perilaku ketidakpedulian dalam cara penanganan limbah plastik ini. Situasi ini dapat diamati dari cara pembuangan limbah secara sembarangan, sehingga menciptakan tumpukan sampah di sekitar lingkungan (Muslihun *et al.*, 2020). Konsumen masih terkesan cuek mengingat sampah kantong plastik sebagai prioritas sampah yang mendesak, sehingga kondisi ini membuat kebijakan pemerintah menjadi masih kurang efektif dalam mengubah perilaku konsumen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh maka diidentifikasi terdapat sejumlah kebijakan pemerintah terhadap masalah dan pengolahan sampah plastik yang telah diterapkan di Kota Jayapura. Hasil-hasil ini juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya milik Tanan & Duri (2021) yang menelaah tentang surat edaran Menteri Lingkungan Hidup, surat edaran, sosialisasi, Peraturan Walikota dan Instruksi Walikota.

Berdasarkan hasil telaah persepsi masyarakat diperoleh kebanyakan mereka menjawab bahwa kebijakan-kebijakan milik pemerintah belum secara keseluruhan mampu menurunkan persoalan sampah plastik. Dengan kata lain, adanya sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Jayapura dapat menurunkan masalah sampah plastik, tetapi belum maksimal atau belum sepenuhnya efektif. Pendapat para responden ini didukung alasan bahwa masih banyak ditemukan botol-botol plastik di saluran-saluran pembuangan air, apalagi pada saat musim hujan. Jawaban responden yang lain mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah mampu menurunkan sampah plastik karena terjadi penurunan penggunaan kantong belanja dan bahkan tidak lagi tersedianya kantong plastik di pusat perbelanjaan pada saat masyarakat berbelanja.

Jawaban responden selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat mengatasi persoalan sampah plastik dengan alasan masih ditemukan sampah

plastik serta masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Jawaban terakhir ini senada dengan hasil penelitian milik Muslihun *et al.* (2020) yang mengidentifikasi bahwa kebijakan yang diberlakukan masih kurang efektif untuk memperbaiki kebiasaan konsumen.

Berdasarkan hasil persepsi masyarakat tersebut bila dikaitkan dengan volume sampah plastik di wilayah Kota Jayapura maka bukan saja dibutuhkan peran kebijakan pemerintah, tetapi juga kesadaran aktif dari masyarakat untuk bersedia membuang sampah pada tempatnya dan juga dapat mengelolanya menjadi sampah bernilai ekonomis. Menurut Andrawina *et al.* (2019), masyarakat seharusnya berperan aktif menjadi pengambil inisiatif dikarenakan mereka adalah penghasil utama sampah plastik. Sehingga berdasarkan hasil kuisisioner itu dinyatakan bahwa masyarakat lebih dominan dengan jawaban bahwa adanya kebijakan Pemerintah Kota Jayapura terhadap masalah sampah plastik di Kota Jayapura adalah sudah mampu menurunkan volume sampah plastik tetapi belum sepenuhnya mengatasi permasalahan tersebut.

Kondisi ini dinilai terutama karena instruksi dari Walikota berkenaan dengan larangan penggunaan kantong plastik di Pasar modern masih belum sepenuhnya mengatasi masalah sampah plastik di Kota Jayapura. Untuk itu diperlukan tindak lanjut terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkan, misalnya dengan merujuk saran Khan *et al.* (2019) agar pihak pemerintah pusat maupun daerah berupaya meningkatkan program daur ulang sampah baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sebagai upaya mengatasi persoalan sampah plastik

SIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi masalah sampah plastik mengacu pada beberapa kebijakan sampai

dengan penerbitan Instruksi Walikota tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif pengganti kantong plastik di Kota Jayapura. Dampak dari penerapan kebijakan pemerintah tersebut berdasarkan hasil kuesioner diperoleh mayoritas masyarakat berpendapat bahwa masih belum sepenuhnya mengatasi permasalahan sampah plastik di Kota Jayapura.

Hasil yang diperoleh ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan selanjutnya dalam penanganan sampah plastik, terutama dalam memunculkan upaya-upaya yang dapat mendorong peningkatan partisipasi dari masyarakat sehingga lebih berperan dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah juga berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari fasilitas pendukung terkait pengolahan sampah plastik tersebut.

Hasil penelitian ini diekspektasikan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jayapura terhadap kebijakan-kebijakan yang dimunculkannya serta dampaknya dalam mengurangi sampah plastik di masyarakat, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Bagaimanapun, dampak terkait kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini dinilai masih memiliki kelemahan karena masih sebatas persepsi masyarakat saja, sehingga direkomendasikan agar bahasan topik ini dibahas lebih mendalam ataupun lebih komprehensif oleh para peneliti berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura dan LP2M Universitas Ottow Geissler Jayapura yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

REFERENSI

- Andrawina, K. E., Zulfikri, A., Maranatha, T. R. R., & Handayani, W. (2019). Women and wastes: Study on participation of housewives on plastic waste management in Kecandran, Salatiga, Indonesia. *Sustinere, Journal of Environment & Sustainability*, 3(3), 127-212. doi: 10.22515/sustinere.jes.v3i3.90.
- Astuti, A. D. (2018). Penerapan kantong plastik berbayar sebagai upaya mereduksi penggunaan kantong plastik. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 12(1), 32-40. doi: 10.33658/jl.v12i1.50.
- Bai, M., Zhu, L., An, L., Peng, G., & Li, D. (2018). Estimation and prediction of plastic waste annual input into the sea from China. *Acta Oceanologica Sinica*, 37(11), 26-39. doi: 10.1007/s13131-018-1279-0.
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Science Advances*, 4(6), 1-8. doi: 10.1126/sciadv.aat0131.
- Ciuffi, B., Chiaramonti, D., Rizzo, A. M., Frediani, M., & Rosi, L. (2020). A critical review of SCWG in the context of available gasification technologies for plastic waste. *Applied Sciences (Switzerland)*, 10(18), 1-35. doi: 10.3390/APP10186307.
- Fangga & Mulasari, S. A. (2016). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 1-14. Retrieved from: <http://eprints.uad.ac.id/8013/>.
- Gultom, E. N. (2020). Analisis ekstensifikasi barang kena cukai terhadap kantong plastik di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(2), 166-178. doi: 10.31092/jpbc.v4i2.965.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Penggunaan Kantong Belanja Alternatif Pengganti Kantong Plastik di Kota Jayapura. Jayapura.
- Khan, F., Ahmed, W., & Najmi, A. (2019). Understanding consumers' behavior intentions towards dealing with the plastic waste: Perspective of a developing country. *Resources, Conservation and Recycling*, 142(September), 49-58. doi: 10.1016/j.resconrec.2018.11.020.
- Klemeš, J. J., Fan, Y. V., Tan, R. R., & Jiang, P. (2020). Minimising the present and future plastic waste, energy and environmental footprints related to COVID-19. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 127(109883), 1-7. doi: 10.1016/j.rser.2020.109883.
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak. *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66-74. doi: 10.20527/jukung.v3i1.3201.
- Mangkoesoebroto, G. (2016). *Ekonomi publik*. BPFE.
- Maolani, D. Y., & Ishak, D. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 117-130. doi: 10.15575/jk.v1i2.3780.
- Mirawati. (2018). Analisis kinerja pengolahan sampah di Kota Metro (Studi di tempat pengolahan akhir sampah (TPAS) Kota Metro. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(2), 108-116. Retrieved from: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU7b-3wMPwAhXRbn0KHSq5DQIQFjACegQICRAD&url=http%3A%2F%2Fjurnaladministratio.fisip.unila.ac.id%2Findex.php%2Fadministratio%2Farticle%2Fdownload%2F70%2F51%2F&usg=AOvVaw2TD1saE-VZiurdEnvpxb8E>.

- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8), 404-410. doi: 10.21109/kesmas.v8i8.412.
- Muryono, S. (2018). Pertemuan menteri lingkungan hidup menghasilkan Deklarasi Bali. *Antaraneews.com*. Edisi hari Jumat, tanggal 02 November 2018. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/764568/pertemuan-menteri-lingkungan-hidup-menghasilkan-deklarasi-bali>.
- Muslihun, M., Anggroro, D. D., & Kismartini, K. (2020). An environmental study on the paid plastic bag use policy in the city of Semarang. The 5th International Conference on Energy, Environmental and Information System (ICENIS 2020), *E3S Web of Conferences*, 202. doi: 10.1051/e3sconf/202020206001.
- Novianti, A. I., & Kartika, L. (2017). Pengaruh green marketing kebijakan kantong plastik berbayar terhadap green behaviour masyarakat Kota Bogor. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 81-94. doi: 10.36226/jrmb.v2i1.32.
- Olusunmade, O. F. (2019). Plastic wastes separation practice and disposal mechanism by households, hospitals, markets and waste management body. *International Journal of Human Capital in Urban Management*, 4(3), 189-204. doi: 10.22034/IJHCUM.2019.03.04.
- Palugaswewa, I. J. K. (2018). Sustainable plastic waste management in Sri Lanka: Effective policy approaches. *IIIEE Master Thesis*. The International Institute for Industrial Environmental Economics, Sweden. Retrieved from <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8962482>.
- Peraturan Walikota Jayapura Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kota Jayapura dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Jayapura.
- Prasetyia, F. (2012). *Bagian V: Teori eksternalitas*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMtPaq5sLwAhUaqksFHczBDgIQFjAAegQIAxAAD&url=http%3A%2F%2Fferryfebub.lecture.ub.ac.id%2Ffiles%2F2013%2F01%2FBagian-V-Teori-Eksternalitas.pdf&usg=AOvVaw1DdcJyZjsFGwceekT8K9GT>.
- Prisandani, U. Y., & Amanda, A. L. (2019). The importance of regulating plastic marine pollution for the protection of Indonesian marine environment. *Yuridika*, 35(1), 171-185. doi: 10.20473/ydk.v35i1.10962.
- Purwoko, P., & Wibowo, T. (2018). Fiscal incentives and disincentives to reduce plastic waste. *Proceeding*, 213-218. The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC) "A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization". Retrieved from: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZzczDwsPwAhX79nMBHSUsBmgQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Ffaasic.org%2Fproc%2Ffaasic%2Farticle%2Fdownload%2F360%2F357&usg=AOvVaw3AUbEP RKqooDLASw6EKoro>.
- Putri, N. W. E. (2019). Komunikasi sosial dalam mensosialisasikan penetapan kebijakan Gubernur Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. *Jurnal Nomosleca*, 5(1), 44-57. doi: 10.26905/nomosleca.v5i1.2783.
- Ramah. (2017). Butuh komitmen bersama masalah sampah di Kota Jayapura. *Kabarpapua.Co*. Edisi 16 Juli 2017. Retrieved from <https://kabarpapua.co/butuh-komitmen-bersama-masalah-sampah-di-kota-jayapura/>.

- Saputri, M. M. (2015). Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1804–1808. Retrieved from: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1048>.
- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan publik dan ritel modern: Studi kasus pelaksanaan kebijakan plastik berbayar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 113-142. doi: 10.24843/EEB.2018.v07.i01.p05.
- Septiadi, A. (2018). Pemerintah tetapkan kebijakan pengelolaan sampah nasional. *Kontan.co.id*. Edisi hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-kebijakan-pengelolaan-sampah-nasional>.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun No. S1230/PSLB3-PS/2016 Tanggal 17 Februari 2016 tentang kebijakan penerapan plastik berbayar. Jakarta.
- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2021). Kebijakan pemerintah dalam mengatasi eksternalitas dan pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 1–16. Retrieved from <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/656/337>.
- Wanda. (2019). Upaya Indonesia menanggulangi limbah sampah plastik dari Belanda. *JOM FISIP*, 6(1), 1–12. Retrieved from: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23406>
- Wang, Z., Huo, J., & Duan, Y. (2020). The impact of government incentives and penalties on willingness to recycle plastic waste: An evolutionary game theory perspective. *Frontiers of Environmental Science & Engineering*, 14(2), 29. doi: 10.1007/s11783-019-1208-2.
- Wichai-utcha, N., & Chavalparit, O. (2019). 3Rs policy and plastic waste management in Thailand. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 21, 10-22. doi: 10.1007/s10163-018-0781-y.
- Widiantara, I. K. A. (2020). Strategi public relations Pemprov Bali menuju Bali bebas sampah plastik. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2-3), 84–91. Retrieved from: <https://jaya.panguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/390>.
- Willis, K., Maureaud, C., Wilcox, C., & Hardesty, B. D. (2018). How successful are waste abatement campaigns and government policies at reducing plastic waste into the marine environment? *Marine Policy*, 96(October), 243–249. doi: 10.1016/j.marpol.2017.11.037.
- Yuliyah. (2018). Indonesia darurat sampah plastik. *Tanganrakyat.id*. Edisi Selasa, tanggal 27 November 2018. Retrieved from <https://www.tanganrakyat.id/2018/11/27/indonesia-darurat-sampah-plastik/>.
- Yustikarini, R., Setyono, P., & Wiryanto, W. (2017). Evaluasi dan kajian penanganan sampah dalam mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sampah di TPA Milangasri Kabupaten Magetan. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 177–185. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/17642>.



Pengaruh *Green Marketing* dan *Service Quality* terhadap Loyalitas Pelanggan dengan *Customer Satisfaction* sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Starbucks Coffee Kota Surabaya)

Effect of Green Marketing and Service Quality on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as Intervening Variable (Case Study at Starbucks Coffee Surabaya City)

Dwitriana Ulfi Rizqiningsih¹⁾, Arry Widodo²⁾

^{1,2)} Faculty of Communication and Business, Telkom University, Kota Bandung

e-mail korespondensi: dwitrianaur@student.telkomuniversity.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 18 Maret 2021 Disetujui: 17 Juli 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari <i>green marketing</i> dan <i>service quality</i> terhadap loyalitas pelanggan melalui <i>customer satisfaction</i> sebagai variabel intervening. Dalam proses analisis, penelitian ini mengaplikasikan studi kasus pada <i>Starbucks Coffee</i> sebagai salah satu bisnis yang menerapkan strategi <i>green marketing</i>. Metode yang digunakan berparadigma kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kausalitas, serta metode analisis SEM-PLS. Teknik <i>nonprobability sampling</i> digunakan untuk memilih sampel sebanyak 385 pelanggan <i>Starbucks Coffee</i> di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa <i>green marketing</i> dan <i>service quality</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan baik secara langsung maupun melalui <i>customer satisfaction</i> sebagai variabel intervening. Kata Kunci: <i>Green Marketing, Service Quality, Loyalitas Pelanggan, Customer Satisfaction.</i>
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.3351 <i>Cara Mensitasi :</i> Rizqiningsih, D. U., & Widodo, A. (2021). Pengaruh <i>green marketing</i> dan <i>service quality</i> terhadap loyalitas pelanggan dengan <i>customer satisfaction</i> sebagai variabel intervening (Studi kasus di Starbucks Coffee Kota Surabaya). <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 242-256. doi: 10.33059/jseb. v12i2.3351.	

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 18 March 2021 Accepted: 17 July 2021 Published: July 2021	<i>This study aims to determine the effect of green marketing and service quality on customer loyalty through customer satisfaction as an intervening variable. In the analysis process, this research applies a case study on Starbucks Coffee as a business that implements a green marketing strategy. The method used is a quantitative paradigm with descriptive and causal research types, as well as the SEM-PLS analysis method. Non-probability sampling technique was used to select a sample of 385 Starbucks Coffee customers in Surabaya City. Based on the results, it was concluded that green marketing and service quality had a positive and significant effect on customer loyalty either directly or through customer satisfaction as an intervening variable.</i> Keywords: <i>Green Marketing, Service Quality, Customer Loyalty, Customer Satisfaction.</i>
<i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.3351 <i>How to cite :</i> Rizqiningsih, D. U., & Widodo, A. (2021). Pengaruh <i>green marketing</i> dan <i>service quality</i> terhadap loyalitas pelanggan dengan <i>customer satisfaction</i> sebagai variabel intervening (Studi kasus di Starbucks Coffee Kota Surabaya). <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 242-256. doi: 10.33059/jseb. v12i2.3351.	



PENDAHULUAN

Topik trending saat ini yaitu masalah sampah, utamanya sampah plastik, yang dinilai memperburuk pemanasan global dan berdampak negatif atas kesehatan biologis dan perubahan iklim. (Ambari, 2020; Browne *et al.*, 2013). Secara khusus, The World Bank 2019 menyebutkan setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 24.500 ton plastik per hari. Kondisi ini diproyeksikan pada tahun 2025 dihasilkan sekitar 9 juta ton sampah plastik (BPS, 2019). Sikap ketidakpedulian manusia yang berlebihan mengeksploitasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya menyebabkan polusi sampah plastik skala besar dan akhirnya menyebabkan perubahan iklim dan mengganggu keharmonisan dalam lingkungan (Dohong, 2020; Chandra, 2020).

Pada situasi tersebut diindikasikan sebagian besar penyumbang sampah berada dalam industri makanan dan minuman (Rasyadi, 2019). Peningkatan industri minuman yang signifikan tentu menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang juga semakin meningkat karena industri tersebut terus bergantung pada kemasan plastik sekali pakai. Situasi ini akhirnya mendorong semakin banyak bisnis yang berusaha keras untuk memanfaatkan potensi kepedulian lingkungan untuk operasi bisnis sebagai tanggapan atas kepedulian publik yang berkembang terhadap lingkungan dengan mulai memasarkan produk atau layanan jasa yang lebih sehat bagi pelanggan dan ramah lingkungan. Upaya perusahaan mengaplikasikan permasalahan lingkungan dalam aktivitas pemasarannya menimbulkan fenomena baru berupa konsep *green marketing* (pemasaran hijau).

Green marketing merupakan strategi perusahaan untuk memasarkan produk dengan cara yang ramah lingkungan dalam aktivitas pemasarannya, seperti memodifikasi produk, mengubah kemasan, menyesuaikan proses produksi, serta bahkan mengubah metode

promosi (Sandeem, 2009; Irkhamni *et al.*, 2017). Strategi ini dinilai dapat membantu perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif dengan menciptakan imej 'ramah lingkungan' di persepsi konsumen sehingga meningkatkan loyalitas pelanggannya (Sari & Setiawan, 2017).

Penelitian ini berfokus pada Starbucks Kota Surabaya karena beberapa alasan (Starbucks, 2020; Irwansyah, 2015). Pertama, Starbucks Coffee merupakan salah satu bisnis yang menerapkan strategi *green marketing* dan dikenal kontribusinya pada lingkungan seperti pembuangan limbah yang tepat, mengurangi gelas/cup sekali pakai, serta mengganti kemasan dengan tumbler untuk meminimalkan dan mendaur ulang kemasan makanan. Kedua, Kota Surabaya merupakan kota kedua dengan jumlah gerai Starbucks Coffee terbanyak yaitu 27 gerai, sehingga memudahkan perusahaan ini menyampaikan *awareness* dan edukasi tentang produk-produknya yang ramah lingkungan kepada konsumen. Temuan riset Wicaksana (2014) menilai loyalitas pelanggan Starbucks di Kota Surabaya memiliki persentase tinggi dan dikategorikan sebagai *satisfied buyer*.

Selain penerapan *green marketing*, loyalitas pelanggan atas produk perusahaan bisa diciptakan melalui pemberian *service quality* yang berkualitas (Zeithaml *et al.*, 1996; Kotler & Keller, 2016). Loyalitas pelanggan terbentuk atas perusahaan yang dianggap memberikan nilai (*value*) kualitas paling besar (Parasuraman *et al.*, 1985; Kotler & Armstrong, 2017). Pembentukan *service quality* berkualitas oleh perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif saat ini adalah strategi penting untuk kesuksesan dan kelangsungan hidup serta pada akhirnya dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi.

Faktor terakhir yang diidentifikasi mempengaruhi konsumen menjadi loyal adalah berasal dari kepuasan pelanggan. *Customer*

satisfaction adalah penilaian atas layanan yang diberikan oleh konsumen berdasarkan kualitas layanan dan pengalaman dirinya saat melakukan pembelian suatu barang atau jasa (Kotler & Armstrong, 2017; Tjiptono, 2014). Capaian tingkatan *customer satisfaction* terindikasi juga dipengaruhi oleh strategi *green marketing* ataupun *service quality* yang diterapkan perusahaan terkait. Hal ini sebagai konsekuensi sikap konsumen yang seringkali memperbandingkan antara harapan yang dimiliki dan ingin dipenuhinya dengan kinerja layanan yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapannya tersebut (Fida *et al.*, 2020; Malau, 2017). Apabila merasakan *satisfaction* berkenaan dengan aspek-aspek *green marketing* ataupun *service quality* maka konsumen dinilai akan loyal dan bersedia melakukan transaksi pembelian kembali pada perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi atas arah dan derajat signifikansi dari pengaruh *green marketing* dan *service quality* terhadap loyalitas pelanggan, baik secara langsung ataupun melalui *customer satisfaction* sebagai variabel intervening. Hasil-hasil empiris yang diperoleh dalam penelitian ini diekspektasi dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi *green marketing* serta meningkatkan *service quality* yang diberikannya.

Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan merupakan bentuk motivasi perilaku untuk melakukan pembelian berulang. Loyalitas bisa didefinisikan sebagai bentuk kewajiban yang dipegang teguh oleh seorang pelanggan untuk membeli atau berlangganan kembali ke produk atau layanan tertentu di masa depan, terlepas dari dampak situasi dan aktivitas pemasaran yang berpotensi menyebabkan perubahan perilaku (Kotler & Keller, 2016; Tjiptono, 2014). Karenanya proses untuk membangun loyalitas

pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau perusahaan membutuhkan waktu lama (Peter & Olson, 2010; Kotler & Armstrong, 2017).

Loyalitas dapat dipahami dalam dua dimensi (Bennett & Bove, 2002; Saini & Singh, 2020). Dimensi pertama adalah aliran *behavioral loyalty*, artinya loyalitas dapat dipahami sebagai konsep yang menentukan urutan pembelian, proporsi pembelian, dan probabilitas pembelian. Dimensi kedua adalah aliran *attitudinal loyalty*, artinya kesetiaan dipahami sebagai suatu bentuk keterikatan psikologis pada objek.

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan mengukur loyalitas konsumen (Sumarwan *et al.*, 2011), yaitu: (1) pembelian kembali (*repeat purchase*); (2) ketahanan mengkonsumsi merek tersebut; (3) selalu suka pada merek tersebut; (4) tetap memilih merek tersebut; (5) keyakinan bahwa merek tersebut adalah yang terbaik; dan, (6) merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Apabila keenam indikator ini terpenuhi maka pelanggan bersangkutan dinilai memiliki level loyalitas yang sangat tinggi.

Green Marketing

Green marketing adalah keseluruhan proses manajemen yang bertanggungjawab melakukan identifikasi, memprediksi serta memuaskan berbagai kebutuhan konsumen dan masyarakat dengan cara menguntungkan dan berkelanjutan, serta melibatkan manfaat-manfaat sosio-ekonomi dan tanggungjawab lingkungan yang dibawa oleh perusahaan bersangkutan (Sandeem, 2009; Irkhamni & Suharyono, 2017; Alhamad *et al.*, 2019). Penerapan *green marketing* memiliki tujuan menghasilkan produk ramah lingkungan, pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen yang sadar lingkungan, serta inovasi produk mulai dari segi input, proses, hingga produksi, bahkan strategi pemasaran.

Dalam bukunya, Grant (2007) membagi tujuan *green marketing* menjadi tiga tahap: (1) *Green* yang bertujuan menyampaikan kepedulian merek atau perusahaan terhadap lingkungan; (2) *Greener* dimana perusahaan berusaha mengubah gaya konsumsi atau penggunaan produk oleh konsumen seperti menggunakan kertas bekas atau daur ulang, menghemat air, listrik, menggunakan AC, dan lainnya; serta, (3) *Greenest* yaitu perusahaan ter hijau sedang mencoba mengubah budaya konsumen menuju budaya yang lebih ramah lingkungan.

Beberapa temuan empiris terdahulu (Martinez, 2015; Sari & Setiawan, 2017; Jabeen & Kavitha, 2020) menemukan bahwa penerapan strategi *green marketing* memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan dalam menumbuhkan sikap loyal pelanggan kepada perusahaan yang mengaplikasikan strategi itu. Nilai yang positif menunjukkan bahwa jika *green marketing* semakin intensif diterapkan maka loyalitas konsumen terhadap produk tertentu akan meningkat; sebaliknya, jika semakin buruk strategi *green marketing* yang diterapkan maka loyalitas konsumen terhadap produk tersebut akan menurun. Demikian demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Green marketing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

Service Quality

Dalam memuaskan pelanggan, selain produk yang aman dan nyaman digunakan, layanan yang diberikan oleh perusahaan harus berkualitas tinggi. Kualitas pelayanan atau *service quality* didefinisikan selaku seberapa jauh perbandingan antara realitas serta harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima (Malau, 2017). Untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dalam upaya

mempromosikan penjualan layanan dan menciptakan keunggulan unik di antara pesaing, *service quality* seharusnya dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan persepsi pelanggan (Tjiptono, 2014; Kotler & Keller, 2016). Dengan demikian, perusahaan akan dinilai memiliki *service quality* berkualitas tinggi jika memenuhi harapan pelanggannya.

Sejumlah peneliti sebelumnya telah berupaya mengidentifikasi hubungan antara *service quality* dan loyalitas pelanggan. Hasil riset Fida *et al.* (2020) menemukan bahwa meningkatnya *service quality* yang diberikan suatu perusahaan memberi dampak signifikan untuk mempertinggi loyalitas pelanggan dari perusahaan tersebut. Demikian juga, temuan studi milik Pereira *et al.* (2016) maupun Narotama (2019) menyatakan *service quality* berpengaruh positif signifikan atas loyalitas pelanggan, sehingga dinyatakan *service quality* memegang peran penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Demikian demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: *Service quality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

Customer Satisfaction

Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang dimiliki seseorang karena membandingkan fakta yang diperoleh dengan harapan pelanggan (Priansa, 2017; Kotler & Keller, 2016; Tsai & Chen, 2007). Jika barang dan jasa dibeli oleh konsumen sesuai harapan dirinya, maka konsumen itu akan merasa puas; sebaliknya, jika kinerja tidak sesuai harapan maka konsumen tersebut akan merasa tidak puas. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah saat konsumen mencapai kepuasan tertinggi, yang menghasilkan ikatan emosional yang kuat dan komitmen jangka panjang atas merek perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu (Özkan *et al.*, 2020; Alfin & Nurdin, 2017; Nuraeni *et al.*, 2019) memperoleh hasil bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Temuan ini menyatakan bahwa semakin puas konsumen setelah menggunakan suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi loyalitas yang tercipta dalam diri pelanggan atas barang atau jasa tersebut.

Namun demikian, studi milik Soelasih (2017) sebaliknya menunjukkan *customer satisfaction* tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Argumen yang dimunculkan bahwa walaupun konsumen merasa puas namun belum tentu akan mampu menarik konsumen tersebut untuk setia menggunakan produk tertentu karena banyaknya variasi produk yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat *gap* riset yang menarik mengenai hubungan antara *customer satisfaction* terhadap loyalitas pelanggan. Karenanya, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: *Customer satisfaction* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

Customer satisfaction diidentifikasi memiliki hubungan dengan *green marketing* oleh sejumlah penelitian terdahulu. Hasil empiris yang didapatkan oleh Irkhamni & Suharyono (2017), Parlan *et al.* (2016) serta Eneizan & Wahab (2016) menunjukkan *green marketing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *customer satisfaction*. Berdasarkan hasil riset terdahulu, hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H4: *Green marketing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *customer satisfaction* Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

Customer satisfaction juga diidentifikasi memiliki hubungan dengan *service quality*.

Tjiptono (2014) berargumen penentu utama kepuasan pelanggan adalah persepsi mereka tentang kualitas layanan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fida *et al.* (2020), Jimanto (2014) serta Özkan *et al.* (2020) yang menemukan *service quality* berpengaruh positif atas *customer satisfaction*. Berkenaan pemikiran ini, maka dimunculkan hipotesis kelima yang diajukan yaitu:

H5: *Service quality* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *customer satisfaction* Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

Secara khusus, *customer satisfaction* diidentifikasi pada satu sisi mempengaruhi loyalitas pelanggan, namun di sisi lain dipengaruhi oleh strategi *green marketing* dan *service quality*. Karenanya pada penelitian ini dikembangkan sebagai variabel intervening. Dengan demikian, dimunculkan hipotesis keenam dan ketujuh berikut:

H6: Terdapat pengaruh positif oleh *green marketing* terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi *customer satisfaction* pada pelanggan Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

H7: Terdapat pengaruh positif oleh *service quality* terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi *customer satisfaction* pada pelanggan Starbucks Coffee di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif dengan filosofi positivis ini bertujuan untuk menganalisis efek kausalitas atau konklusif (Indrawan & Yuniawati, 2017; Sugiyono, 2018). Penelitian ini juga bersifat korelasional dan dirancang untuk mengumpulkan data *cross sectional* (Indrawati, 2015).

Variabel eksogen yang dianalisis terdiri atas *green marketing* (X1) dan *service quality* (X2); variabel endogen adalah loyalitas

pelanggan (Y); serta, variabel intervening atau mediasi yang juga memiliki peran serupa variabel eksogen dalam penelitian ini adalah *customer satisfaction* (M). Pengukuran atas masing-masing variabel ini menggunakan skala ordinal untuk menentukan peringkat *construct* yang diukur (Sugiyono, 2018). Skala instrumen adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial tertentu seperti sikap, pendapat dan persepsi sosial seseorang atau sekelompok orang (Hasan, 2002; Indrawan & Yuniawati, 2017). Skala Likert dimulai dari skor 5 untuk pilihan jawaban “Sangat Setuju” sampai skor 1 untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju”.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Surabaya yang suka nongkrong atau lebih produktif dengan tahun kelahiran 1997–2012, yang persentasenya mencapai 25,79 % dari jumlah penduduk kota Surabaya sebanyak 2.874.314 jiwa tahun 2020 (BPS Statistik, 2020).

Dari populasi itu, selanjutnya dipilih sampel yaitu sebagian dari Generasi Z di kota Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu pengambilan sampel yang disengaja (*purposive*) dan subjektif berdasarkan pertimbangan tertentu (Indrawan & Yuniawati, 2017).

Teknik *random sampling* digunakan saat penentuan responden sepanjang sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti, yaitu: (a) masyarakat Kota Surabaya dalam rentang berusia 18-24 tahun; (b) pernah berkunjung pada Starbucks Coffee Kota Surabaya; (c) mengkonsumsi Starbucks Coffee Kota Surabaya dalam rentang waktu kurang lebih sebulan. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Bernoulli, diperoleh jumlah responden sebanyak 385 orang (Zikmund *et al.*, 2010).

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berbasis survei yang dikumpulkan secara langsung pada responden (Jogiyanto, 2008; Hasan, 2002). Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dikirim ke pelanggan Starbucks yang telah mendaftar setidaknya selama satu bulan. *Google form* digunakan sebagai media untuk menyebarkan kuisisioner. Untuk mencapai target responden yang tepat dan sesuai kebutuhan, disiapkan juga *screening questions* agar penyebarannya dapat memberikan hasil yang tepat.

Sebelum digunakan untuk pengambilan data sesungguhnya, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas atas kuesioner. Pengujian menggunakan 30 responden awal yang berkunjung ke Starbucks di kota Surabaya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa kuesioner dinilai valid karena nilai *Pearson's product moment* untuk setiap item pertanyaan adalah lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Jogiyanto, 2008). Hasil uji reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach* juga menyatakan instrumen pengumpulan data penelitian ini sudah reliabel karena diperoleh nilai $0,984 > 0,70$ (Sujarweni, 2015; Indrawan & Yuniawati, 2017). Proses kedua uji ini menggunakan *software SPSS ver. 25*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam dimensi antara serta variabel laten yang diamati adalah *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM-PLS). Selanjutnya, model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menilai akurasi dan reliabilitas model. Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel indikator benar-benar merupakan variabel laten yang diteliti (Haryono, 2017; Efendi & Purnomo, 2012). Proses pengolahan data menggunakan *software SmartPLS 3.0*.

Secara umum, analisis SEM melalui dua tahap (Indrawan & Yuniawati, 2017; Latan & Ghozali, 2012). Tahap pertama adalah penilaian variabel melalui model pengukuran (*measurement model*). *Measurement model* dalam PLS-SEM dievaluasi menggunakan R^2 untuk mengukur tingkat varians di dalam perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen (Haryono, 2017; Abdillah & Hartono, 2015). Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin baik derajat prediksi dari model penelitian.

Tahap kedua yaitu mengevaluasi model struktural atau *inner model (structural measurement)*. Pengukuran ini menggunakan *estimate for path coefficients*, yaitu besaran signifikansi pengaruh antar variabel dengan faktor atau nilai kuantitas korelasi atau pengaruh konstruksi tersembunyi. Proses ini dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* atau *resampling method* (Ghozali & Latan, 2015; Haryono, 2017).

Untuk melakukan validasi atas model secara keseluruhan, digunakan uji *Goodness of Fit Index* (GoF) yang merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi hasil gabungan antara model pengukuran dengan model struktural (Haryono, 2017). Nilai GoF ini diperoleh dari *average communalities index* dikalikan dengan nilai R^2 model, dimana nilainya terbentang antara 0 sampai 1 dengan interpretasi nilai: 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderate); dan, 0,36 (GoF besar).

HASIL ANALISIS

Dalam analisis verifikatif SEM-PLS terbentuk dua jenis model, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

Hasil Pengujian Outer Model

Pengujian model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk tujuan menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten

dengan variabel manifestnya. Pengujian ini meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *reliability test*.

Convergent validity berkaitan dengan prinsip bahwa variabel inventaris yang dibangun harus sangat berkorelasi. Dari total 32 item pernyataan, kesemuanya dinyatakan valid karena memiliki nilai *outer loading* lebih dari 0,7 dan nilai AVE > 0,5. Dengan demikian, seluruh variabel manifest dinyatakan telah memenuhi persyaratan *convergent validity*. Karenanya dapat dikatakan bahwa semua indikator yang digunakan pada penelitian ini sudah valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

Discriminant validity dilihat melalui pengukuran *cross loading factor* dengan perbandingan AVE dan korelasi antar variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis terangkum dalam Tabel 1 terlihat bahwa nilai akar AVE dari masing-masing variabel laten lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi tertinggi variabel tersebut dengan variabel lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian telah memiliki validitas diskriminan yang baik.

Reliability test adalah seberapa jauh sebuah hasil pengukuran pada objek yang sama namun dapat menghasilkan data yang sama. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dalam Tabel 2 diidentifikasi bahwa nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel bernilai lebih 0,70 sehingga dapat dikatakan data memiliki reliabilitas tinggi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan variabel dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten.

Hasil Pengujian Inner Model

Pengukuran model struktural (*inner model*) bertujuan untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh variabel laten lain.

Tabel 1. Hasil Uji Discriminant Validity

Variabel Laten	<i>Customer Satisfaction</i>	<i>Green Marketing</i>	Loyalitas Pelanggan	<i>Service Quality</i>
<i>Customer Satisfaction</i>	0,840			
<i>Green Marketing</i>	0,802	0,854		
Loyalitas Pelanggan	0,815	0,838	0,851	
<i>Service Quality</i>	0,826	0,791	0,819	0,842

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 2. Hasil Uji Reliability Test

Variabel Laten	<i>Composite Reliability</i>	Nilai Kritis	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
<i>Customer Satisfaction</i>	0,967		0,963		Reliabel
<i>Green Marketing</i>	0,969	> 0,7	0,966	> 0,7	Reliabel
Loyalitas Pelanggan	0,905		0,861		Reliabel
<i>Service Quality</i>	0,913		0,872		Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 3. Hasil Determinasi Simultan

Variabel Laten	<i>R-Square</i>
<i>Customer Satisfaction</i> (Z)	0,840
Loyalitas Pelanggan (Y)	0,815

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai total kontribusi dari dua variabel eksogen terhadap variabel laten, yaitu *customer satisfaction* dan loyalitas pelanggan. Nilai *R-Square* adalah koefisien determinasi pada variabel endogen, dimana semakin tinggi nilai *R-Square* menunjukkan semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Total kontribusi (*R-Square*) dari *green marketing* dan *service quality* terhadap *customer satisfaction* adalah sebesar 0,741 yang berarti bahwa perubahan yang terjadi atas *customer satisfaction* dapat dijelaskan oleh kedua variabel eksogen dalam penelitian ini sebesar 74,1%; sementara sisanya sebesar 25,9% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Sementara itu, nilai total kontribusi (*R-Square*) dari *green marketing* dan *service*

quality terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,782 menyatakan perubahan yang terjadi atas loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel eksogen dalam penelitian ini sebesar 78,2%; sementara sisanya sebesar 21,8% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Selanjutnya, total kontribusi itu dipilah menjadi nilai determinasi parsial dari masing-masing variabel eksogen atas tiap variabel endogen, yang ditunjukkan oleh hasil-hasil yang terangkum dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4 menunjukkan besaran koefisien determinasi parsial dari *green marketing* (X1) dan *service quality* (X2) terhadap *customer satisfaction* (Z). Hasil empiris menunjukkan nilai kontribusi parsial dari *green marketing* ataupun *service quality* terhadap *customer satisfaction* masing-masing sebesar 0,317 dan

0,424 yang berarti secara statistik *customer satisfaction* mampu dipengaruhi *green marketing* sebesar 31,7% serta *service quality* sebesar 42,4%, dari total kontribusi 74,1%.

Tabel 5 menunjukkan besaran koefisien determinasi parsial dari *green marketing* (X1), *service quality* (X2) serta *customer satisfaction* (Z) terhadap loyalitas pelanggan (Y). Hasil empiris mengidentifikasi kontribusi parsial dari *green marketing*, *service quality* atau *customer satisfaction* terhadap loyalitas pelanggan masing-masing sebesar 0,343; 0,239 dan 0,200. Hasil ini berarti menyatakan loyalitas pelanggan mampu dipengaruhi *green marketing* sebesar 34,3%, dipengaruhi *service quality* sebesar 23,9%, serta dipengaruhi *customer satisfaction* sebesar 20,0%, dari nilai total kontribusi sebesar 78,2%.

Ketiga, hasil empiris yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan besaran

total kontribusi (*total effect*) atas hadirnya *customer satisfaction* sebagai intervening. Tabel 6 menunjukkan nilai total kontribusi dari *green marketing* terhadap loyalitas pelanggan melalui *customer satisfaction* adalah sebesar 0,517 yang berarti *customer satisfaction* mampu mengintervensi pengaruh *green marketing* terhadap loyalitas pelanggan mencapai 51,7%; sedangkan sisanya sebesar 48,3% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 6 juga menunjukkan nilai total kontribusi *service quality* terhadap loyalitas pelanggan melalui *customer satisfaction* sebesar 0,625 yang berarti bahwa *customer satisfaction* mampu mengintervensi pengaruh dari *service quality* atas loyalitas pelanggan mencapai 62,5%; sedangkan sisanya sebesar 37,5% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Determinasi Parsial terhadap Variabel Z

Pengaruh	Korelasi	Path	Parsial
X1 → Z	0,802	0,395	0,317
X2 → Z	0,826	0,513	0,424
Total R-Square			0,741

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 5. Hasil Determinasi Parsial terhadap Variabel Y

Pengaruh	Korelasi	Path	Parsial
X1 → Y	0,838	0,410	0,343
X2 → Y	0,819	0,292	0,239
Z → Y	0,815	0,246	0,200
Total R-Square			0,782

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 6. Hasil Determinasi Total Efek Intervening

Pengaruh	R-Square		Total Effect
	X → Z	X → Z	
X1 → Z → Y	0,317	0,200	0,517
X2 → Z → Y	0,815	0,200	0,625

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel Laten	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Nilai Kritis	Keputusan
1	X1 → Y	0,410	0,000	< α (0,05)	Signifikan
2	X2 → Y	0,292	0,000		Signifikan
3	X1 → Z	0,395	0,000		Signifikan
4	X2 → Z	0,513	0,000		Signifikan
5	Z → Y	0,246	0,001		Signifikan
6	X1 → Z → Y	0,097	0,006		Signifikan
7	X2 → Z → Y	0,126	0,002		Signifikan

Sumber: Data diolah, 2021.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen (yaitu: X1 = 0,410; X2 = 0,292; dan Z = 0,246) terhadap variabel endogen adalah bernilai positif. Hasil ini diinterpretasikan bahwa jika salah satu variabel eksogen (yaitu: *green marketing*, *service quality*, dan *customer satisfaction*) mengalami kenaikan intensitas pemanfaatan dalam strategi, dengan asumsi jika variabel-variabel eksogen lain bernilai tetap, maka loyalitas pelanggan juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika salah satu variabel eksogen ini mengalami penurunan intensitas pemanfaatan dalam strategi, dengan asumsi jika variabel-variabel eksogen lain bernilai tetap, maka loyalitas pelanggan juga akan mengalami penurunan.

Tabel 7 juga merangkum hasil-hasil uji hipotesis mengenai hubungan antara *green marketing*, *service quality* dan *customer satisfaction* dengan loyalitas pelanggan. Hasil-hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *p-value* untuk setiap jalur analisis antara variabel eksogen dan variabel endogen adalah lebih kecil dari nilai α (= 0,05). Dengan demikian dinyatakan bahwa pengaruh dari variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogen, baik secara langsung maupun melalui variabel intervening, adalah bersifat signifikan. Artinya, semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (H1

sampai dengan H7) dapat dibuktikan atau dapat diterima kebenarannya.

Pembahasan

Hasil pertama yang diperoleh melalui penelitian ini memperoleh bahwa *green marketing* terbukti memiliki pengaruh secara positif dan signifikan atas loyalitas pelanggan. Hasil ini memunculkan pemahaman bahwa semakin baik strategi *green marketing* yang diaplikasikan perusahaan maka akan diikuti oleh semakin tingginya loyalitas pelanggan perusahaan tersebut (Martinez, 2015; Sari & Setiawan, 2017; Jabeen & Kavitha, 2020). Dalam penelitian ini dihubungkan dengan obyek analisis, maka bisa dinyatakan bahwa apabila tujuan Starbucks Coffee khususnya di Kota Surabaya untuk menghasilkan produk bersifat ramah lingkungan telah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan yang sadar lingkungan, maka menjadikan pelanggan itu menjadi semakin loyal kepada perusahaan tersebut.

Berkenaan dengan pengaruhnya atas *customer satisfaction*, hasil penelitian ini membuktikan strategi *green marketing* memiliki pengaruh yang positif signifikan. Hasil empiris bahwa *green marketing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *customer satisfaction* juga diperoleh Irkhamni & Suharyono (2017), Parlan *et al.* (2016) dan Eneizan & Wahab (2016). Dengan demikian,

semakin baik penerapan *green marketing* dalam aktivitas bisnis milik Starbucks Coffee Kota Surabaya menurut persepsi pihak pelanggan, maka semakin tinggi kepuasan yang dirasakan pelanggan atas perusahaan yang bersangkutan.

Hasil empiris berikutnya membuktikan bahwa *service quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. *Service quality* diukur melalui perbandingan antara harapan yang dimiliki pelanggan dengan realitas layanan yang mereka terima. Apabila realisasi layanan yang diterima dinilai lebih tinggi dari harapan yang mereka tetapkan sebelumnya, maka perusahaan yang bersangkutan dinilai memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi (Fida *et al.*, 2020; Narotama, 2019; Pereira *et al.*, 2016; Malau, 2017; Kotler & Keller, 2016). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semakin baik penerapan *service quality* oleh Starbucks Coffee di Kota Surabaya maka akan diikuti oleh semakin tingginya loyalitas pelanggan pada perusahaan tersebut.

Service quality juga dibuktikan secara empiris oleh temuan penelitian ini bahwa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *customer satisfaction*. Temuan empiris ini memperluas hasil-hasil yang diperoleh sejumlah penelitian terdahulu seperti Fida *et al.* (2020), Jimanto (2014), Tjiptono (2014) serta Özkan (2019) yang juga menemukan *service quality* berpengaruh positif terhadap *customer satisfaction*. Berdasarkan temuan ini memperkuat argumen bahwa semakin berkualitas pelayanan yang diberikan perusahaan berdasarkan persepsi pelanggannya maka semakin tinggi derajat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan tersebut terhadap perusahaan bersangkutan.

Hasil empiris berikutnya yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah *customer satisfaction* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hasil

ini memperluas temuan empiris milik sejumlah peneliti terdahulu seperti Özkan *et al.*, 2020; Alfin & Nurdin, 2017 dan Nuraeni *et al.*, 2019. Hasil penelitian ini sebaliknya bertentangan dengan temuan studi Soelasih (2017) yang berargumen bahwa *customer satisfaction* tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan temuan empiris penelitian ini maka dinyatakan jika pelanggan menilai bahwa produk perusahaan memberikan realisasi nilai kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan harapan yang dimilikinya atas produk tersebut, maka ia akan menjadi loyal serta mengarah pada terciptanya ikatan emosional yang kuat dan komitmen jangka panjang atas produk perusahaan tersebut.

Ketika berikutnya diposisikan sebagai variabel intervening, hasil penelitian ini membuktikan bahwa *customer satisfaction* mampu memberikan efek intervensi yang memperkuat pengaruh baik dari strategi *green marketing* maupun *service quality* dalam upaya mempertinggi sikap loyal pelanggan kepada perusahaan. Berdasarkan hasil ini maka dinyatakan bahwa perusahaan akan berhasil menerapkan strategi *green marketing* ataupun *service quality* dalam upaya meningkatkan loyalitas pelanggan jika sebelumnya mampu menciptakan rasa puas dalam diri pelanggannya setelah mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan perusahaan yang bersangkutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *green marketing* memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan baik terhadap *customer satisfaction* dan loyalitas pelanggan; *service quality* memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan baik terhadap *customer satisfaction* dan loyalitas pelanggan; serta, *customer satisfaction*

memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

Saat diperlakukan sebagai variabel intervening, *customer satisfaction* terbukti mampu memperkuat pengaruh positif dari *green marketing* atau dari *service quality* terhadap loyalitas pelanggan. Hasil ini menyimpulkan bahwa agar strategi *green marketing* ataupun *service quality* yang diterapkan perusahaan menjadi lebih mampu menciptakan sikap loyalitas yang tinggi dari para pelanggannya jika perusahaan yang bersangkutan telah mampu memberikan rasa kepuasan di dalam diri para pelanggannya tersebut.

Peningkatan konsep dari interior cafe dengan mengutamakan *physical environment* ramah lingkungan supaya pelanggan merasa aman serta tidak asing bila terletak di Starbucks Coffee serta mempertahankan *green marketing* yang ada dan akan terus mencari inovasi baru dalam promosi melalui *green marketing* sebagai strategi merupakan saran yang dapat diberikan agar loyalitas pelanggan dan *customer satisfaction* dapat bertambah.

Bagi penelitian selanjutnya, pelaksanaan penelitian pada industri lain yang sejenis dengan memakai variabel yang sama sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Selain itu, pelaksanaan studi mengenai *green marketing* dan *service quality* menggunakan teori dari para ahli yang berbeda dan terbaru diekspektasikan akan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran.

REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono. (2015). *Partial least square (PLS)*. Andi.
- Alfin, M. R., & Nurdin, S. (2017). Pengaruh *store atmosphere* pada kepuasan pelanggan yang berimplikasi pada loyalitas pelanggan. *Ecodemica*, 1(2): 249-258. doi: 10.31294/Jeco.V1i2.2277.
- Alhamad, A. M., Junoh, M. Z. B. M., Ahmad, T. S. B. T., & Eneizan, B. (2019). Green marketing strategies: Theoretical approach. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(2), 77-94. doi: 10.31150/ajebm.Vol2.Iss2.72.
- Ambari, M. (2020). Tekad Indonesia bersihkan sampah plastik di laut. *Situs Berita Lingkungan*. Edisi tanggal 27 April. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2020/04/27/tekad-indonesia-bersihkan-sampahplastik-di-laut/>.
- Bennett, R., & Bove, L. (2002) Identifying the key issues for measuring loyalty. *Australian Journal of Market Research*, 9(2), 27-44. Retrieved from <https://eprints.qut.edu.au/10634/>.
- BPS. (2019). *Lingkungan hidup Indonesia 2019; Hutan dan perubahan iklim*. Badan Pusat Statistik.
- Browne, M. A., Hentschel, B. T., Halpern, B., & Kaparanagioti, H. K. (2013). Volunteer cleaners negotiate a Bulgarian reservoir jammed with plastics. *Classify Plastic Waste as hazardous*.
- Chandra, W. (2020). Monster sampah berkeliaran di Makassar serukan bahaya sampah plastik. *Situs Berita Lingkungan*. Edisi tanggal 23 November. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2020/11/13/monster-sampah-berkeliaran-di-makassar-serukan-bahaya-sampah-plastik/>
- Dohong, A. (2020). Hadapi dampak perubahan iklim, Wamen LHK harapkan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Edisi tanggal 22 November. Retrieved from http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2740.
- Efendi, M. M., & Purnomo, J. D. T. (2012). Analisis faktor konfirmatori untuk mengetahui kesadaran berlalu lintas pengendara sepeda motor di Surabaya Timur. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 1(1),

- 106-111. doi: 10.12962/j23373520.v1i1.965.
- Eneizan, B. M., & Wahab, K. A. (2016). Effect of green marketing strategy on customer satisfaction in Jordan. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(9), 34-40. doi: 10.12816/0027129.
- Fida, B. A., Ahmed, U., Al-Balushi, Y., & Singh, D. (2020). Impact of service quality on customer loyalty and customer satisfaction in Islamic banks in the Sultanate of Oman. *SAGE Open*, 10(2), 1-10. doi: 10.1177/2158244020919517.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*. BP Undip.
- Grant, J. (2007). *The green marketing manifesto*. Wiley.
- Haryono, P. S. (2017). *Metode SEM untuk penelitian manajemen AMOS LISREL PLS*. PT. Luxima Metro Media.
- Hasan, I. L. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Indrawan, P. R., & Yuniawati, P. P. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Refika Aditama.
- Indrawati. (2015). *Metode penelitian manajemen dan bisnis*. Refika Aditama.
- Irkhamni, D. A., & Suharyono, S. (2017). Pengaruh penerapan green marketing terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan (Survei pada pelanggan treatment Naavagreen natural skin care cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50(3), 33-39.
- Irwansyah, A. (2015). Analisis program corporate social marketing, pengetahuan konsumen dan reputasi perusahaan dalam menciptakan green consumerism (Program tumbler Starbucks). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(3), 52-56. doi: 10.33087/jiubj.v15i3.149.
- Jabeen, S. S., & Kavitha, M. (2020). Effect of green marketing strategies on customer loyalty effect of green marketing strategies on customer loyalty. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, 12(9), 14-20. doi.org/10.37896/JXAT12.09/2852.
- Jimanto, R. B. (2014). Pengaruh service quality terhadap loyalitas pelanggan dengan customer satisfaction sebagai variabel intervening pada ritel bioskop The Premiere Surabaya. *Jurnal Strategi Pemasaran*, 2(1), 1-7. Retrieved from: <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/view/1407>.
- Jogiyanto, P. (2008). *Metodologi penelitian sistem informasi*. CV. Andi Offset.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). *Principles of marketing (17th edition)*. Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th Edition)*. Pearson Prentice-Hall.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial least square path WarpPLS 2.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Malau, H. (2017). *Manajemen pemasaran*. CV. Alfabeta.
- Martinez, P. (2015). Customer loyalty: Exploring its antecedents from a green marketing perspective. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 27(5), 896-917. doi: 10.1108/IJCHM-03-2014-0115.
- Narotama, A. (2019). The effect of service quality on customer loyalty with brand images and customer satisfaction as mediation. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1), 86-93. doi: 10.26905/jmdk.v7i1.2692.
- Nuraeni, R., Eldine, A., & Muniroh, L. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. *Manager*, 2(4), 487-493. doi: 10.32832/manager.v2i4.3795.

- Özkan, P., Süer, S., Keser, İ. K., & Kocakoç, İ. D. (2020). The effect of service quality and customer satisfaction on customer loyalty: The mediation of perceived value of services, corporate image, and corporate reputation. *International Journal of Bank Marketing*, 38(2), 384-405. doi: 10.1108/IJBM-03-2019-0096.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41-45. doi: 10.1177/002224298504900403.
- Parlan, A. V., Kusumawati, A., & Mawardi, M. K. (2016). The effect of green marketing mix on purchase decision and customer satisfaction (Study on independent consultant of JAFRA Cosmetics Indonesia in Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(1), 172-178. Retrieved from <http://administrasi.bisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1548>.
- Pereira, D., Giantari, N. G. K., & Sukaatmadja, P. G. (2016). Pengaruh *service quality* terhadap *satisfaction* dan *customer loyalty* Koperasi Dadirah di Dili Timor-Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 455-488. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/15164>.
- Peter, J. P., & Olson, J. C. (2010). *Consumer behavior & marketing strategy* (9th Edition). McGraw-Hill/Irwin.
- Priansa, D. J. (2017). *Perilaku konsumen dalam persaingan bisnis kontemporer*. CV. Alfabeta.
- Rasyadi, M. A. (2019). Sampah kemasan makanan dan minuman mendominasi. *Greenpeace Indonesia*. Edisi tanggal 14 November. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4238/sampah-kemasan-makanan-dan-minuman-mendominasi/>.
- Saini, S., & Singh, J. (2020). A link between attitudinal and behavioral loyalty of service customers. *Business Perspectives and Research*, 8(2), 205-215. doi: 10.1177/2278533719887452.
- Sandeem, C. (2009). It's not easy being green: Green marketing and environmental consumerism in continuing higher education. *Continuing Higher Education Review*, 73, 93-113. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ903455>.
- Sari, I. G. A. W., & Setiawan, P. Y. (2019). Pengaruh green marketing dan packaging terhadap brand image dan loyalitas pelanggan pada konsumen Starbucks Coffee. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(7), 3820-2849. Retrieved from <https://jab.polinema.ac.id/index.php/jab/article/view/300>.
- Soelasih, Y. (2017). Kepuasan konsumen tidak selalu membentuk loyalitas. *Jurnal Manajemen*, 21(3), 363-380. doi: 10.24912/jm.v21i3.257.
- Starbucks, C. (2020). C.A.F.E. practices: Starbucks approach to ethically sourcing coffee. *Starbucks Stories & News*. Edisi tanggal 28 Februari. Retrieved from <https://stories.starbucks.com/press/2020/cafe-practices-starbucks-approach-to-ethically-sourcing-coffee/>.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*. Pustaka Baru.
- Sumarwan, U., Jauzi, A., Karno, B. N., Mawardi, P., & Nugroho, W. (2011). *Riset pemasaran dan konsumen*. PT. Penerbit IPB Press.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa – Prinsip, penerapan, dan penelitian*. CV. Andi Offset.
- Tsai, D., & Chen, C. F. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? *Tourism Management*, 28(4), 1115-1122. doi: 10.1016/j.tourman.2006.07.007.

- Wicaksana, G. E. G. (2014). Analisis loyalitas konsumen Starbucks terhadap brand Starbucks di Surabaya. *Commonline Departement Komunikasi*, 3(2), 132-141. Retrieved from <https://repository.unair.ac.id/15762/>.
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. *Journal of Marketing*, 60(2), 31-46. doi: 10.2307/1251929.
- Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2010). *Business research methods (8th ed)*. Cengage Learning.



Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Inequality Model of Economic Development in Indonesia

Rini Raharti¹⁾, Titi Laras²⁾, Oktavianti Oktavianti³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra, Yogyakarta

e-mail korespondensi: riniraharti@janabadra.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 17 Juni 2020 Disetujui: 18 Juli 2021 Dipublikasikan: Juli 2021	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan OLS (<i>ordinary least squares</i>). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar Propinsi di Indonesia tahun 2005-2019 tergolong tinggi karena setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, kenyataan ini sejalan dengan teori Neoklasik. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan yang dilakukan adalah pemerintah Propinsi di Indonesia sebaiknya perlu memperhatikan sektor yang menyerap tenaga kerja sebagai kontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemberdayaan masyarakat kecil. Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Jumlah Penduduk.
<i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.2422 <i>Cara Mensitasi :</i> Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 257-270. doi: 10.33059/jseb. v12i2.2422.	

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 17 June 2020 Accepted: 18 July 2021 Published: July 2021	<i>The purpose of this study is to analyze the effect of economic growth on the level of development inequality between provinces in Indonesia. The research method used is multiple linear regression analysis with OLS (ordinary least squares). The results of the analysis show that the inequality of economic development between provinces in Indonesia in 2005-2019 is relatively high because every year there is a significant increase, this fact is in line with the Neoclassical theory. Economic growth, poverty rate and population have a positive effect on inequality in economic development. The policy implication is that the provincial government in Indonesia should pay attention to sectors that absorb labor as a contribution to the level of economic growth and empower small communities.</i> Keywords: Development Inequality, Economic Growth, Poverty Rate, Population.
<i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.2422 <i>How to cite :</i> Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 257-270. doi: 10.33059/jseb. v12i2.2422.	

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena yang banyak terjadi dalam aspek perekonomian daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan kondisi demografi dan sumber daya alam pada daerah masing-masing. Oleh karena itu, daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mendorong proses pembangunan ekonomi. Setiap daerah memiliki wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2014; Fahrizal *et al.*, 2019).

Ketimpangan yang terjadi antar wilayah memberi dampak atas tingkat kesejahteraan antar wilayah. Faktor ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat juga membawa dampak terhadap pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan arah pembangunan (Andini & Mandasari, 2017; Prastowo, 2014). Selain itu, masalah-masalah sosial di dalam proses pembangunan daerah relatif tidak ada, sehingga adanya proses pembangunan dapat dimanfaatkan secara merata antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya, sumberdaya manusia, fisik, teknologi dan kapital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda didalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan (Kamaruddin & Alam, 2018; Khabhibi, 2013). Konsekuensinya, dengan adanya proses pembangunan yang diterapkan di negara-negara maju mengakibatkan ketimpangan antar wilayah menjadi rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga semua harus memahami hakikat serta sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan satu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan

ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui investasi, penggunaan teknologi modern, peningkatan keterampilan (*skill*), peningkatan pengetahuan, kemampuan berorganisasi dan manajerial (Heinrich *et al.*, 2020; Firdaus, 2013).

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan pembangunan antar wilayah secara absolut maupun relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat mengakibatkan permasalahan yang terjadi di daerah. Adanya ketimpangan antar pusat dengan daerah atau antar wilayah satu dengan yang lainnya sudah biasa terjadi. Hal tersebut karena adanya perbedaan sumber daya alam pada tiap daerah (Heinrich *et al.*, 2020; Andini & Mandasari, 2017).

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terdiri dari faktor-faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 2017; Azizi, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dipengaruhi beberapa komponen seperti investasi dan tenaga kerja. Menurut teori Neo Klasik, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi yakni faktor penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Pembentukan modal akan menghasilkan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi produksi dalam skala luas terkait peningkatan spesialisasi. Selain itu, pembentukan modal dapat meningkatkan alat, mesin dan perlengkapan bagi tenaga kerja.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah beberapa rangkaian kegiatan ekonomi berbagai periode dan menyebabkan pendapatan nasional secara riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan tingkat persentase kenaikan pendapatan nasional secara riil pada

suatu tahun tertentu terhadap pendapatan nasional secara riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2017; Azizi, 2020).

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadi secara berkelanjutan merupakan fenomena yang harus terwujud bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi akibat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau produk domestik bruto (PDB). Menurut tinjauan makro ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto atau terjadinya penambahan pendapatan nasional (Sohag *et al.*, 2019; Prastowo *et al.*, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah atau daerah menyebabkan tujuan negara tidak dapat terwujud. Perbedaan potensi daerah-daerah yang ada di Indonesia baik secara geografis maupun sumber daya alamnya, mengakibatkan daerah yang memiliki potensi tinggi akan lebih maju dan makmur dibandingkan dengan daerah lainnya (Bachtiar, 2015; Kamaruddin & Alam, 2018). Kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni dengan cara mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah atau daerah.

Khan *et al.* (2019) mengemukakan bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah adalah salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan (Mukhtar *et al.*, 2019; Yacoub, 2012). Artinya, jika PDRB per kapita daerah semakin besar maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat; sedangkan, jika

semakin kecil nilai PDRB per kapita maka semakin menurun kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori *fiscal federalism* dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah (Moges, 2013; Ponce-Rodriguez *et al.*, 2020). Terwujudnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan juga tidak bisa terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), tata kelola keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, mengikuti aturan perundang-undangan, transparan, ekonomis, efektif, efisien dan ada pertanggungjawaban serta mematuhi azas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat (Hermawan *et al.*, 2020).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan yang rendah dan hidup yang serba kekurangan saja, tetapi dapat menyangkut banyak hal seperti tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, perlakuan yang tidak adil terhadap hukum, adanya ancaman terhadap tindak kriminal, ketidakmampuan menentukan jalan hidupnya sendiri (Buheji *et al.*, 2020; Ginting, 2015). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi di bidang ekonomi mendorong semua negara dapat berperan serta dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, juga terjadi ketidakpastian dan terjadi resiko. Negara miskin bisa diukur dengan tingkat pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhan penduduknya tinggi yakni lebih dari 2 persen per tahun (Peterson, 2017).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi hal yang prioritas di bidang ekonomi. Kondisi tersebut dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan jumlah penduduk miskin yang semakin banyak. Dari tahun ke tahun, Pemerintah selalu mencanangkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan (Putri & Almahmudi, 2020; Mukhtar *et al.*, 2019). Namun demikian, faktanya jumlah penduduk miskin yang terdapat di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan, meskipun data dari BPS menunjukkan adanya kecenderungan penurunan pada penduduk miskin. Artinya, jumlah penduduk miskin secara kualitatif belum menunjukkan perubahan yang signifikan; melainkan terjadi sebaliknya, yakni fenomena yang semakin memprihatinkan setiap tahunnya.

Xiao (2017) berargumen munculnya kemiskinan yang terus-menerus bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*). Kemunculan kondisi keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan rendahnya modal menjadi penyebab rendahnya nilai pendapatan yang diterima masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan akan mengakibatkan tabungan yang rendah, dan selanjutnya menyebabkan investasi juga rendah. Apabila ini diteruskan tanpa ada pemutusan rantai kemiskinan maka akan terus berputar. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah memperbaiki level keahlian (*skill*) sumberdaya manusia yang dapat berperan untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Saat ini kemiskinan di Indonesia sudah menjadi isu nasional dan pemerintah telah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, antara lain kebijakan pada pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah, peningkatan produktifitas pertanian serta sektor perdagangan (Buheji *et al.*, 2020; Ginting, 2015; Firdaus, 2013).

Penyebab lain yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Tingkat pendapatan merupakan indikator suatu masyarakat dikatakan makmur ataukah tidak. Level pendapatan masyarakat mencapai dengan baik jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud. Pengangguran dapat mengurangi tingkatan pendapatan masyarakat, sehingga kemakmuran suatu masyarakat tidak tercapai (Shammi *et al.*, 2020; Menike, 2018; Yacoub, 2012). Apabila tingkat pengangguran di suatu negara mengalami peningkatan, maka menimbulkan dampak buruk pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Jumlah Penduduk

Apabila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka dalam jangka panjang sumber daya alam akan habis (Menike, 2018; Preston & Donaldson, 1986). Akibatnya, muncul wabah penyakit, kelaparan yang meluas, dan berbagai macam persoalan ekonomi masyarakat. Kemiskinan muncul dengan tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja karena adanya latar belakang ketidakcocokan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Dikarenakan tingginya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja, memaksa para pencari kerja tersebut untuk memperoleh pekerjaan secara instan meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki karena ketatnya persaingan dalam pasar kerja (Bilan *et al.*, 2020; Conde *et al.*, 2020).

Kemajuan teknologi saat ini yang masuk ke semua lapisan masyarakat, faktanya akan membantu dalam segala bidang. Peralatan-peralatan impor yang digunakan akan meringankan beban pekerjaan manusia, yang dapat menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Tetapi dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat masih belum puas dengan

barang-barang impor yang banyak di pasar lokal karena justru menimbulkan masalah baru yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

Dampak selanjutnya yang muncul di dalam masyarakat yaitu adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi akan berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, tingkat kriminalitas dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan faktor sosial dan politik yang semakin meningkat (Soares *et al.*, 2015; Khan *et al.*, 2020; Misin & Badivuku-Pantina, 2017). Dengan tingginya jumlah angkatan kerja, arus migrasi yang terus berdatangan, maka menimbulkan permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks. Munculnya masalah pengangguran yang berkepanjangan, maka akan terjadi masalah baru yang kemungkinan besar akan timbul krisis sosial, yang terjadi tidak hanya pada para pencari kerja yang baru lulus sekolah, akan tetapi bisa menimpa para orang tua yang kehilangan pekerjaan dikarenakan banyaknya pabrik dan kantor-kantor yang ditutup. Permasalahan sosial akan mengganggu aktivitas kehidupan seperti makin maraknya tindak kriminalitas, anak-anak yang turun ke jalan, pengamen, pedagang asongan dan lain-lain. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang tidak memperoleh pendidikan yang layak dan pembinaan yang baik.

Dari sejumlah problem tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam artikel ini yaitu seberapa besar tingkat pengaruh dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Variabel pertama yang dianalisis adalah indeks ketimpangan pembangunan ekonomi.

Indeks ini dihitung menggunakan formula indeks Gini Rasio (Hairani & Syahputri, 2016; Reza *et al.*, 2019), yakni pendapatan dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 antar provinsi di Indonesia selama tahun 2005-2019. Indeks ketimpangan pembangunan ekonomi diukur menggunakan parameter bernilai 0 sampai 1 atau $0 < VW < 1$.

Variabel kedua adalah laju pertumbuhan ekonomi, yakni perhitungan dari selisih antara tingkat PDRB per tahun tertentu dan PDRB pada tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2009). Parameter yang digunakan untuk menghitung besaran laju pertumbuhan ekonomi adalah dalam satuan persentase.

Variabel ketiga yang dianalisis adalah tingkat kemiskinan, yaitu nilai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota di seluruh provinsi di wilayah Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2009). Parameter yang dipakai menggunakan dalam satuan persentase.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan

Data yang digunakan seluruhnya adalah data sekunder, yaitu berkenaan dengan variabel-variabel yang dianalisis di dalam penelitian ini yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Indonesia untuk periode 2005.Q₁ sampai 2019.Q₄.

Data dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan data terkait dengan objek penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Tahap pertama adalah melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas.

Uji normalitas bertujuan melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2014; Sugiyono, 2019). Uji ini dilakukan melalui metode *chi-square* atau χ^2 untuk uji *goodness of fit* distribusi normal menggunakan kriteria keputusan bahwa jika nilai JB-statistik $< \chi^2$ maka dinyatakan model penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji linearitas bertujuan mengetahui apakah dua variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan yang linier atau tidak, secara signifikan (Riduwan, 2015; Sudjana, 2016). Uji ini pada umumnya digunakan untuk persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linier. Kriteria keputusan bahwa jika nilai probabilitas (p) $> \alpha$ (0,05) maka dinyatakan model penelitian telah memenuhi asumsi linieritas.

Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana varian dari nilai sisa tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika nilai varian dan nilai sisa adalah sama antar pengamatan maka kondisi ini disebut dengan kondisi homoskedastisitas (Siregar, 2014; Sudjana, 2016). Model regresi yang digunakan diharapkan berada pada kondisi homoskedastisitas, bukan kondisi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas di penelitian ini menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey, dimana kriteria keputusan adalah jika nilai Prob. X^2 statistik $< \alpha$ (0.05) maka dinyatakan model penelitian tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Autokorelasi terjadi karena adanya satu observasi yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau data *time series*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau data *cross-sectional*) mengandung residual (kesalahan pengganggu) tidak terbebas dari observasi yang lain (Sugiyono, 2019; Riduwan, 2015). Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka bisa mengakibatkan koefisien

regresi yang dihasilkan tidak efisien sehingga tidak dapat dilakukan, ataupun menyebabkan uji t dan uji F tidak lagi menjadi valid dan kurang akurat karena taraf keyakinan akan semakin lebar. Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-Test* dengan kriteria keputusan yaitu jika nilai DW-test berada di daerah $du < DW < 4-du$ maka dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian.

Multikolinearitas merupakan kondisi yang terjadi dengan adanya korelasi variabel-variabel independen diantara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel-variabel independen yang dianalisis (Siregar, 2014; Sugiyono, 2019). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinieritas. Kriteria keputusannya adalah jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ ataupun nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) > 10 maka model penelitian dinyatakan tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda

Tahap berikutnya adalah analisis regresi berganda (*multiple linier regression*) yang bertujuan menghubungkan variabel Y dengan dua atau lebih variabel X (Sugiyono, 2019; Sudjana, 2016). Model regresi penelitian ini menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dengan tingkat ketimpangan pembangunan, dengan formulasi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dimana Y yaitu indeks ketimpangan pembangunan ekonomi; X_1 adalah pertumbuhan ekonomi; X_2 adalah tingkat kemiskinan; X_3 adalah jumlah penduduk; β_0 adalah konstanta; β_1 sampai β_3 adalah koefisien regresi dari variabel X_1 sampai X_3 ; dan, ε adalah *error*

term. Nilai koefisien regresi menyatakan arah dan besaran pengaruh dari suatu variabel X terhadap variabel Y.

Uji Hipotesis

Tahap terakhir adalah melakukan uji hipotesis menggunakan uji *t* (*t-test*) dan uji *F* (*F-test*), serta analisis koefisien determinasi.

Uji *t* digunakan untuk mengukur apakah suatu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Sudjana, 2016; Sugiyono, 2019). Kriteria keputusan adalah jika nilai *Sig. t* lebih kecil dari α (0,05) maka dinyatakan variabel independen yang bersangkutan memiliki pengaruh signifikan atas variabel dependen; sebaliknya, jika nilai *Sig. t* lebih besar dari α (0,05) maka dinyatakan bahwa variabel independen itu memiliki pengaruh yang tidak signifikan atas variabel dependen.

Uji *F* digunakan untuk menilai apakah semua variabel independen yang dicakup dalam model penelitian secara simultan berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan atas variabel dependen (Sudjana, 2016; Sugiyono, 2019). Kriteria keputusan yang digunakan adalah jika nilai *Sig. F* lebih kecil dari α (0,05) maka dinyatakan bahwa semua variabel independen yang dianalisis memiliki pengaruh simultan yang signifikan atas variabel dependen; sebaliknya, jika nilai *Sig. F* lebih besar dari α (0,05) maka dinyatakan bahwa semua variabel independen yang dianalisis memiliki pengaruh simultan yang tidak signifikan atas variabel dependen.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi atas variabel dependen (Sugiyono, 2019; Siregar, 2014). Angka koefisien determinasi berada dalam kisaran nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati 0 (nol) berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat

terbatas atau kecil; sebaliknya, apabila R^2 mendekati nilai 1 (satu) berarti variabel independen yang dianalisis dianggap mampu memprediksi variasi dari variabel dependen.

HASIL ANALISIS

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil pengolahan data berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai *Jarque-Bera* (JB-statistik) sebesar 2,278362, serta nilai *probability* sebesar 0,328954. Pada nilai JB-statistik tersebut dengan *df* sebesar 217 maka diperoleh nilai χ^2 -tabel sebesar 97.948,86. Dikarenakan nilai JB-statistik (2.278362) < χ^2 -tabel (97.948.86), maka berdasarkan hasil uji normalitas dinyatakan model dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Berikutnya, Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan berdasarkan uji linieritas bahwa diperoleh nilai F-statistik sebesar 1,232789 dengan probabilitas (*p*) sebesar 0,0015. Karena nilai probabilitas (*p*) < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini telah memenuhi asumsi linieritas.

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas memakai *Breusch-Pagan-Godfrey test*, dimana jika nilai *prob. F*-statistik sebesar 0,0654 dengan α sebesar 0,05 maka diperoleh nilai *prob. χ^2* -statistik sebesar 0,0379. Dikarenakan nilai *prob. χ^2* -statistik < α (0,05) maka dinyatakan bahwa model yang diestimasi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Pada hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai DW sebesar 1,547836, $n > 60$ $k < 2$. Dengan demikian, diperoleh nilai $Dl = 1,3093$ dan $Du = 1,5736$, sehingga hasil diperoleh adalah: $dl < du < dw < 4 - du < 4 - dl$, atau $1,3093 < 1,5736 < 1,547836 < 1,1769 < 1,7323$. Hasil perhitungan uji Durbin Watson menunjukkan nilai *DW-test* sebesar 1,547836 berada di daerah antara $du < DW < 4-du$, maka bisa dinyatakan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Linieritas

	<i>Value</i>	<i>df</i>	<i>Probability</i>
<i>t</i> -statistik	3,511109	28	0,0015
<i>F</i> -statistik	1,232789	(1,28)	0,0015
<i>Likelihood ratio</i>	1,167484	1	0,0006

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>F</i> -statistik	3,788294	<i>Prob. F</i> (2,29)	0,0654
<i>Obs*R-squared</i>	6,628580	<i>Prob. Chi-Square</i> (2)	0,0379
<i>Scaled explained SS</i>	7,346007	<i>Prob. Chi-Square</i> (2)	0,0254

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
X1	2.90E-05	1.921751	1.045553
X2	0.001334	57.36368	1.045553
C	1.77E+10	55.26181	NA

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien</i>	<i>t</i>	<i>Prob.</i>
C	2.893.963	18,26628	0,0000
X ₁	-0,038755	-3,993858	0,0037
X ₂	0,178839	3,936399	0,0049
X ₃	0.254846	3,173661	0,0261
<i>F</i> -hitung	=	29,35538	
<i>Sig. F</i>	=	0,000007	
<i>R-Squared</i>	=	0,7893	
<i>Adjusted R-Squared</i>	=	0,7152	
<i>DW-Stat</i>	=	0,625	
N	=	60	

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang dirangkum dalam Tabel 3 diperoleh nilai VIF adalah sebesar kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* kurang dari 0,10. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Rangkuman hasil analisis data dalam Tabel 4 secara matematis menunjukkan formula regresi linier berganda bagi model penelitian ini adalah:

$$Y = 2.893.963 - 0,038755 X_1 + 0,178839 X_2 + 0,254846 X_3$$

Model regresi berganda yang diperoleh untuk penelitian ini menunjukkan pengaruh dari variabel independen X_1 memiliki arah yang negatif terhadap variabel dependen (Y). Artinya, apabila terjadi arah kenaikan pada variabel pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen yang lain tidak mengalami perubahan atau bernilai tetap, maka terjadi perubahan yang menurun atas besaran dari ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada variabel pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen yang lain bernilai tetap, maka terjadi kenaikan atas besaran dari ketimpangan pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, model regresi berganda tersebut menunjukkan pengaruh dari variabel independen X_2 dan X_3 memiliki arah yang positif terhadap variabel dependen (Y). Artinya, apabila terjadi arah kenaikan pada salah satu antara variabel tingkat kemiskinan atau variabel jumlah penduduk, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen yang lain tidak mengalami perubahan atau bernilai tetap, maka terjadi kenaikan atas besaran ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada variabel tingkat kemiskinan atau variabel jumlah penduduk, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen lain bernilai tetap, maka terjadi penurunan atas besaran dari ketimpangan pembangunan ekonomi.

Model regresi berganda tersebut juga menunjukkan variabel X_3 ($\beta_3 = 0,254846$) memiliki nilai koefisien regresi paling besar dibandingkan variabel X_1 ($\beta_1 = -0,038755$) dan variabel X_2 ($\beta_2 = 0,178839$). Dengan demikian, hasil ini menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh dominan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi ketimbang pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji terkait hubungan parsial antara variabel independen dan variabel dependen juga dirangkum dalam Tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut diidentifikasi bahwa nilai *Sig. t* untuk masing-masing variabel independen ($X_1 = 0,0037$; $X_2 = 0,0049$; $X_3 = 0,0261$) adalah lebih kecil dari α (0,05). Dengan demikian, dinyatakan bahwa variabel-variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini (yaitu: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan jumlah penduduk) memiliki pengaruh signifikan atas ketimpangan pembangunan ekonomi sebagai variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji simultan dalam Tabel 4, diidentifikasi nilai *Sig. F* sebesar 0,000007. Karena nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05) maka dinyatakan variabel-variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini (yaitu: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan jumlah penduduk) secara simultan memiliki pengaruh signifikan atas ketimpangan pembangunan ekonomi sebagai variabel dependen.

Terakhir, berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) dengan metode OLS sebesar 0,7152. Hasil ini memiliki arti bahwa variasi atas ketimpangan pembangunan ekonomi selaku variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dicakup dalam model penelitian ini sebesar 71,52%; sedangkan sisanya sebesar 28,48% menunjukkan masih adanya variabel-variabel lain yang tidak dicakup di dalam model ini namun terindikasi ikut mempengaruhi perubahan dari variabel dependen.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Hasil ini menyatakan bahwa apabila Indonesia mampu mengalami

peningkatan pertumbuhan ekonomi maka terjadi penurunan atas derajat ketimpangan pembangunan ekonomi nasional; sebaliknya, jika Indonesia malah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi maka dapat terjadi kenaikan atas ketimpangan pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan suatu negara dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana bila pertumbuhan ekonomi tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan negara tersebut sangat baik (Heinrich *et al.*, 2020; Sohag *et al.*, 2019; Kamaruddin & Alam, 2018). Kondisi saat ini yang teridentifikasi pembangunan banyak terpusat dikota-kota besar khususnya di Pulau Jawa sedangkan di kawasan Indonesia Bagian Timur dinilai masih kurang berkembang. Hal ini berarti terjadi tingkat pembangunan yang tidak merata antar daerah yang selanjutnya kondisi ini menurut para ahli menyebabkan semakin besarnya ketimpangan ekonomi nasional (Khan *et al.*, 2019; Ponce-Rodriguez *et al.*, 2020; Firdaus, 2013). Kondisi ini yang harus direspon pemerintah baik yang berada di pusat maupun daerah untuk menetapkan bentuk-bentuk kebijakan yang bisa memberi stimulus bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian kedua menyatakan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Artinya, semakin rendah tingkat kemiskinan yang dicapai maka semakin rendah pula level ketimpangan pembangunan ekonomi nasional yang terjadi. Sebaliknya, jika tingkat kemiskinan bisa ditekan menjadi rendah maka akan mendorong penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi dan bisa mendorong capaian pembangunan ekonomi yang semakin baik.

Studi milik Pangkiro *et al.* (2016) memperoleh nilai koefisien elastisitas dari pengaruh tingkat kemiskinan atas disparitas ekonomi sebesar 9,5 yang signifikan pada α sebesar 0,03 atau 3%. Hasil ini menyatakan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan akan mempertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Kondisi saat ini dinilai menunjukkan bahwa Indonesia telah relatif berhasil meningkatkan angka lamanya hidup, tingkat pengetahuan/pendidikan serta kelayakan standar hidup. Rendahnya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa secara nasional, kesehatan semakin baik, pendidikan semakin tinggi serta standar hidup layak semakin tinggi (Buheji *et al.*, 2020; Shammi *et al.*, 2020; Menike, 2018; Xiao, 2017). Sejumlah kondisi ini dapat memberi konklusi akhir bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi nasional semakin berkurang.

Hasil penelitian yang ketiga menyatakan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif signifikan atas ketimpangan pembangunan ekonomi. Hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka memperbesar probabilitas tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, semakin sedikit jumlah penduduk secara relatif maka memperkecil probabilitas tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi nasional yang terjadi. Hal ini karena dinilai bahwa semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara maka memperbesar probabilitas meningkatnya pengangguran di negara itu, yang bisa mendorong peningkatan jumlah kemiskinan (Soares *et al.*, 2015; Khan *et al.*, 2020; Misin & Badivuku-Pantina, 2017). Penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar diri mereka.

Pemerintah seharusnya mengupayakan tindakan agar masyarakat Indonesia tidak terpuruk di dalam kondisi kemiskinan. Begitupun untuk tahun-tahun kedepannya, dengan harapan agar pemerintah mempunyai kesadaran akan masyarakat kecil, karena di daerah-daerah terpencil masih banyak warga yang mengeluh akibat tidak adanya mata pencaharian dan penghasilan yang cukup, jadi setidaknya memberi mereka peluang usaha ataupun pekerjaan yang memadai (Chen & Haynes, 2017; Menike, 2018; Bilan *et al.*, 2020; Conde *et al.*, 2020). Program ini tentunya akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di samping juga berpengaruh terhadap masyarakat kecil untuk kelangsungan hidupnya. Program pemerintah ini juga tentunya akan sangat membantu sehingga masyarakat tidak akan terbebani dengan kemiskinan yang menimpa mereka dalam fenomena tersebut, tentunya bisa mengurangi besaran nilai ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada.

SIMPULAN

Hasil penelitian berbasis indeks Gini rasio ini menyimpulkan beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian di Indonesia selama periode 2005-2019.

Kesimpulan pertama, level ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia tahun 2005 -2019 tergolong tinggi, dikarenakan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Kenyataan ini sejalan dengan teori Neo Klasik yang diuraikan terdahulu. Terlihat juga bahwa indeks ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia tersebut cenderung meningkat antar provinsi di Indonesia.

Kesimpulan kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diartikan, jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka ketimpangan

pembangunan ekonomi juga akan mengalami peningkatan, demikian juga sebaliknya.

Kesimpulan ketiga, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diartikan, jika tingkat kemiskinan mengalami penurunan, maka ketimpangan pembangunan ekonomi juga akan mengalami penurunan, demikian juga sebaliknya.

Kesimpulan terakhir, jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Hal ini bisa diartikan bahwa jika jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka ketimpangan pembangunan ekonomi juga mengalami peningkatan; demikian juga sebaliknya.

REFERENSI

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. *JENSI (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi)*, 1(2), 196-210. Retrieved from <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jensi/article/view/412>.
- Azizi, S. S. (2020). Impact of remittances on financial development. *Journal of Economic Studies*, 47(3), 476-477. doi: 10.1108/JES-01-2019-0045.
- Bachtiar, A. (2015). Pemetaan potensi pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan tipologi Klassen di Surabaya dan sekitarnya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 1-11. Retrieved from <http://eprints.upnjatim.ac.id/6677/>.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Pedoman praktis penghitungan produk domestik regional bruto kabupaten/kota, Tata cara penghitungan menurut penggunaan*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kemiskinan dan ketimpangan*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

- Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). An analysis of intellectual potential and its impact on the social and economic development of European countries. *Journal of Competitiveness*, 12(1), 22–38. doi: 10.7441/joc.2020.01.02.
- Buheji, M., Cunha, K. C., Beka, G., Mavrić, B., de Souza, Y. L. C., Silva, S. S. C., Hanafi, M., & Yein, T. C. (2020). The extent of COVID-19 pandemic socio-economic impact on global poverty: A global integrative multidisciplinary review. *American Journal of Economics*, 10(4), 213–224. doi: 10.5923/j.economics.20201004.02.
- Chen, Z., & Haynes, K. E. (2017) Impact of high-speed rail on regional economic disparity in China. *Journal of Transport Geography*, 65(August), 80–91. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2017.08.003.
- Conde, J. M. P., Ortiz, C. C., & Álvarez, J. C. M.. (2020). Comparison of the determinants of the potential of economic development of the municipalities of Andalusia with population range 15.000-20.000 Inhabitants between the years 2007 and 2012. *Revista De Estudios Regionales*, 118, 115-147. Retrieved from <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/115051/1/articulo%20idus.pdf?sequence=1>.
- Fahrizal, Sarfiah, S. N., & Juliprijanto, W. (2019). Analisis ketimpangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(4), 399-417. doi: 10.31002/dinamic.v1i4.803.
- Firdaus, M. (2013). Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia: Fakta dan strategi inisiatif. *Orasi Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh ketimpangan pembangunan antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45-58. doi: 10.22212/kajian.v20i1.569.
- Hairani, P. R. S., & Syahputri, A. R. (2016). Analisis ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan*, 16(1), 56-76. doi: 10.30596%2Fekonomikawan.v16i1.1018.
- Heinrich, T., Yang, J., & Dai, S. (2020). Growth, development, and structural change at the firm level: The example of the PR China. *Working Papers on East Asian Studies*, No 128/2021. Retrieved from <https://arxiv.org/pdf/2012.14503.pdf>.
- Hermawan, A. W., Sinaga, H. D. P., & Barus, L. B. (2020). Legal reconstruction of tax-sharing funds in Indonesia: towards the progressive and democratic tax function. *Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*, 153–159. doi: 10.2991/assehr.k.201209.279.
- Kamaruddin, C. A., & Alam, A. (2018). Analisis potensi sektor unggulan dan pemetaan kemiskinan masyarakat di wilayah Maminasata Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(2), 85-98. doi: 10.26858/ja.v5i2.7886.
- Khabhibi, A. (2013). *Ekonomi pembangunan: Teori masalah dan kebijakan (Edisi Ketiga)*. UPP AMP YKPN.
- Khan, M. I., Iqbal, A., Zaman, S. I., & Wajidi, F. (2020). Economic development and unemployment: A missing link. *Market Forces*, 15(2), 81-100. doi: 10.51153/mf.v15i2.463.
- Khan, S. A. R., Jian, C., Zhang, Y., Golpîra, H., Kumar, A., & Sharif, A. (2019). Environmental, social and economic growth indicators spur logistics performance: From the perspective of South Asian association for regional cooperation countries. *Journal of Cleaner Production*, 214, 1011–1023. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.322.

- Menike, H. R. A. (2018). A literature review on population growth and economic development. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 5(5), 67-74. doi: 10.20431/2349-0381.0505009
- Misin, S., & Badivuku-Pantina, M. (2017). The effect of economic growth in relation to unemployment. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 18(2), 1-9. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-economic-growth-in-relation-to-unemployment-6778.html>.
- Moges, A. G. (2013). Fiscal federalism in theory and practice. *Ethiopian e-Journal for Research and Innovation Foresight*, 5(1), 6-32. Retrieved from <https://journals.bdu.edu.et/index.php/eejrif4/article/viewFile/281/371>.
- Mukhtar, R., Wijaya, A., & Roy, J. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran serta indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 4(3). doi: 10.29264/jiem.v4i3.5936.
- Peterson, E. W. F. (2017). The role of population in economic growth. *SAGE Open*, 7(4), 1-15. doi: 10.1177/2158244017736094.
- Ponce-Rodríguez, R. A., Hankla, C. R., & Martinez-Vazquez, J. (2020). The politics of fiscal federalism: Building a stronger decentralization theorem. *Journal of Theoretical Politics*, 32(4), 605-639. doi: 10.1177/0951629820956287.
- Prastowo, Y., dkk. (2014). *Ketimpangan pembangunan Indonesia dari berbagai aspek*. Infid.
- Preston, S. H., & Donaldson, P. (1986). Population growth and economic development. *Asia-Pacific Population Journal*, 1(2), 3-12. Retrieved from <https://www.unescap.org/sites/default/files/APPJ-Vol-1-No-2.pdf>.
- Putri, N. T., & Almahmudi, A. (2020). Analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Bengkulu (Telaah posisi 3 kabupaten induk). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(1), 70-90. doi:10.33369/convergence-jep.v2i1.12075.
- Reza, M., Jamal, A., & Zulham, T. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan wilayah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 17-32. doi: 10.24815/ekapi.v6i1.14256.
- Riduwan. (2015). *Dasar-dasar statistika*. Alfabeta.
- Shammi, M., Bodrud-Doza, M., Islam, A. R. M. T., & Rahman, M. M. (2021). Strategic assessment of COVID-19 pandemic in Bangladesh: Comparative lockdown scenario analysis, public perception, and management for sustainability. *Environment, Development and Sustainability*, 23, 6148–6191. doi: 10.1007/s10668-020-00867-y.
- Siregar, S. (2014). *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif: Dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17 (Edisi 1)*. Bumi Aksara.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan pembangunan dalam era otonomi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), doi: 10.33366/jisip.v4i2.102.
- Sohag, K., Taşkın, F. D., & Malik, M. N. (2019). Green economic growth, cleaner energy and militarization: Evidence from Turkey. *Resources Policy*, 63(October), No. 101407. doi: 10.1016/j.resourpol.2019.101407.
- Sudjana. (2016). *Metode statistika*. Taristo.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi kedua)*. Alfabeta.

- Sukirno, S. (2017). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Kencana.
- Xiao, A. H. (2017). Exploring social interactions between chinese immigrants and corruption in Nigeria. in Adeniran A., Ikuteyijo L. (eds). *Africa Now! Emerging Issues and Alternative Perspectives*. Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-319-62443-3_9.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8(3), 176-185. Retrieved from https://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06-eksos%204%20yarlina%20okt12.pdf.



Pengaruh Karakteristik Individu dan Faktor Ekstrinsik terhadap Kinerja Bidan

The Influence of Individual Characteristics and Extrinsic Factors toward the Performance of Midwives

Herna Linda¹⁾, Zulfendri Zulfendri²⁾, Juanita Juanita³⁾

¹⁾Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan

^{2,3)}Direktorat Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan

e-mail korespondensi: lindaherna607@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 22 April 2021 Disetujui: 30 Juli 2021 Dipublikasikan: Juli 2021 <i>Nomor DOI</i> 10.33059/jseb.v12i2.3467 <i>Cara Mensitasi :</i> Linda, H., Zulfendri, Z., & Juanita, J. (2021). Pengaruh karakteristik individu dan faktor ekstrinsik terhadap kinerja bidan. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 271-285. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3467.	Kinerja bidan sebagai bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki rumah sakit akan mempengaruhi kinerja institusi jasa kesehatan yang bersangkutan secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik individu (meliputi umur, masa kerja, status kepegawaian, keterampilan, dan motivasi) serta faktor ekstrinsik (meliputi imbalan, beban kerja, supervisi, dan pelatihan) terhadap kinerja bidan. Penelitian survey eksplanatori ini menggunakan seluruh bidan yang bertugas di ruang kebidanan rawat inap RSUD Langsa yang berjumlah 47 orang sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepegawaian, keterampilan dan motivasi dari karakteristik individu serta supervisi dan pelatihan dari faktor ekstrinsik yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan. Lebih jauh, motivasi diidentifikasi sebagai variabel yang dominan mempengaruhi kinerja bidan. Kata Kunci: Karakteristik Individu, Faktor Ekstrinsik, Kinerja Bidan.

Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> Received: 22 April 2021 Accepted: 30 July 2021 Published: July 2021 <i>DOI Number :</i> 10.33059/jseb.v12i2.3467 <i>How to cite :</i> Linda, H., Zulfendri, Z., & Juanita, J. (2021). Pengaruh karakteristik individu dan faktor ekstrinsik terhadap kinerja bidan. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 12(2), 271-285. doi: 10.33059/jseb.v12i2.3467.	<i>The performance of the midwife as part of the human resources owned by the hospital will affect the performance of the health service institution concerned as a whole. The purpose of this study was to analyze the effect of individual characteristics (including age, years of service, employment status, skills, and motivation) and extrinsic factors (including rewards, workload, supervision, and training) on the performance of midwives. This explanatory survey research used all of the midwives who served in the inpatient obstetrics room at Langsa Hospital, amounting to 47 people as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed by logistic regression method. The results showed that employment status, skills and motivation from individual characteristics as well as supervision and training from extrinsic factors had a significant effect on the performance of midwives. Furthermore, motivation was identified as the dominant variable influencing the performance of midwives.</i> Keywords: Individual Characteristics, Extrinsic Factors, Midwife Performance.

PENDAHULUAN

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri sendiri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, sehingga potensi insaninya berkembang maksimal. Satu hal yang makin disadari pada dasa warsa ini adalah sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling tinggi dibanding dengan sumber daya lainnya (Azwar, 2014; Buil *et al.*, 2018; Purwanto *et al.*, 2020). Bidan sebagai salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh rumah sakit yang harus dikelola dengan tepat dalam proses menghasilkan jasa medis dan merupakan salah satu bagian yang paling penting dan tanggung jawab yang paling menantang dalam usaha kesehatan. Apalagi seiring kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat, tuntutan kebutuhan masyarakat akan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan suatu tantangan yang cukup berat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala ruangan kebidanan di RSUD Kota Langsa diperoleh fenomena kemampuan dan pengalaman sebagai bidan masih belum maksimal dimana keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan masih terbatas pada keterampilan bersifat esensial dasar namun kurang memiliki kompetensi berbasis emergensi komprehensif, sementara berdasarkan data yang diperoleh bahwa 68,7% kasus yang dirujuk ke rumah sakit adalah kasus yang memerlukan penanganan komprehensif. Selain itu, terindikasi pengalaman yang diperoleh lebih berasal dari pengalaman selama bekerja di rumah sakit, namun hanya sedikit pengalaman yang sesuai dengan kompetensi bidan, sehingga terlihat bahwa bidan yang memberikan asuhan kebidanan

mayoritas adalah yang telah lama bekerja dan yang berusia rata-rata diatas 35 tahun.

Dalam menghadapi perkembangan yang kompetitif dan terglobalisasi, perusahaan membutuhkan karyawan yang berprestasi tinggi; karenanya perlu dilakukan penilaian yang menggambarkan kinerja karyawan (Rivai *et al.*, 2012; Andayani & Tirtayasa, 2019). Kinerja SDM adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, sasaran/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Mulyasari, 2018; Murti & Srimulyani, 2013; Diamantidis & Chatzoglou, 2019). Kinerja merupakan konstruksi multidimensi yang mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhinya (Mangkuprawira, 2012; Ardiansyah & Sulistiyowati, 2018). Artikel ini berfokus pada karakteristik individu yang meliputi umur, masa kerja, status kepegawaian, keterampilan, dan motivasi, serta faktor ekstrinsik yang meliputi imbalan, beban kerja, supervisi, dan pelatihan.

Beberapa hal yang telah disebutkan menjadi alasan meneliti fenomena tentang pengaruh dari karakteristik individu serta faktor ekstrinsik terhadap kinerja bidan. Obyek penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, khususnya di ruang kebidanan rawat inap.

Kinerja Bidan

Sasaran utama manajemen sumberdaya manusia adalah menciptakan sistem pemberdayaan personil yang dapat menampilkan kinerja produktif. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas ataupun kualitas sesuatu yang

dihasilkan atau jasa yang diberikan seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan standar yang ditetapkan (Luthans *et al.*, 2015; Dessler, 2016).

Kinerja juga adalah tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas baik secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan yang disepakati bersama (Rivai *et al.*, 2015; Sutrisno, 2015). Dengan demikian, manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan ataupun organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan.

Proses penilaian prestasi ditujukan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Penilaian kinerja perlu memiliki standar kinerja serta ukuran kinerja. Sistem penilaian memerlukan standar kinerja yang mencerminkan seberapa jauh keberhasilan sebuah pekerjaan telah dicapai (Sutrisno, 2015; Yuniarsih, 2013; Luthans *et al.*, 2015). Agar efektif, standar perlu berhubungan dengan hasil yang diinginkan dari tiap pekerjaan. Hal tersebut dapat diuraikan dari analisis pekerjaan dengan menganalisis hubungannya dengan kinerja karyawan saat sekarang.

Bidan sebagai suatu profesi disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan/mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan ibu dan janinnya, dengan wilayah pelayanan berada di mana-mana dan kapan saja selama ada proses reproduksi manusia (Batbuall, 2019; Suryani *et al.*, 2020). Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya didasarkan kepada kompetensi dan kewenangan yang diberikan,

yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 900/Menkes/SK/VIII/2002 dimana wewenang seorang bidan mencakup: (1) pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak; (2) pelayanan Keluarga Berencana; serta, (3) pelayanan kesehatan masyarakat.

Nilai kinerja bidan yang dianalisis pada artikel ini berpedoman dari penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yaitu: (a) 91 – keatas dinilai “Sangat Baik”; (b) 76-90 dinilai Baik; (c) 61-75 dinilai “Cukup”; (d) 51-60 dinilai “Kurang”; dan, (e) 50 ke bawah dinilai “Buruk”.

Penilaian ini selanjutnya dihubungkan dengan indikator kinerja utama, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggungjawab (Wirawan, 2012; Mangkunegara, 2010). Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan; kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja masing-masing pegawai; pelaksanaan tugas yaitu bagaimana karyawan mampu melakukan tugasnya dengan akurat atau tidak ada kesalahan; serta tanggungjawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Karakteristik Individu

Salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi kinerja seorang pegawai adalah karakteristik individu. Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain sehingga memiliki karakteristik individu yang berbeda antara mereka. Karakteristik individu diantaranya meliputi usia, masa kerja, status kepegawaian, keterampilan, dan motivasi.

Perbedaan ini umumnya terbawa dalam dunia kerja, meskipun bekerja ditempat yang sama (Dessler, 2016; Robbins & Judge, 2013). Faktor karakteristik individu ini karenanya ditengarai merupakan unsur yang berfungsi membentuk kinerja seseorang menjalankan pekerjaan atau tugasnya, tanpa terkecuali dengan kinerja bidan di rumah sakit.

Usia adalah lama hidup seseorang yang dihitung sejak lahir sampai dengan penelitian ini dilakukan. Hubungan antara usia dan kinerja karyawan telah diuji oleh beberapa peneliti. Hasil riset von Bonsdorff *et al.* (2016) serta Suswati (2015) memperoleh hasil bahwa usia memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja. Namun sebaliknya, studi Vu *et al.* (2019) menemukan usia memiliki hubungan negatif terhadap kinerja. Dengan demikian, masih terdapat gap riset terkait hubungan usia dan kinerja pegawai, sehingga dimunculkan hipotesis penelitian:

H1: Usia berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Masa kerja adalah lamanya seorang bidan bekerja dalam melaksanakan kegiatan keprofesian kebidanan dan dapat di ukur dengan waktu. Studi milik Maryam (2014) serta Suswati (2015) menemukan masa kerja memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Studi Sugito *et al.* (2019) di sisi lain memperoleh hasil terdapat pengaruh negatif dari masa kerja terhadap kinerja guru. Sementara itu, studi Lasut *et al.* (2017) menggunakan uji beda menemukan tidak ada perbedaan kinerja pegawai dilihat dari masa kerja. Dengan demikian, masih terdapat gap riset terkait hubungan masa kerja dan kinerja pegawai, sehingga dimunculkan hipotesis penelitian:

H2: Masa kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Status kepegawaian adalah kedudukan atau posisi seorang bidan dalam pelaksanaan tugas keprofesian di rumah sakit yang dibuktikan dengan SK. Studi milik Aspita & Sugiono (2018) serta milik Ola *et al.* (2019) memperoleh pengaruh parsial bersifat positif dan signifikan. Sebaliknya, studi Hendrajana *et al.* (2017) menemukan hasil bahwa status kepegawaian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, masih terdapat gap riset terkait hubungan status kepegawaian dan kinerja pegawai, sehingga dimunculkan hipotesis penelitian:

H3: Status kepegawaian memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Keterampilan yaitu keahlian, kecakapan dan kompetensi seorang bidan di dalam menjalankan profesi atau tugasnya yang meliputi pemberian asuhan kepada ibu bersalin, ibu nifas dan asuhan bayi baru lahir. Studi Kasmini *et al.* (2017) serta Saban *et al.* (2020) memperoleh temuan empiris bahwa keterampilan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Studi Dewi (2020) mempertegas adanya pengaruh yang positif dan signifikan oleh keterampilan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil-hasil tersebut dimunculkan hipotesis penelitian:

H4: Keterampilan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Motivasi adalah stimulus atau dorongan yang berpengaruh serta membangkitkan semangat dari dalam diri bidan dan di luar yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Temuan-temuan empiris milik Sugito *et al.* (2019) ataupun Kasmini *et al.* (2017) menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Studi empiris Paais & Pattiruhu (2020) juga menemukan adanya pengaruh positif dan

signifikan dari motivasi atas kinerja pegawai. Berdasarkan sejumlah temuan itu, maka dimunculkan hipotesis penelitian:

H5: Motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Faktor Ekstrinsik

Selain karakteristik individu, faktor ekstrinsik juga dinilai berpengaruh terhadap kinerja seorang individu. Di dalam organisasi faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berada diluar dari individu yang dianggap juga mempengaruhi kinerja dari seseorang (Dessler, 2016; Sutrisno, 2015; Robbins & Judge, 2013). Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja seseorang dapat berasal dari organisasi dan lingkungan organisasi itu. Dalam penelitian ini faktor ekstrinsik yang diteliti yaitu imbalan, beban kerja, supervisi dan pelatihan.

Imbalan merupakan kompensasi dalam bentuk upah, insentif, dan reward yang diberikan kepada bidan setelah mereka memberikan kemampuan, keahlian serta usahanya kepada organisasi. Hasil riset Ramli (2018) menemukan imbalan atau kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan atas kinerja karyawan. Studi-studi empiris milik Aspita & Sugiono (2018) serta Saban *et al.* (2020) memperoleh bahwa imbalan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian maka dimunculkan hipotesis penelitian:

H6: Imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Beban kerja adalah tanggung jawab seorang bidan yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan keprofesian kebidanan berdasarkan ilmu yang dimiliki sesuai tupoksi dan di luar tupoksi dalam jangka waktu tertentu. Studi riset milik Siswanto *et al.* (2019) serta Dhelvia & Soegoto (2018) menemukan bahwa beban

kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan atas kinerja karyawan. Namun sebaliknya, studi empiris milik Soelton *et al.* (2018) memperoleh bahwa beban kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian dimunculkan hipotesis penelitian:

H7: Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Supervisi adalah pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Penelitian Rahmawan & Masruroh (2020) serta Harpis & Bahri (2020) mengidentifikasi pelaksanaan supervisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan empiris dari studi Zulkifli & Gani (2018) juga memperoleh bahwa supervisi memiliki pengaruh positif dan signifikan atas kinerja pegawai. Atas pemikiran tersebut, dimunculkan hipotesis penelitian:

H8: Supervisi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

Pelatihan adalah keterlibatan bidan dalam kegiatan pendidikan non formal yang pernah diikuti dalam waktu singkat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keprofesian kebidanan dalam bekerja. Studi milik Guan & Frenkel (2019) menemukan bahwa program pelatihan yang diikuti memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Temuan empiris dari studi empiris milik Sendawula *et al.* (2018) serta Mukminin *et al.* (2020) juga mengidentifikasi bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian maka dimunculkan hipotesis penelitian:

H9: Pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bidan.

METODE PENELITIAN

Penelitian survey ini menganalisis pengaruh karakteristik individu (umur, masa kerja, status kepegawaian, keterampilan, motivasi) dan faktor ekstrinsik (imbalan, beban kerja, supervisi dan pelatihan) terhadap kinerja bidan.

Responden adalah seluruh bidan yang bertugas di ruang kebidanan rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang berjumlah 47 orang. Pengumpulan data primer menggunakan kuisioner, dan didukung oleh wawancara langsung.

Pengukuran Variabel

Kinerja bidan dinilai menggunakan kuisioner yang berisi pernyataan mengenai standar kerja bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI no 900/MENKES/SK/VII/2002 yang terdiri dari asuhan persalinan, asuhan nifas dan asuhan bayi baru lahir dengan kategori 'Kurang Baik' jika total skor < 75 , serta kategori 'Baik' jika total skor ≥ 75 .

Pengukuran variabel usia menggunakan dua kategori, adalah: (a) < 35 tahun; dan, (b) ≥ 35 tahun. Pengukuran masa kerja menggunakan dua kategori, yaitu: (a) baru < 5 tahun; serta, (b) Lama ≥ 5 tahun. Status kepegawaian diukur dengan menggunakan tiga kategori, adalah: (a) ASN; (b) honor; dan, (c) kontrak.

Untuk variabel-variabel keterampilan, motivasi, imbalan, beban kerja, supervise dan pelatihan, diukur melalui 5-skala Likert, yaitu rentang skor 1 untuk jawaban 'Tidak Pernah' atau 'Rendah Sekali' sampai skor 5 untuk jawaban 'Selalu' atau 'Sangat Tinggi'. Variabel keterampilan diukur menggunakan 23 indikator dengan kategori 'Tidak Baik' jika total skor ≤ 69 , serta kategori 'Baik' jika total skor > 69 . Variabel motivasi diukur menggunakan 10 indikator dengan kategori 'Tidak Baik' jika total skor ≤ 30 , serta

kategori 'Baik' jika total skor > 30 . Variabel imbalan diukur menggunakan 3 indikator dengan kategori 'Tidak Baik' jika total skor ≤ 9 , serta kategori 'Baik' jika total skor > 9 . Variabel beban kerja diukur menggunakan 3 indikator dengan kategori 'Tidak Baik' jika total skor ≤ 9 , serta kategori 'Baik' jika total skor > 9 . Variabel supervisi diukur menggunakan 3 indikator dengan kategori 'Tidak Baik' jika total skor ≤ 9 , serta kategori 'Baik' jika total skor > 9 .

Metode Analisis Data

Ada beberapa tahapan dalam proses analisis data yang dilakukan. Tahap analisis univariat yang dijalankan untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel yang dianalisis. Tahap berikutnya yaitu melakukan uji chi-square untuk menganalisis hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, dengan batas signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil uji statistik dikatakan signifikan apabila nilai p lebih kecil dari α (0,05); sebaliknya, dikatakan tidak signifikan apabila nilai p lebih kecil dari α (0,05).

Tahap terakhir yaitu melakukan analisis regresi logistik ganda, dengan tujuan menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji regresi logistik dengan menggunakan metode *Backward LR* dimana variabel yang tidak signifikan dengan nilai $p > 0,05$ akan dikeluarkan secara bertahap (*step by step*). Sebelum uji ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemilihan variabel yang memenuhi syarat yaitu jika nilai $p < 0,05$ diperoleh saat uji *chi-square* akan dimasukkan ke dalam analisis multivariat.

HASIL ANALISIS

Hasil olah data berkaitan dengan distribusi frekuensi serta uji *chi-square* dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Pengaruh Karakteristik Individu dan Kinerja Bidan

Variabel	Kinerja				Jumlah		<i>p-value</i>
	Kurang Baik		Baik		N	%	
	N	%	N	%			
Umur							
<35 tahun	7	70,0	3	30,0	10	100,0	0,719
≥35 tahun	22	59,5	15	40,5	37	100,0	
Masa Kerja							
< 5 tahun	7	77,8	2	22,2	9	100,0	0,449
≥ 5 tahun	22	57,9	16	42,1	38	100,0	
Status Kepegawaian							
Kontrak	23	92,0	2	8,0	25	100,0	0,0001
Honor	1	50,0	1	50,0	2	100,0	
ASN	5	25,0	15	75,0	20	100,0	
Keterampilan							
Tidak baik	24	77,4	7	22,6	31	100,0	0,0002
Baik	5	31,2	11	68,8	16	100,0	
Motivasi							
Tidak baik	24	88,9	3	11,1	27	100,0	0,0001
Baik	5	25,0	15	75,0	20	100,0	

Sumber: Data diolah, 2020.

Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh Faktor Ekstrinsik dan Kinerja Bidan

Variabel	Kinerja				Jumlah		<i>p-value</i>
	Kurang Baik		Baik				
	N	%	N	%	N	%	
Imbalan							
Tidak baik	10	71,4	4	28,6	14	100,0	0,372
Baik	19	57,6	14	42,4	33	100,0	
Beban Kerja							
Tidak baik	7	50,0	7	50,0	14	100,0	0,282
Baik	22	66,7	11	33,3	33	100,0	
Supervisi							
Tidak baik	22	75,9	7	24,1	29	100,0	0,011
Baik	7	38,9	11	61,1	18	100,0	
Pelatihan							
Tidak pernah	24	72,7	9	27,3	33	100,0	0,031
Jarang	5	35,7	9	64,3	14	100,0	

Sumber: Data diolah, 2020.

Hasil distribusi frekuensi pada Tabel 1 untuk variabel-variabel dari karakteristik individu mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki umur lebih besar atau sama dengan 35 tahun (37 orang atau 78,7 persen), masa kerja lebih lama atau sama

dengan 5 tahun (38 orang atau 80,9 persen), status kepegawaian sebagai pegawai kontrak (25 orang atau 53,2 persen), tingkat keterampilan pada level tidak baik (31 orang atau 66,0 persen), serta motivasi kerja pada level tidak baik (27 orang atau 57,4 persen).

Hasil uji *chi-square* dalam Tabel 1 mengenai hubungan antara variabel-variabel dari karakteristik individu (yaitu: umur, masa kerja, status kepegawaian, keterampilan, dan motivasi) dengan kinerja bidan. Berdasarkan kriteria penilaian diperoleh ada tiga variabel independen dari karakteristik individu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bidan, yaitu status kepegawaian ($p = 0,0001 < 0,05$), keterampilan ($p = 0,0002 < 0,05$), serta motivasi ($p = 0,0001 < 0,05$). Sementara dua variabel independen lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu usia ($p = 0,719 > 0,05$), serta masa kerja ($p = 0,449 > 0,05$). Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis ketiga (H3), hipotesis keempat (H4), dan hipotesis kelima (H5) bisa diterima; dan menolak hipotesis pertama (H1), dan hipotesis kedua (H2).

Berikutnya, hasil distribusi frekuensi pada Tabel 2 untuk variabel-variabel dari faktor ekstrinsik menunjukkan mayoritas responden memiliki imbalan pada level baik (33 orang atau 70,2 persen), beban kerja pada level baik (33 orang atau 70,2 persen), supervisi pada level tidak baik (29 orang atau 61,7 persen), serta pelatihan pada level tidak pernah (33 orang atau 70,2 persen).

Tabel 2 juga merangkum hasil uji *chi-square* mengenai hubungan antara variabel-variabel dari faktor ekstrinsik (yaitu: imbalan, beban kerja, supervisi, dan pelatihan) dengan kinerja bidan. Berdasarkan kriteria penilaian diperoleh ada dua variabel independen dari faktor ekstrinsik yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bidan, yaitu

supervisi ($p = 0,011 < 0,05$), serta pelatihan ($p = 0,031 < 0,05$). Sementara dua variabel independen lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu imbalan ($p = 0,372 > 0,05$), serta beban kerja ($p = 0,282 > 0,05$). Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis ke delapan (H8) dan hipotesis ke sembilan (H9) bisa diterima; serta menolak hipotesis ke enam (H6), dan hipotesis ketujuh (H7).

Berdasarkan hasil-hasil dalam Tabel 1 dan Tabel 2 diperoleh terdapat lima variabel independen yang terpilih untuk dimasukkan ke dalam uji multivariat karena memiliki *p-value* dibawah α (0,05). Kelima variabel itu adalah status kepegawaian, keterampilan, motivasi, supervisi, serta pelatihan; yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik uji regresi logistik ganda dengan metode *Backward LR* dimana variabel yang tidak signifikan dengan nilai $p > 0,05$ akan dikeluarkan secara bertahap (*step by step*).

Hasil akhir dari analisis regresi logistik berganda tentang pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 3. Hasil itu menunjukkan ada pengaruh dari motivasi, keterampilan dan supervisi terhadap kinerja bidan di RSUD Kota Langsa dengan *p-value* $< 0,005$. Dari hasil uji regresi logistik ganda ini juga diidentifikasi bahwa variabel yang dominan memengaruhi kinerja bidan adalah motivasi dengan nilai *Exp B* sebesar 27,784 yang berarti bidan memiliki motivasi kerja baik sebesar 27,784 kali kemungkinan kinerja baik di RSUD Kota Langsa dibandingkan dengan motivasi tidak baik.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Logistik Berganda

Variabel	B	<i>p-value</i>	<i>Exp B</i>	95% CI
<i>Constant</i>	-3,896			
Motivasi	3,324	0,001	27,784	3,870-199,483
Keterampilan	2,281	0,023	9,784	1,362-70,256
Supervisi	2,055	0,039	7,807	1,114-54,694

Sumber: Data diolah, 2021.

Pembahasan

Hasil yang diperoleh membuktikan tidak ada pengaruh usia terhadap kinerja bidan pada obyek penelitian. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai tidaklah ditentukan secara nyata oleh faktor usia pegawai yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai dengan temuan riset von Bonsdorff *et al.* (2016), Suswati (2015) serta Vu *et al.* (2019). Hasil ini menolak anggapan bahwa semakin tua seorang bidan maka semakin merosot kinerjanya, karena keterampilan, kecepatan, kecekatan kekuatan dan koordinasi dirinya menurun dengan berjalannya waktu. Bidan yang dianggap sudah berumur juga kerap bersikap kurang luwes dan menolak penerapan teknologi baru. Tetapi ada sejumlah kualitas positif yang dimiliki oleh bidan yang lebih tua berdasarkan pengalaman, pertimbangan, etika kerja yang kuat serta komitmennya terhadap mutu pekerjaannya.

Hasil yang diperoleh ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masa kerja dengan kinerja bidan, sesuai temuan empiris milik Lasut *et al.* (2017) tetapi berbeda dengan temuan Maryam (2014), Suswati (2015) dan Sugito *et al.* (2019). Dengan demikian, hasil ini menolak argumen bahwa semakin lama masa kerja seorang pegawai maka akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Masa kerja menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat menurunkan kinerja karyawan jika tidak diperhatikan secara benar oleh pihak perusahaan (Luthans *et al.*, 2015; Dessler, 2016). Masa kerja bidan sebagian besar lama namun tidak menyebabkan kinerja bidan baik. Faktor tidak adanya hubungan antara masa kerja bisa disebabkan karena terjadi kejenuhan terhadap rutinitas pekerjaan dan kebiasaan dalam memberikan asuhan kebidanan, juga karena kurangnya pembinaan mengenai pelayanan dan asuhan kebidanan terbaru terhadap para bidan. Bertambahnya

lama kerja seorang bidan sebaiknya disertai kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan setiap individu agar tidak terjadi kejenuhan terhadap rutinitas sehingga kualitas pelayanan kebidanan menjadi lebih baik.

Hasil empiris lain menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara status kepegawaian dengan kinerja bidan, sesuai dengan temuan empiris milik Aspita & Sugiono (2018) serta Ola *et al.* (2019). Status kepegawaian yang dimiliki bidan sebagian besar adalah kontrak. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya (Sutrisno, 2015; Dessler, 2016). Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang di dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status. Dan setiap status memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda pula. Demikian pula dengan status kepegawaian seorang bidan di rumah sakit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan mempengaruhi kinerja bidan tersebut.

Hasil empiris juga menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keterampilan dengan kinerja bidan. Hasil ini menegaskan temuan empiris milik Kasmini *et al.* (2017), Saban *et al.* (2020) serta Dewi (2020). Hal ini karena bidan merupakan suatu profesi, dimana profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Dengan keterampilan kerja yang dimiliki seorang bidan, maka pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa keterampilan atau kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya

memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu (Yuniarsih, 2013; Batbuall, 2019). Keterampilan adalah hal-hal yang orang bisa lakukan dengan baik. Keterampilan bidan sebagai tenaga pelayanan kesehatan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan perannya di tengah masyarakat. Apabila seorang tenaga bidan mempunyai kemampuan yang baik tentang pelayanan kesehatan diharapkan mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik pula. Keterampilan sebagai ungkapan dan perwujudan diri individu termasuk kebutuhan pokok manusia yang bilamana terwujud memberikan rasa kepuasan dan keberhasilan yang mendalam, yang pada akhirnya dapat menentukan dan meningkatkan makna hidup manusia dengan segala kompleksitasnya.

Hasil empiris berikutnya memperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja bidan, yang mana menegaskan temuan milik Sugito *et al.* (2019), Kasmini *et al.* (2017), serta Paais & Pattiruhu (2020). Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang maupun lingkungannya dimana besar ataupun kecilnya pengaruh tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan (Robbins & Judge, 2013; Sutrisno, 2015). Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya memiliki visi yang jauh ke depan. Baginya bekerja bukan sekadar untuk memperoleh sesuatu (uang, harga diri, kebanggaan, prestasi) tetapi adalah proses belajar dan proses yang harus dilaluinya untuk mencapai misi hidupnya. Demikian juga keberadaan bidan, apabila memiliki motivasi kerja baik akan dapat mencapai target cakupan yang ditetapkan dalam program pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk meningkatkan motivasi bidan dalam meningkatkan kinerjanya khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak agar terlaksana dengan baik, maka perlu dukungan

dari berbagai pihak, khususnya atasan atau diberikan penghargaan terhadap kinerja bidan melalui pemilihan bidan teladan. Perilaku dari bidan akan baik berasal dari motivasinya yang memang baik. Jadi apabila seorang bidan memiliki motivasi yang baik untuk mencapai tujuannya, maka kinerja akan meningkat.

Hasil empiris berikutnya menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara imbalan dengan kinerja. Hasil ini berlawanan dengan hasil riset Ramli (2018), Aspita & Sugiono (2018) serta Saban *et al.* (2020). Gaji atau imbalan finansial yang diterima oleh seseorang bagi jasa-jasa yang diberikannya kepada organisasi dapat mengambil berbagai bentuk, jumlah imbalan finansial yang layak diterimanya berdasarkan jenjang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sifat pekerjaan, besarnya tanggung jawab dan wewenang (Robbins & Judge, 2013; Dessler, 2016). Terdapat pernyataan bahwa tidak ada satu organisasi yang dapat memberikan kekuatan baru kepada pegawainya atau meningkatkan produktivitas, jika tidak memiliki sistem kompensasi dan gaji yang realistis. Apabila sistem dari kompensasi dan penggajian terimplementasi dengan benar maka akan memotivasi pegawai. Bidan mengemukakan bahwa gaji yang diterima sudah sesuai, namun jasa medik yang mereka terima dirasa kurang dan tidak sesuai dengan beban kerja, khususnya hal ini sangat dirasakan oleh bidan dengan status honor dan kontrak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kinerja bidan, atau bahwa hasil ini menolak argument bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kelelahan kerja akibat beban kerja dilihat dari jumlah pasien yang meningkat dengan kinerja. Hasil ini sesuai dengan temuan studi empiris milik Soelton *et al.* (2018); namun bertentangan dengan hasil studi milik Siswanto *et al.* (2019) serta Dhelvia & Soegoto (2018).

Bidan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keterampilan dan tupoksi. Beban kerja yang dirasakan oleh bidan yang bertugas di ruang rawat inap kebidanan setelah terjadinya pengurangan karyawan yang selama ini setiap shift berjumlah 5-6 orang. Tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat, dimana analisa beban kerjanya dapat dilihat dari aspek-aspek seperti tugas-tugas yang dijalankan berdasarkan fungsi utamanya, begitupun tugas tambahan yang dikerjakan, jumlah pasien yang harus dirawat, kapasitas kerjanya sesuai dengan pendidikan yang ia peroleh, waktu kerja yang digunakan untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan jam kerja yang berlangsung setiap hari, serta kelengkapan fasilitas yang dapat membantu perawat menyelesaikan kerjanya dengan baik.

Hasil empiris selanjutnya menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara supervisi bidan dengan kinerja bidan, sejalan dengan temuan empiris milik Rahmawan & Masruroh (2020), Harpis & Bahri (2020) serta Zulkifli & Gani (2018). Supervisi adalah salah satu bagian proses atau kegiatan dari fungsi pengawasan ataupun pengendalian (*controlling*), serta sumber dari sekumpulan kegiatan pengambilan keputusan yang terkait erat dengan aktivitas perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dan informasi dari kepemimpinan dan pengevaluasian setiap kinerja karyawan (Batbuall, 2019; Luthans *et al.*, 2015). Supervisi merupakan bagian penting dari manajemen keperawatan, karena dengan supervisi dapat mengatasi masalah dalam organisasi dengan cepat. Tugas pengawasan ataupun supervisi tidak bisa dipisahkan dari fungsi kepemimpinan. Supervisor atau pengawas di mata karyawan dianggap sebagai figur ayah dengan peran yang bukan hanya mengawasi, mengarahkan juga harus bisa menampung segala keluhan baik berkaitan dengan pekerjaan maupun masalah-masalah pribadi yang menghambat

di saat bekerja. Dengan adanya supervisi diharapkan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan asuhan kebidanan yang baik sehingga penilaian kinerja yang profesional dan legal bisa dipertanggung jawabkan.

Terakhir, hasil empiris dalam penelitian ini membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pelatihan dengan kinerja bidan. Hasil ini sejalan dengan temuan studi Guan & Frenkel (2019), Sendawula *et al.* (2018) serta Mukminin *et al.* (2020) Hal ini berarti makin sering bidan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugas-tugasnya maka makin meningkat kinerjanya. Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori (Sutrisno, 2015; Dessler, 2016). Pelatihan membantu para pegawai mengembangkan berbagai keterampilan tertentu yang memungkinkannya untuk berhasil dalam pekerjaannya saat ini dan mengembangkan pekerjaannya di masa mendatang (Luthans, *et al.*, 2015; Robbins & Judge, 2013). Dengan pelatihan bidan dapat menambah ilmu dan pengetahuannya khususnya dalam pelayanan kebidanan. Sehingga sudah jelas bidan yang pernah mengikuti pelatihan cenderung lebih tinggi kinerjanya dari bidan yang belum pernah mengikuti pelatihan. Sesuai dengan kebijakan penempatan bidan merupakan salah satu upaya terobosan dalam mempercepat penurunan AKI, AKB dan tingkat fertilitas maka bidan perlu dibina secara mantap terstruktur agar bidan mampu menunjukkan kinerja yang tinggi. Pembinaan yang mantap dapat menjadikan bidan konsisten mempunyai tujuan terarah kepada penurunan AKI, AKB yang punya semangat baja, terampil dan kegiatan program KIA dengan kualitas tenaga barisan terdepan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan hanya tiga variabel independen dari karakteristik individu yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bidan, yaitu status kepegawaian, keterampilan, dan motivasi. Sementara itu, hanya ada dua variabel independen dari faktor ekstrinsik terbukti berpengaruh secara signifikan atas kinerja bidan, yaitu supervisi dan pelatihan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukannya penilaian kinerja bidan secara objektif berdasarkan profesi kebidanan sehingga dapat diketahui kemampuan dan keterampilan bidan serta motivasinya. Dengan penilaian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam perencanaan kegiatan pelatihan bagi bidan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan seperti pelatihan penanganan pre-eklamsi dan/atau eklamsi, penanganan perdarahan selama kehamilan dan persalinan, pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), penanganan bayi asfiksia, penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

Rekomendasi kedua bahwa perlu dilakukan proses supervisi khususnya pada pelayanan kebidanan dan asuhan kebidanan sehingga bidan yang memiliki kinerja baik dapat diberikan reward dalam bentuk penghargaan, peningkatan karier, pemberian hadiah dan memberikan *punishment* pada bidan yang memiliki kinerja kurang baik dalam bentuk teguran secara lisan dan tulisan, pemindahan tempat tugas.

Rekomendasi ketiga yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bidan untuk terus berkembang dan mendapat peluang yang lebih terbuka untuk promosi, memperbaiki kondisi kerja rumah sakit agar bidan merasa aman serta nyaman di dalam bekerja, meningkatkan dukungan dari atasan, terutama atas kemajuan dan keberhasilan bidan.

REFERENSI

- Andayani, I., & Tirtayasa, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 45-54. doi: 10.30596/maneggio.v2i1.3367.
- Ardiansyah, Y., & Sulistiyowati, L. H. (2018). Pengaruh kompetensi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 91-100. doi: 10.33603/jibm.v2i1.1064.
- Aspita, M., & Sugiono, E. (2018). Pengaruh jenjang karir, kompensasi finansial dan status karyawan terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Daan Mogot. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 14(1), 1-14. Retrieved from: <http://journal.unas.ac.id/oikonomia/article/view/510>.
- Azwar, A. (2014). *Pengantar administrasi kesehatan*. Binarupa Aksara.
- Batbuall, B. (2019). *Self management* untuk meningkatkan kinerja bidan. Penerbit Adab.
- Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. *International Journal of Hospitality Management*, 77(January), 64-75. doi: 10.1016/j.ijhm.2018.06.014.
- Dessler, G. (2016). *Human Resource Management (15th Edition)*. Pearson.
- Dewi, C. A. (2020). Pengaruh pengalaman kerja dan keterampilan terhadap kinerja karyawan di CV. Grammes Jewelry Kerobokan. *Majalah Ilmiah Widya-cakra*, 3(1), 84-90. Retrieved from: <http://Jurnal.Stiesahidbali.Ac.Id/Index.Php/MIW/Article/View/67>.
- Dhelveia, R., & Soegoto, H. S. (2018). The influence workload and competence on employee performance in PT. X Finance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 225, 135-138. Retrieved from: <https://>

www.atlantis-press.com/article/25906815.pdf.

- Diamantidis, A. D., & Chatzoglou, P. (2019). Factors affecting employee performance: A empirical approach. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68(1), 171-193. doi: 10.1108/IJPPM-01-2018-0012.
- Guan, X., & Frenkel, S. (2019). How perceptions of training impact employee performance: Evidence from two Chinese manufacturing firms. *Personnel Review*, 48(1), 163-183. Doi: 10.1108/PR-05-2017-0141.
- Harpis, M., & Bahri, S. (2020). Pengaruh fasilitas kerja, pengawasan dan kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 13-27. doi: 10.30596/maneggio.v3i1.4760.
- Hendrajana, I. G. M. R., Sintaasih, D. K., & Saroyeni, P. (2017). Analisis hubungan status kepegawaian, komitmen organisasional dan kinerja karyawan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 357-384. Retrieved from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/24339>.
- Kasmini, N. W. A., Wirama, D. G., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh pendidikan, kompetensi, kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasi pada kinerja bendahara sekolah menengah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 109-136. Retrieved from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/24142>.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lasut, E. E., Lengkong, V. P. K., & Ogi, I. W. J. (2017). Analisis perbedaan kinerja pegawai berdasarkan gender, usia dan masa kerja (Studi pada Dinas Pendidikan Sitaro). *Jurnal EMBA*, 5(2), 2771-2780. Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/17155/16702>.
- Luthans, F., Luthans, B. C., & Luthans, K. W. (2015). *Organizational behavior: An evidence-based approach (13th edition)*. Information Age Publishing.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2010). *Evaluasi kinerja SDM*. Refika Aditama.
- Mangkuprawira, S., & Hubeis, A. V. (2007). *Manajemen mutu sumber daya manusia*. PT. Ghalia Indonesia.
- Maryam, S. (2014). Masa kerja, tingkat pendidikan, dan rotasi kerja meningkatkan kinerja perawat di RS jiwa dr. Soeharto Heerdjan. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari*, 1(1), 35-46. Retrieved from: <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Gantari/article/viewFile/836/571>.
- Mukminin, A. A., Semmaila, B., & Ramlawati, R. (2020). Effect of education and training, work discipline and organizational culture on employee performance. *Point of View Research Management*, 1(3), 19-28. Retrieved from: <http://journal.accountingpointofview.id/index.php/POVREMA/article/view/33>.
- Mulyasari, I. (2018). Pengaruh kecerdasan emosional dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. *Journal of Management Review*, 2(2), 190-197. doi: 10.25157/jmr.v2i2.1786.
- Murti, H., & Srimulyani, V. A. (2013). Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dengan variabel pemediasi kepuasan kerja pada PDAM Kota Madiun. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 10-17. Retrieved from: https://www.academia.edu/10150197/PENGARUH_MOTIVASI_TERHADAP_P_KINERJA_PEGAWAI_DENGAN_VARIABEL_PEMEDIASI_KEPUASAAN_KERJA_PADA_PDAM_KOTA_MADIUN.

- Ola, A. B., Abdullah, R., & Azis, M. (2019). Pengaruh status kepegawaian dan komitmen organisasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja di UPTD Puskesmas Kajuara Kabupaten Bone. *YUME: Journal of Management*, 2(1), 29-42. doi: 10.2568/yum.v2i1.359.
- Paais, M., & Pattiruhu, J. R. (2020). Effect of motivation, leadership, and organizational culture on satisfaction and employee performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 577-588. doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no8.577.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Purwanto, A., Prameswari, M., Asbar, M., Ramdan, M., & Setiawan, S. (2020). Dampak kepemimpinan, budaya organisasi dan perilaku kerja inovatif terhadap kinerja pegawai puskesmas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 19-27. doi: 10.33221/jikm.v9i01.-473.
- Rahmawan, A., & Masruroh, S. (2020). Pengaruh motivasi, pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan. *Journal Management and Business Applied*, 1(1), 35-45. Retrieved from: www.ejurnal.stieyapan.ac.id/index.php/SAMBA/article/view/98/108.
- Ramli, A. H. (2018). Compensation, job satisfaction and employee performance in health services. *Business and Entrepreneurial Review*, 18(2), 177-186. doi: 10.25105/ber.v18i2.5335.
- Rivai, V., Ramly, M., Mutis, T., & Arafah, W. (2012). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behavior* (15th ed.). Pearson.
- Saban, D., Basalamah, S., Gani, A., & Rahman, Z. (2020). Impact of Islamic work ethics, competencies, compensation, work culture on job satisfaction and employee performance: The case of four star hotels. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1), 1-8. doi: 10.24018/ejbmr.2020.5.1.181.
- Sendawula, K., Kimuli, S. N., Bananuka, J., & Muganga, G. N. (2018). Training, employee engagement and employee performance: Evidence from Uganda's health sector. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1-12, doi: 10.1080/23311975.2018.1470891.
- Siswanto, S., Supriyanto, A. S., I'maha, U., Asnawia, N., & Wekke, I. S. (2019). Does a workload influence the performance of bank employees?. *Management Science Letters*, 9, 639-650. doi: 10.5267/j.msl.2019.2.007.
- Soelton, M., Pebriani, P., Umar, M., Triwulan, J., & Wilantara, J. (2018). How transformational leadership, communication, and workload on the employee performance affect shoes industries. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 17(5), 87-94. Retrieved from: http://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/03/seajbel5-VOL17_241.pdf.
- Sugito, Suyitno, Y., & Kuntoro. (2019). Pengaruh masa kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru sekolah dasar di Desa Samudra dan Samudra Kulon. *Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar*, 11(1), 1-18. doi: 10.30595/dinamika.v11i1.5980.
- Suryani, H., Pramono, J. S., Syukur, N. A., & Mure, B. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan dalam pendokumentasian buku KIA. *Mahakam Midwifery Journal*, 5(2), 64-81. Retrieved from: ejournalbidan.poltekkes-kaltim.ac.id/ojs/index.php/midwifery/article/view/158.

- Suswati, E. (2012). Karakteristik individu dan karakteristik organisasi pengaruhnya terhadap motivasi dan kinerja bidan pada rumah sakit umum daerah tapal kuda Jawa Timur. Conference Proceeding: Capturing Opportunities for ASEAN Economic Community 2015. Universitas Kristen Satya Wacana. Retrieved from: https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1290/4/PROS_Endang%20S_Karakteristik%20Individu%20dan%20Karakteristik%20Organisasi_Abstract.pdf.
- Sutrisno, E. (2015). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenadamedia Group.
- von Bonsdorff, M. E., Zhou, L., Wang, M., Vanhala, S., von Bonsdorff, M. B., & Rantanen, T. (2016). Employee age and company performance: An integrated model of aging and human resource management practices. *Journal of Management*, 44(8), 3124-3150. doi: 10.1177/0149206316662314.
- Vu, T-H., Nguyen, V-D., Ho, M-T., & Vuong, Q-H. (2019). Determinants of Vietnamese listed firm performance: Competition, wage, CEO, firm size, age, and international trade. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(2), 62-80. doi: 10.3390/jrfm12020062.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Salemba Empat.
- Yuniarsih, T. (2013). *Manajemen sumber daya manusia: Teori, aplikasi dan isu penelitian*. Alfabeta.
- Zulkifli & Gani, S. (2018). Pengaruh pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*, 6(1), 1-17. doi: 10.33387/jms.v6i1.1303.